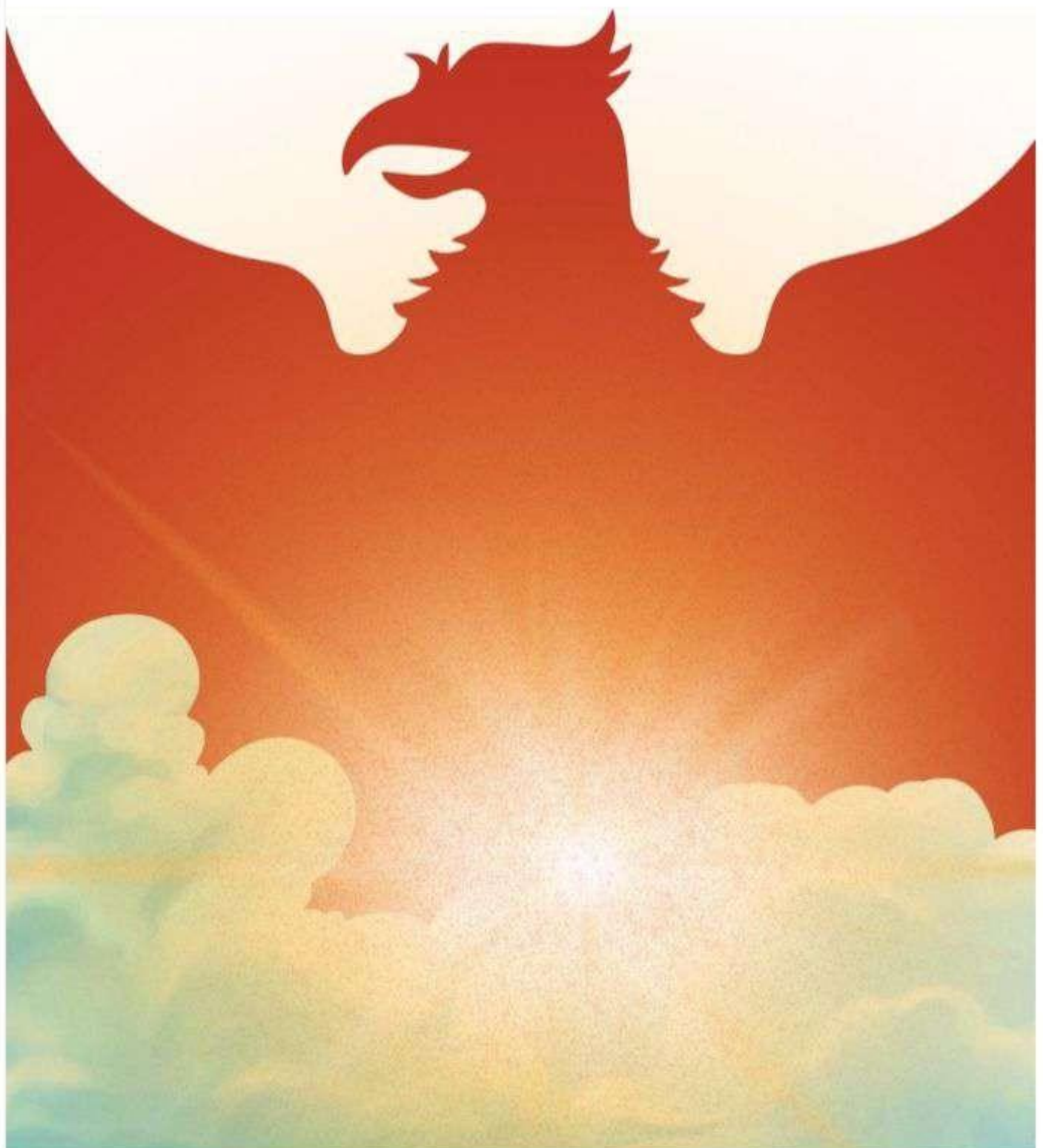


**MEMBANGUN MASYARAKAT  
SEHAT DAN BERKARAKTER  
MELALUI  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**



**Copyright © 2026, Penerbit Yayasan Insan Cipta Medan**

Judul Buku : Membangun Masyarakat Sehat dan Berkarakter Melalui Pendidikan  
Kewarganegaraan  
Penulis : Keysa Aura Syahna Pisano  
Shira Rizkyani  
Shautiya Khairiyah  
Sri Rafida Hayani  
Ranisah Mukerzi  
Alya Azura Haris  
Ferry Hermawan  
Nindita Khairin Nazwa  
Wanna Aysha  
Penerbit : Yayasan Insan Cipta Medan  
Jalan Baru, Gang Keluarga, No. Hp 085376744230, Medan Tembung,  
20225  
Email : [yayasaninsanciptamedan@gmail.com](mailto:yayasaninsanciptamedan@gmail.com)  
Website : <https://insanciptamedan.or.id/>  
Cetakan Pertama : Januari 2026  
Penata Letak : Gumarpi Rahis Pasaribu  
QRCBN :



**62-3870-5115-214**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga e-book berjudul “Membangun Masyarakat Sehat dan Berkarakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. E-book ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran vital Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk generasi bangsa yang cerdas, berintegritas, serta memiliki kesadaran penuh mengenai pentingnya kesehatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui e-book ini, penulis berupaya menguraikan konsep dasar PKn dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat sehat dan berkarakter. Pembahasan di dalamnya mencakup landasan teoritis pendidikan kewarganegaraan, urgensi pendidikan karakter dalam konteks kehidupan modern, serta peran kesadaran kesehatan sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang tangguh, produktif. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan e-book ini. Terima kasih ditujukan kepada para pendidik yang terus berkomitmen dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, rekan sejawat yang memberikan masukan konstruktif, serta semua pihak yang turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa e-book ini masih jauh dari sempurna. Segala kekurangan yang terdapat pada isi maupun penjelasan adalah murni keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas pada penyusunan karya di masa mendatang.

Akhir kata, semoga e-book ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi salah satu kontribusi kecil dalam mendukung terbentuknya masyarakat Indonesia yang sehat, berkarakter, dan bertanggung jawab.

Medan, November 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 KONSEP MASYARAKAT SEHAT DAN BERKARAKTER .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian masyarakat sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual .....	1
B. Ciri-ciri masyarakat berkarakter: beretika, bertanggung jawab, dan berkeadaban .....	6
C. Hubungan antara kesehatan, karakter, dan kualitas kehidupan berbangsa .....	8
D. Landasan filosofis membangun masyarakat sehat dan berkarakter .....	10
<b>BAB 2 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBANGUNAN BANGSA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) .....	17
B. Fungsi PKn sebagai pembentuk warga negara yang cerdas, sehat, dan bermoral .....	19
C. Nilai-nilai dasar PKn: nasionalisme, demokrasi, tanggung jawab, toleransi .....	22
D. Relevansi PKn terhadap pembentukan masyarakat yang berkarakter .....	24
<b>BAB 3 BERETIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PEMBENTUKAN KARAKTER.....</b>	<b>27</b>
A. PKn sebagai media internalisasi nilai moral dan etika .....	27
B. Peran PKn dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, gotong royong, dan tanggung jawab .....	
C. Strategi pembentukan karakter melalui kegiatan pembelajaran dan keteladanan .....	33
D. Hubungan karakter pribadi dengan tanggung jawab sosial warga negara .....	35
<b>BAB 4 PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KESADARAN HIDUP SEHAT.....</b>	<b>37</b>
A. Konsep hidup sehat dalam konteks kewarganegaraan .....	37
B. Nilai tanggung jawab terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat .....	39
C. PKn sebagai sarana pendidikan kesehatan berbasis nilai kebangsaan .....	42
D. Integrasi pendidikan kesehatan dalam pembelajaran PKn .....	44
<b>BAB 5 NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN SEBAGAI LANDASAN HIDUP SEHAT DAN BERMORAL .....</b>	<b>47</b>
A. Nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam PKn .....	47
B. Kesehatan sosial sebagai wujud implementasi nilai kewarganegaraan .....	49
C. Keadilan, empati, dan partisipasi aktif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat .....	51

D. Peran nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan masyarakat sehat dan berkarakter .....	53
<b>BAB 6 STRATEGI INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DAN KARAKTER DALAM PKN</b>	<b>56</b>
A. Model pembelajaran integratif (kognitif, afektif, dan psikomotorik) .....	56
B. Pendekatan kurikulum yang menanamkan nilai kesehatan dan moralitas .....	57
C. Contoh kegiatan PKN yang menumbuhkan karakter dan kesadaran hidup sehat .....	58
D. Kolaborasi guru, orang tua, dan masyarakat dalam pembentukan karakter siswa.....	59
<b>BAB 7 PERAN GURU DAN SEKOLAH SEBAGAI AGEN PEMBENTUKAN KARAKTER DAN KESEHATAN</b> .....	<b>61</b>
A. Guru PKN sebagai teladan dan motivator .....	61
B. Sekolah sebagai lingkungan sosial yang membentuk budaya sehat dan berkarakter .....	63
C. Program sekolah: UKS, kegiatan sosial, dan pendidikan karakter terintegrasi .....	65
D. Evaluasi peran institusi pendidikan dalam menciptakan masyarakat berkarakter .....	68
<b>BAB 8 TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT DAN BERKARAKTER</b> .....	<b>71</b>
A. Pengaruh globalisasi dan degradasi moral di kalangan generasi muda .....	71
B. Kurangnya keteladanan dan peran keluarga dalam pendidikan karakter .....	74
C. Tantangan teknologi dan media sosial terhadap gaya hidup sehat .....	77
D. Kesenjangan antara nilai ideal PKN dan realitas masyarakat .....	79
<b>BAB 9 INOVASI DAN UPAYA PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN</b> .....	<b>82</b>
A. Pembelajaran PKN berbasis proyek dan partisipasi sosial .....	82
B. Inovasi digital untuk menanamkan nilai karakter dan kesadaran hidup sehat .....	85
C. Pemberdayaan masyarakat melalui program kewarganegaraan aktif .....	88
D. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat .....	90
<b>BAB 10 IMPLEMENTASI DAN DAMPAK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP KESEHATAN DAN KARAKTER BANGSA</b> .....	<b>93</b>
A. Dampak jangka panjang pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter .....	93
B. Peningkatan kesadaran hidup sehat dan tanggung jawab sosial warga negara .....	95
C. Indikator keberhasilan masyarakat sehat dan berkarakter .....	97
D. Arah pembangunan bangsa melalui penguatan PKN sebagai pendidikan nilai .....	99

## **BAB I**

### **Konsep Masyarakat Sehat dan Berkarakter**

#### **1. Pengertian Masyarakat Sehat Secara Fisik, Mental, Sosial, dan Spiritual**

Secara umum, konsep sehat tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan fisik semata. Sehat mencakup keadaan sejahtera yang utuh, meliputi fungsi tubuh yang optimal, kestabilan emosional, kemampuan berpikir jernih, hubungan sosial yang harmonis, serta keterhubungan individu dengan nilai dan makna hidup yang lebih dalam. Artinya, seseorang dikatakan benar-benar sehat apabila ia mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh produktivitas, merasa tenang secara psikologis, menjalin interaksi sosial yang positif, dan memiliki orientasi nilai spiritual atau moral yang memberikan makna terhadap kehidupannya. Dalam konteks kehidupan bersama, istilah masyarakat sehat menggambarkan kondisi sekelompok individu yang hidup di lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan fisik yang secara kolektif mendukung tercapainya kesejahteraan setiap anggotanya. Masyarakat yang sehat bukan hanya terdiri dari individu-individu yang sehat secara jasmani, tetapi juga memiliki sistem sosial yang adil, tatanan lingkungan yang bersih dan aman, serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata.<sup>1</sup>

Selain itu, masyarakat sehat juga ditandai oleh adanya rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan sosial. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan saling peduli menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Dalam masyarakat seperti ini, kesehatan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi menjadi bagian dari komitmen sosial yang ditopang oleh kebijakan publik, peran lembaga, dan partisipasi aktif warga. Dalam praktik kesehatan masyarakat modern, pemahaman komprehensif ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, hingga pelaksanaan dan evaluasi upaya kesehatan di tingkat daerah maupun nasional. Pemerintah dan lembaga kesehatan kini tidak lagi menilai keberhasilan hanya dari berkurangnya angka kesakitan atau kematian, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan mental, stabilitas sosial, dan

---

<sup>1</sup> Fiqi Syarifa Nugraheni and Mardiyani Hayati, "Integrasi Perspektif Islam Tentang Kesehatan Jasmani Dan Rohani: Kajian Konseptual," *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman* 4 (2025): 45–66,.

keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma Health in All Policies yang menekankan bahwa setiap sektor pembangunan baik pendidikan, ekonomi, transportasi, maupun lingkungan mempunyai dampak terhadap kesehatan masyarakat.<sup>2</sup>

#### A. Kesehatan Fisik

Masyarakat sehat secara fisik adalah kondisi di mana setiap anggota komunitas memiliki fungsi tubuh yang optimal serta kapasitas fisik yang memadai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan yang berarti. Hal ini tidak hanya ditandai dengan ketiadaan penyakit, tetapi juga dengan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan tuntutan lingkungan, bekerja secara produktif, dan menikmati kualitas hidup yang baik. Faktor-faktor yang mendukung tercapainya masyarakat sehat secara fisik antara lain status gizi yang baik, akses terhadap layanan kesehatan primer, sanitasi dan lingkungan yang bersih, serta adanya program promotif dan preventif yang berkesinambungan. Status gizi yang baik, misalnya melalui pencegahan stunting pada anak, menjadi fondasi penting karena anak yang tumbuh optimal akan memiliki kapasitas belajar dan produktivitas yang lebih tinggi di masa depan.

Layanan kesehatan primer berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani masalah kesehatan, sementara sanitasi dan lingkungan yang mendukung mencegah timbulnya penyakit menular. Program promotif dan preventif seperti edukasi kesehatan, imunisasi, serta kampanye pola hidup bersih dan sehat berfungsi untuk mencegah penyakit sebelum muncul. Intervensi strategis pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi sangat krusial karena periode ini merupakan fase emas pertumbuhan anak, sehingga pemberian gizi seimbang, ASI eksklusif, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang harus menjadi prioritas. Upaya pencegahan stunting juga tidak hanya berkaitan dengan tinggi badan, tetapi juga dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas ekonomi di masa depan. Dengan memperkuat dimensi fisik masyarakat melalui gizi, sanitasi, layanan kesehatan, dan program promotif-preventif, beban penyakit dapat ditekan, produktivitas populasi meningkat, serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik.<sup>3</sup>

#### B. Kesehatan Mental

---

<sup>2</sup> Atik Pramesti W et al., "Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Stikes Pemkab Jombang Vol.2022

<sup>3</sup> Ghelifa Khoirunnisa Yusrani et al., "Tinjauan Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia: Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals Dan Universal Health Coverage," *Jurnal Medika Nusantara* 1, no. 2 (2023): 89–107.

Dimensi mental dalam masyarakat sehat mencakup kesejahteraan psikologis yang ditandai dengan kestabilan emosi, kemampuan berpikir jernih, serta rendahnya beban gangguan mental yang dapat mengganggu fungsi sosial maupun produktivitas individu. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan sosial yang positif, serta berkontribusi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, berbagai kebijakan nasional dan kajian akademis menekankan pentingnya integrasi layanan kesehatan jiwa ke dalam layanan kesehatan primer agar akses masyarakat terhadap dukungan psikologis lebih mudah dan merata. Selain itu, program promotif seperti peningkatan literasi kesehatan mental, deteksi dini gangguan psikologis, serta penyediaan layanan rujukan yang tepat menjadi langkah strategis untuk mencegah masalah mental berkembang menjadi lebih serius. Apabila masalah kesehatan mental tidak tertangani secara luas, dampaknya dapat menurunkan kualitas hidup, menghambat produktivitas, dan bahkan memperburuk beban sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perhatian terhadap dimensi mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, karena keduanya saling berkaitan dalam membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.<sup>4</sup>

### C. Dimensi Sosial

Dimensi sosial menunjukkan bahwa masyarakat sehat adalah komunitas dengan kohesi sosial tinggi, akses setara terhadap pendidikan dan layanan, sistem sosial yang adil, serta budaya saling membantu (mis. gotong royong) yang memperkuat dukungan sosial saat krisis kesehatan. Kebijakan publik dan program pemberdayaan komunitas termasuk sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta intervensi berbasis komunitas pada masa pandemic menunjukkan bahwa determinan sosial (kemiskinan, pendidikan, infrastruktur) sangat menentukan seberapa efektif masyarakat mencapai kesejahteraan kolektif.<sup>5</sup>

- Kohesi Sosial Tinggi

Masyarakat sehat ditandai dengan adanya rasa kebersamaan, solidaritas, dan kepercayaan antarwarga. Kohesi sosial memperkuat kemampuan komunitas menghadapi tantangan bersama, termasuk krisis kesehatan.

- Akses Setara terhadap Pendidikan dan Layanan

---

<sup>4</sup> Yusrani et al.

<sup>5</sup> RISKESDAS, "Survei Kesehatan Indonesia 2023 (SKI)," *Kemenkes*, 2023, 235.



Kesetaraan dalam memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan menjadi fondasi penting. Ketidaksetaraan akses dapat memperlebar jurang kesehatan antar kelompok sosial.

- Sistem Sosial yang Adil  
Struktur sosial yang menjamin keadilan, baik dalam distribusi sumber daya maupun kesempatan, mendukung terciptanya kesejahteraan kolektif.
- Budaya Saling Membantu (Gotong Royong)  
Tradisi gotong royong memperkuat dukungan sosial, terutama saat terjadi krisis kesehatan. Nilai ini menjadi modal sosial yang khas di Indonesia.
- Peran Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Komunitas
  - Program sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.
  - Intervensi berbasis komunitas pada masa pandemi menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga sangat menentukan keberhasilan penanggulangan krisis.<sup>6</sup>

Determinasi Sosial Kesehatan Faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur terbukti memengaruhi efektivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan kolektif. Semakin baik kondisi sosial, semakin tinggi pula kapasitas komunitas untuk bertahan dan berkembang.<sup>7</sup>

#### D. Dimensi Spiritual

- Makna Hidup dan Tujuan Eksistensi  
Dimensi spiritual membantu individu menemukan makna dan tujuan hidup, yang menjadi sumber motivasi dalam menghadapi tantangan kesehatan. Rasa memiliki tujuan hidup terbukti meningkatkan ketahanan psikologis dan memperkuat semangat untuk menjalani pengobatan maupun perawatan jangka panjang.
- Keterhubungan dengan Nilai Moral dan Nilai Hidup  
Spiritualitas mencakup keterikatan dengan nilai-nilai moral, etika, dan keyakinan yang dianut. Nilai ini berfungsi sebagai kompas dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perilaku hidup sehat, kepatuhan terhadap terapi, serta interaksi sosial yang lebih harmonis.

---

<sup>6</sup> Helen Pakpahan<sup>1\*</sup> Aries Wahyuningsih<sup>1</sup>, Corlida Priska Kunti Daynata<sup>1</sup>, "Literature Review : Public Health Policy Concerning Phbs Is," : : *Jurnal Administrasi RS Indonesia Vol*, no. 1 (2024): 83–91.

<sup>7</sup> Michelle Amri et al., "Health Promotion, the Social Determinants of Health, and Urban Health:" *BMC Global and Public Health* 1, no. 1 (2023).

- **Praktik Spiritual sebagai Mekanisme Coping**

Aktivitas spiritual seperti doa, meditasi, refleksi diri, atau ibadah rutin dapat menjadi strategi coping yang efektif. Praktik ini membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, sekaligus meningkatkan rasa damai batin. Pada pasien penyakit kronis, praktik spiritual terbukti memperkuat daya tahan mental dan kualitas hidup.<sup>8</sup>

- **Kualitas Hidup Fisik dan Psikologis**

Penelitian lokal di Indonesia menunjukkan adanya korelasi positif antara spiritual wellbeing dengan kualitas hidup fisik dan psikologis. Pasien yang memiliki kesejahteraan spiritual lebih tinggi cenderung melaporkan kondisi fisik yang lebih baik, tingkat kecemasan yang lebih rendah, serta kepuasan hidup yang lebih tinggi.

- **Faktor Protektif dalam Kesehatan Masyarakat**

Dimensi spiritual berperan sebagai faktor protektif penting dalam kerangka kesehatan holistik. Ia melengkapi dimensi biologis, psikologis, dan sosial dengan memberikan dukungan batiniah yang memperkuat daya tahan masyarakat terhadap krisis kesehatan, termasuk pandemik.

- **Implikasi Kebijakan dan Program Kesehatan**

- Integrasi aspek spiritual dalam layanan kesehatan (misalnya konseling spiritual atau dukungan rohani di rumah sakit) dapat meningkatkan efektivitas perawatan.
- Program kesehatan masyarakat yang mengakui peran spiritualitas mampu memperkuat kohesi sosial dan solidaritas komunitas.
- Pendekatan ini sejalan dengan konsep kesehatan holistik, yang menempatkan manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosio-spiritual.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Suhendra Agung Wibowo, "Spiritual Well Being Dengan Kualitas Hidup Pasien Tuberkulosis Paru Spiritual Well Being With Life Quality of Lung Tuberculosis Patient" 07 (2022): 1–7.

<sup>9</sup> Mala Amalia, Alvian Pristy Windiramadhan, Ridho Kunto Prabowo, "*Hubungan Kesejahteraan Spiritual Dengan Kualitas Hidup*", STIKes Indramayu , Jawa Barat , Indonesia. *Gagal Ginjak Kronik ( GGK )* 12 (n.d.): 12–37.

## **2. Ciri-ciri Masyarakat Berkaraktern: Beretika, Bertanggung Jawab, dan Berkeadaban**

### **A. Ciri Masyarakat Berkarakter dan Beretika**

Masyarakat yang berkarakter dan beretika adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Kejujuran tidak hanya dimaknai sebagai berkata benar, tetapi juga sebagai konsistensi antara nilai yang diyakini dengan tindakan nyata sehari-hari. Integritas menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan sosial, karena ketika individu bertindak sesuai prinsip moral, interaksi sosial berlangsung lebih sehat, stabil, dan penuh rasa aman. Etika yang dijalankan secara kolektif memperkuat kohesi sosial, menciptakan lingkungan yang harmonis, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Dalam konteks bangsa Indonesia, Pancasila berperan sebagai landasan etika yang menuntun masyarakat untuk tetap berkarakter, baik dalam kehidupan nyata maupun di ruang digital. Nilai kejujuran dan integritas yang diinternalisasi melalui Pancasila menjadi pedoman moral agar warga mampu bersikap bijak, tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan plagiarisme, serta menjaga perilaku bertanggung jawab di era teknologi informasi. Dengan demikian, masyarakat berkarakter dan beretika bukan hanya membangun kualitas interaksi sosial yang sehat, tetapi juga memperkuat fondasi bangsa dalam menghadapi tantangan global dan era digital yang semakin kompleks.<sup>10</sup>

### **B. Ciri Masyarakat Bertanggung Jawab**

Selain kejujuran, tanggung jawab merupakan karakteristik utama yang menandai masyarakat beretika. Tanggung jawab dalam konteks sosial tidak hanya berarti kesediaan seseorang untuk mengakui tindakannya, tetapi juga kesiapan untuk memikul konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, baik dalam lingkup keluarga, komunitas, maupun negara. Individu yang bertanggung jawab tidak mencari jalan untuk menghindar, melainkan menghadapi konsekuensi tersebut demi kebaikan bersama. Sikap ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang stabil, karena setiap anggota komunitas menyadari perannya dalam menjaga harmoni sosial. Pendidikan karakter melalui Pancasila

---

<sup>10</sup> Kamaria Ulpah et al., "Pancasila Sebagai Sistem Etika," *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 7–10,.

dan mata pelajaran kewarganegaraan menjadi strategi utama dalam menanamkan nilai tanggung jawab sejak dini. Pancasila, sebagai dasar negara sekaligus pedoman moral, mengajarkan bahwa tanggung jawab bukan hanya kewajiban personal, tetapi juga bagian dari komitmen kolektif untuk menjaga persatuan dan keadilan. Dalam era digital dan modernisasi, nilai tanggung jawab semakin relevan karena masyarakat dihadapkan pada tantangan baru seperti penyalahgunaan teknologi, penyebaran informasi palsu, dan degradasi moral akibat arus globalisasi. Penelitian dan kajian strategis pendidikan karakter menegaskan bahwa etika harus menjadi landasan utama dalam membentuk moral generasi muda, agar mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Dengan demikian, tanggung jawab menjadi nilai yang mengikat individu dan masyarakat dalam satu kesatuan etis, yang mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri.<sup>11</sup>

### C. Ciri Masyarakat Berkeadaban

Masyarakat yang berkeadaban adalah masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif bahwa kebaikan bersama harus ditempatkan di atas kepentingan individu semata. Kesadaran ini melahirkan perilaku etis, di mana setiap orang memahami bahwa tanggung jawab personal berkontribusi langsung pada terciptanya harmoni sosial. Dalam praktiknya, masyarakat berkeadaban aktif membangun budaya gotong-royong, kerja sama, serta kepekaan terhadap isu-isu sosial yang dihadapi bersama. Nilai-nilai karakter bangsa seperti kejujuran, keadilan, dan cinta tanah air tidak berhenti sebagai konsep abstrak, melainkan diintegrasikan dalam kehidupan nyata untuk memperkuat hubungan sosial dan memperkokoh fondasi moral bangsa. Dengan demikian, pembangunan karakter bangsa tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga pada kolektivitas yang menuntun masyarakat menuju masa depan yang lebih baik.

Penelitian pengabdian masyarakat di berbagai daerah di Indonesia menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai karakter nasional dalam pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan karakter berbasis Pancasila dan kewarganegaraan menjadi strategi utama untuk menanamkan etika dan rasa tanggung jawab generasi muda. Melalui

---

<sup>11</sup> Syamsul Kurniawan, "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Pendidikan," *Prosiding EMAS : Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan* 1, no. 1 (2022): 293–302,.

program-program pengabdian masyarakat, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan cinta tanah air ditanamkan secara kontekstual, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berkeadaban bukanlah sekadar cita-cita, melainkan hasil dari proses pendidikan dan pembiasaan yang berkelanjutan, yang menjadikan etika sebagai landasan utama dalam membangun bangsa yang bermoral, berkeadilan, dan berdaya saing di era modern.<sup>12</sup>

### **Contoh Nilai Masyarakat Berkeadaban**

<b>Nilai Karakter</b>	<b>Contoh Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari</b>
Kejujuran	Tidak menyebarkan berita hoaks, berkata sesuai fakta, serta bersikap transparan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.
Tanggung Jawab	Menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, serta mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.
Keadilan	Memberikan kesempatan yang setara dalam organisasi, bersikap objektif, dan tidak diskriminatif terhadap sesama.
Gotong Royong	Membersihkan lingkungan secara bersama-sama, membantu tetangga saat terjadi musibah, serta aktif dalam kegiatan kerja bakti desa.
Cinta Tanah Air	Menggunakan dan mencintai produk lokal, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan nasional.
Kepekaan Sosial	Peduli terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, ikut serta dalam kegiatan sosial, serta mendukung program-program komunitas.

### **3. Hubungan Antara Kesehatan, Karakter, dan Kualitas Kehidupan Berbangsa**

Kesehatan dan karakter merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat dan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas kehidupan berbangsa. Kesehatan bukan hanya tentang kondisi fisik yang bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesehatan mental, emosional, dan sosial. Seseorang yang sehat, baik jasmani maupun rohani, memiliki kemampuan lebih besar untuk berpikir jernih, mengendalikan diri, dan bertindak secara etis. Dari sinilah karakter yang baik mulai bertumbuh, karena individu yang sehat memiliki kekuatan fisik dan mental untuk menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati dalam kehidupannya sehari-hari. Sebaliknya, ketika kesehatan diabaikan, seseorang lebih rentan mengalami stres, emosi tidak stabil, bahkan melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Karakter berperan penting dalam

---

<sup>12</sup> Nova Lia Anjani, Djum Djum Noor Benty, and Imam Gunawan, "Pendidikan Karakter Aspek Nilai Kejujuran Pada Satuan Pendidikan Menengah," *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan* 2, no. 4 (2022):54-367.

menjaga dan meningkatkan kesehatan. Individu yang memiliki karakter disiplin, misalnya, akan lebih teratur dalam menjaga pola makan, berolahraga, beristirahat, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, penyalahgunaan narkoba, atau kurang tidur. Karakter tanggung jawab membuat seseorang peduli bukan hanya pada kesehatannya sendiri, tetapi juga pada kesehatan orang lain, seperti menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak membahayakan orang lain melalui perilaku tidak sehat. Dengan demikian, karakter yang baik mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat secara menyeluruh.<sup>13</sup>

Kesehatan dan karakter bersama-sama mempengaruhi kualitas kehidupan berbangsa. Bangsa yang masyarakatnya sehat dan berkarakter akan memiliki sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Mereka mampu bekerja dengan optimal, berpikir kritis, serta berkontribusi positif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, masyarakat yang sehat dan beretika juga lebih menghargai hukum, menjaga persatuan, dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Semua ini menjadi indikator penting dari kehidupan berbangsa yang berkualitas dan berkeadaban. Dalam konteks kehidupan bernegara, hubungan antara kesehatan dan karakter terlihat jelas ketika masyarakat menghadapi krisis atau tantangan besar, seperti pandemi, bencana alam, atau konflik sosial.<sup>14</sup> Masyarakat yang memiliki karakter kuat seperti gotong royong, disiplin, dan kepedulian sosial akan lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Mereka bersedia saling membantu, mematuhi aturan demi keselamatan bersama, dan tidak mementingkan diri sendiri. Di sisi lain, masyarakat yang tidak sehat secara moral dan mental cenderung bersikap egois, tidak peduli, dan mudah terprovokasi, yang justru menurunkan kualitas kehidupan berbangsa.

Oleh karena itu, pembangunan bangsa tidak hanya harus berfokus pada kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga pada pembangunan kesehatan dan karakter masyarakat. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan gaya hidup sehat sejak usia dini sangat penting untuk membentuk generasi yang kuat, beretika, dan berkeadaban. Ketika

---

<sup>13</sup> Ajat Sudarjat, "Jurnal Pendidikan Karakter, Mengapa Pendidikan Karakter," *Jurnal Pendidikan Karakter* 1, no. Oktober (2011): 47–58.

<sup>14</sup> Fransiska Aprilia et al., "Pelayanan Kesehatan Berasaskan Nilai-Nilai Pancasila," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 397–402,.

kesehatan dan karakter terus dipupuk secara seimbang, kualitas kehidupan berbangsa akan meningkat, tercermin dalam kesejahteraan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan sosial.<sup>15</sup>

#### **4. Landasan Filosofis Membangun Masyarakat Sehat dan Berkarakter**

- Membangun masyarakat yang sehat dan berkarakter tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis kemanusiaan yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas sosial dan kebijakan publik. Dalam paradigma ini, manusia dipandang bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama yang memiliki hak, nilai, dan kedudukan yang harus dihormati. Oleh karena itu, setiap upaya dalam bidang kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi harus mencakup dimensi psikologis, sosial, dan moral yang melekat pada kehidupan manusia secara utuh.

Pendekatan ini menuntut agar layanan kesehatan dan kebijakan pembangunan benar-benar berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengakuan atas martabat individu, serta pencapaian kesejahteraan kolektif. Dalam konteks pelayanan kesehatan, hal ini berarti bahwa sistem kesehatan harus menjamin akses yang adil, perlakuan yang manusiawi, serta dukungan emosional dan spiritual bagi setiap pasien. Pelayanan yang berlandaskan kemanusiaan akan menciptakan hubungan yang lebih empatik antara tenaga kesehatan dan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, dan meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan. Kajian tentang etika pelayanan kesehatan di Indonesia menegaskan bahwa landasan kemanusiaan ini bukan hanya idealisme, tetapi merupakan pijakan moral yang harus diinternalisasi dalam praktik pelayanan publik. Etika profesi kesehatan, seperti prinsip beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), autonomy (menghormati pilihan pasien), dan justice (keadilan), semuanya berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang inklusif, program yang

---

<sup>15</sup> Levi Olivia, "Implementation of Pancasila Values As a Source of Ethics, Morals and Character in the Implementation of Health Services," *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 10, no. 2 (2021): 13–21,.

berpihak pada kelompok rentan, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan empa<sup>16</sup>

- Landasan kedua dalam membangun masyarakat sehat dan berkarakter adalah **landasan ideologis-nasional**, yang di Indonesia diwujudkan melalui Pancasila. Sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai fondasi filosofis yang mengikat nilai-nilai etika, solidaritas, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi arah dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Pancasila mendorong lahirnya konsep **kesehatan holistik**, yang tidak hanya menekankan aspek jasmani, tetapi juga rohani, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, pembangunan kesehatan tidak sekadar berorientasi pada penyembuhan penyakit, melainkan juga pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, karakter ditempatkan sebagai **modal sosial** yang harus ditanamkan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan karakter berbasis Pancasila menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan cinta tanah air sebagai nilai yang membentuk masyarakat beretika dan berkeadaban.

Sejumlah studi di Indonesia menegaskan bahwa Pancasila diposisikan sebagai **sumber etika** dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan karakter. Misalnya, penelitian tentang etika pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesiamenjadi pedoman moral bagi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang manusiawi, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Demikian pula dalam pendidikan, Pancasila menjadi rujukan utama dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis-nasional, pembangunan masyarakat sehat dan berkarakter di Indonesia memiliki pijakan yang kokoh, karena berakar pada nilai-nilai

---

<sup>16</sup> Anindya Dwita and Mohammad Zamroni, "Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 1, no. September (2021): 46–64.



luhur bangsa yang relevan untuk menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, dan era digital.<sup>17</sup>

- Landasan ketiga dalam membangun masyarakat sehat dan berkarakter adalah landasan pendidikan dan etika profesional. Pembentukan karakter yang sehat tidak terjadi secara instan, melainkan berakar dari proses pendidikan karakter yang sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan ini berlangsung di berbagai ruang kehidupan: sekolah sebagai lembaga formal, institusi kesehatan sebagai pusat pelayanan dan pembinaan, serta keluarga sebagai lingkungan pertama tempat nilai-nilai moral ditanamkan. Melalui pendidikan karakter, individu dibekali dengan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati. Nilai-nilai tersebut tidak hanya membentuk pribadi yang beretika, tetapi juga mendukung perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, disiplin dan tanggung jawab mendorong seseorang untuk mematuhi aturan kesehatan, menjalankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), serta menjaga kebersihan lingkungan. Empati, di sisi lain, menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain, sehingga memperkuat solidaritas sosial dalam menghadapi masalah kesehatan bersama.<sup>18</sup>

Dalam konteks profesional, etika menjadi pedoman moral bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Etika profesional menuntut agar pelayanan kesehatan diberikan dengan penuh integritas, menghormati martabat pasien, serta berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan karakter yang diterapkan pada calon tenaga kesehatan terbukti berpengaruh terhadap kualitas layanan yang mereka berikan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa urgensi pendidikan karakter pada mahasiswa kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya berkorelasi dengan meningkatnya kesadaran etis, kepatuhan terhadap standar pelayanan, dan kemampuan membangun hubungan empatik dengan pasien. Selain itu, upaya penguatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) juga memperlihatkan hubungan sebab-akibat antara pendidikan karakter dan kondisi kesehatan masyarakat. Masyarakat yang terbiasa dengan nilai disiplin dan tanggung jawab lebih konsisten dalam menerapkan PHBS, sehingga angka penyakit menular dapat ditekan dan kualitas hidup meningkat. Dengan demikian, pendidikan karakter bukan hanya

---

<sup>17</sup> Aisyah Nur Husni et al., "Pancasila as an Ethical Framework for Healthcare Delivery in Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 1–7,.

<sup>18</sup> Vini H R Gosal, Aaltje E Manampiring, and Caecilia Waha, "Professional Behavior of Medical Personnel towards Ethical Responsibility and Therapeutic Transactions in Running Clinical Privilege," *Medical Scope Journal* 4, no. 1 (2022): 1–9.

membentuk individu yang beretika, tetapi juga menjadi strategi preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat secara luas.

Kesimpulannya, landasan pendidikan dan etika profesional menegaskan bahwa pembangunan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari pembentukan karakter. Pendidikan karakter yang sistematis akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral, beretika dalam profesi, dan berkomitmen terhadap kesehatan diri serta masyarakat.<sup>19</sup>

- Landasan keempat dalam membangun masyarakat sehat dan berkarakter adalah **landasan yuridis dan kebijakan publik**. Regulasi, standar pelayanan, serta kebijakan kesehatan yang berpihak pada keadilan sosial menjadi instrumen penting untuk memperkuat implementasi nilai-nilai karakter di ranah publik. Norma hukum yang tegas dan kode etik profesi kesehatan berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus mekanisme kontrol agar pelayanan kesehatan berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab kolektif.<sup>20</sup> Dalam praktiknya, regulasi kesehatan di Indonesia menekankan akses layanan yang adil dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan bekerja sesuai kode etik profesi, sehingga martabat pasien tetap dihormati. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan sila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, yang menegaskan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kajian etika kesehatan di Indonesia menyoroti bahwa landasan yuridis bukan sekadar aturan formal, melainkan pijakan moral yang menjamin keberlangsungan sistem kesehatan. Regulasi yang berpihak pada keadilan sosial memperkuat solidaritas masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa, dan memastikan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi benar-benar inklusif. Dengan demikian, landasan yuridis dan kebijakan publik menjadi jembatan antara nilai karakter bangsa dan implementasi nyata dalam pelayanan kesehatan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> O.H Putri and N.R.N Anganthi, “Spiritual Well-Being and Death Anxiety in Chronic Diseases: A Meta-Analysis Study,” *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 2 (2023): 23–39. <sup>20</sup> Ulpah et al., “Pancasila Sebagai Sistem Etika.”

<sup>20</sup> Dicky Eko Prasetyo, “Pancasila : Jurnal Keindonesiaan,” *Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2 (2023): 1–10. <sup>22</sup> Yakobus Adi Saingo Lena Natalia, “Pentingnya Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Dan Moral Di Lembaga Pendidikan,” *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 266.

- Landasan kelima dalam membangun masyarakat sehat dan berkarakter adalah **landasan sosiokultural dan historis**. Indonesia memiliki kekayaan tradisi, norma sosial, dan praktik keagamaan yang sejak lama menjadi modal sosial dalam memperkuat karakter bangsa. Tradisi gotong-royong misalnya, telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang menekankan kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Norma sosial yang hidup di tengah masyarakat, seperti penghormatan terhadap orang tua, musyawarah untuk mufakat, serta kepatuhan terhadap aturan adat, turut membentuk perilaku kolektif yang beretika dan berkeadaban. Praktik keagamaan juga memainkan peran penting dalam membangun kesehatan kolektif, baik secara spiritual maupun sosial. Nilai-nilai religius seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama memperkuat integritas moral masyarakat. Filosofi lokal dan pemikiran klasik dapat diintegrasikan untuk memperkaya strategi pendidikan karakter. Misalnya, telaah pemikiran **Ibnu Khaldun** dalam konteks pendidikan menekankan pentingnya pembiasaan, lingkungan sosial, dan keteladanan dalam membentuk karakter manusia. Pemikiran ini relevan untuk merumuskan strategi pendidikan karakter yang kontekstual, berkelanjutan, dan sesuai dengan budaya Indonesia.<sup>22</sup>

Studi-studi terbaru tentang **pendidikan berbasis budaya positif** dan **penginternalisasian nilai** mendukung pendekatan ini. Pendidikan yang berakar pada budaya lokal terbukti lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter, karena peserta didik merasa dekat dengan konteks sosialnya. Dengan demikian, landasan sosiokultural dan historis menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang sehat secara holistik, berkarakter kuat, dan berkeadaban tinggi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Putri and Anganthi, "Spiritual Well-Being and Death Anxiety in Chronic Diseases: A Meta-Analysis Study."

## BAB II

### Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Bangsa



Pembangunan bangsa Indonesia tidak hanya bertujuan menciptakan kemakmuran ekonomi atau kemajuan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian, berakhlak, dan berjiwa kebangsaan. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn bukan sekadar mata pelajaran yang membahas pemerintahan dan hukum, melainkan wahana pendidikan nilai, moral, dan kebangsaan. Melalui PKn, peserta didik diajak memahami makna menjadi warga negara yang baik yaitu warga negara yang cerdas, sehat, berkarakter, dan bertanggung jawab terhadap diri, masyarakat, dan negara.<sup>22</sup>

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menumbuhkan “cipta, rasa, dan karsa” secara seimbang agar manusia berkembang menjadi pribadi yang utuh. Dalam konteks ini, PKn berperan menumbuhkan kesadaran rasional (cipta), kepekaan moral (rasa), dan kemauan untuk berbuat baik bagi sesama (karsa). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis sebagai sarana membangun masyarakat sehat dan berkarakter, sekaligus memperkuat jati diri bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang pesat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Annisa Dwi Hamdani and Dinnie Anggraeni Dewi, “Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kehidupan Bersosialisasi Dan Membangun Karakter Bangsa Pada Siswa Sekolah Dasar,” *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 13, no. 1 (2021): 105–13.

<sup>23</sup> Alfiyatu Mahdiah, Chandy Satrio Sudirman, and Dhea Ananda Widiyani, “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Di Era Modern,” *Indigenous Knowledge* 2, no. 3 (2023): 254–58.

P

**1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)** untuk membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas, pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan proses pendidikan yang dirancang berkarakter, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PKn tidak hanya mengajarkan teori tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika sosial, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dalam konteks pendidikan nasional, PKn memiliki landasan filosofis yang kuat karena bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik diharapkan memahami konsep kebangsaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman.<sup>24</sup>

Secara konseptual, PKn juga dimaknai sebagai wahana pembinaan moral bangsa. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diarahkan untuk tidak hanya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PKn menjadi instrumen penting dalam membangun identitas nasional. Di tengah pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan budaya asing, PKn berperan sebagai benteng moral bangsa agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Pendidikan kewarganegaraan dengan demikian tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga mentransformasi nilai-nilai luhur bangsa kepada generasi muda.

### A. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan



<sup>24</sup> Anna Maudina Manurung et al., "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Landasan Karakter Bangsa," *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang* 5, no. Desember (2023): 174–90.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada hakikatnya adalah membentuk warga negara yang baik (good and smart citizen) yaitu individu yang memahami hak dan kewajiban, memiliki moralitas tinggi, berpikir kritis, serta aktif dalam kehidupan sosial dan politik secara bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya mengajarkan pengetahuan kenegaraan semata, melainkan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang menjadi dasar karakter bangsa. Ketiga kompetensi ini menjadi dasar bagi terbentuknya warga negara yang cerdas, sehat, dan bermoral.<sup>25</sup>

Tujuan PKn mencakup tiga dimensi besar, yaitu:

1. Tujuan Kognitif Penguasaan Pengetahuan Kewarganegaraan

Secara kognitif, PKn bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem pemerintahan, hukum, dan politik yang berlaku di Indonesia. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memahami konsep dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Pengetahuan kewarganegaraan tidak hanya bersifat hafalan, tetapi diarahkan untuk membentuk kesadaran intelektual tentang makna kebangsaan, hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Warga negara yang memiliki pemahaman tinggi terhadap sistem kenegaraan akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.<sup>26</sup>

2. Tujuan Afektif Pembentukan Sikap dan Nilai Moral Kewarganegaraan

PKn memiliki dimensi afektif yang kuat, yaitu membentuk sikap positif terhadap bangsa, negara, dan sesama warga negara. Tujuan ini meliputi penanaman nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan rasa cinta tanah air.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Yoga Ardian Feriandi and Yuni Harmawati, "Analisis Penguasaan Kompetensi Kewarganegaraan Pada Mahasiswa PPKn Universitas PGRI Madiun," *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2018): 76.

<sup>26</sup> Aprillio Poppy Belladonna and Selly Novia Anggraena, "Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2019): 196.

<sup>27</sup> Devi Fitria, Ujang Jamaludin, and Febrian Alwan Bahrudin, "Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sebagai Sikap Nilai-Nilai Anti Korupsi," *Jurnal Genta Mulia* 14, no. 2 (2023): 13–22.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diharapkan memiliki kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Mereka tidak hanya menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum, tetapi juga memiliki empati dan solidaritas sosial terhadap sesama. Nilai-nilai afektif dalam PKn menjadi jembatan antara teori kewarganegaraan dengan pembentukan karakter moral. PKn menjadi ruang pembelajaran sosial-emosional yang membentuk kesadaran etis dan kepedulian sosial warga negara.

3. Tujuan Sosial dan Moral Membangun Warga Negara yang Bermoral dan Sehat Sosial Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sosial dan moral masyarakat. Warga negara yang baik adalah mereka yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara rohani dan jasmani, serta memiliki moralitas tinggi dalam menjalankan kehidupan sosial.<sup>28</sup>

Dengan demikian, PKn tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan politik atau kenegaraan, tetapi juga sebagai pendidikan moral bangsa yang bertujuan mencetak warga negara yang berkarakter dan berintegritas tinggi.

## **2. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Pembentuk Warga Negara Yang Cerdas, Sehat dan Bermoral**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia telah lama diakui sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan nasional untuk mencetak warga negara yang mempunyai kompetensi kewargaan. Kerangka regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan berfungsi “mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat” sehingga PKn bukan hanya soal pengetahuan civics tetapi juga soal karakter dan nilai.<sup>29</sup>

Di era globalisasi, perubahan sosial, teknologi informasi, dan pluralitas yang tinggi menuntut warga negara yang tidak hanya kompeten secara intelektual tetapi juga sehat dalam jiwa dan tubuh serta bermoral dalam bertindak sosial. Di sinilah fungsi PKn sebagai pendidikan nilai dan partisipasi kritik menjadi sangat penting. Beberapa studi mengindikasikan bahwa pendidikan

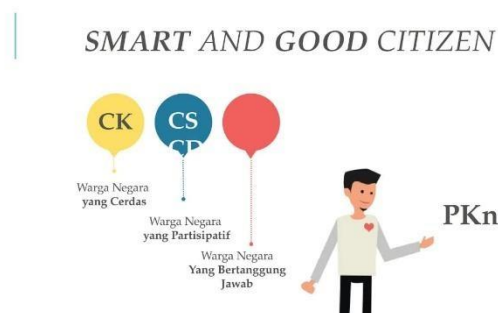
---

<sup>28</sup> Patricia Bunga Juwita Galand and Dini Anggraeni Dewi, “Pendidikan Hukum Dan Pendidikan Nilai Dalam Mewujudkan Warga Negara Yang Baik Dan Cerdas Melalui Pendidikan Kewarganegaraan,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 3, no. 2 (2021): 9–19.

<sup>29</sup> Suradi L, “Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Warga Negara Yang Cerdas Dan Baik (Smart and Good Citizen),” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XIV, no. 2 (2019): 112–20.

kewarganegaraan di Indonesia perlu bergerak ke arah yang lebih transformasional dan kontekstual untuk menghadapi keragaman dan dinamika sosial.

#### ○ Fungsi PKn dalam Pembentukan Warga Negara yang Cerdas



Kecerdasan yang dimaksud dalam PKn meliputi bukan hanya kecerdasan rasional/akademik, tetapi juga kecerdasan sosial, emosional, dan kewargaan yaitu kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, dan

bertindak

sebagai anggota masyarakat yang aktif. Kecerdasan intelektual warga negara diperoleh melalui pembelajaran PKn yang berbasis pada penalaran kritis terhadap fenomena sosialpolitik. Melalui kajian tentang konstitusi, demokrasi, dan HAM, peserta didik diajak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu kebangsaan. Kecerdasan sosial dan emosional tumbuh melalui praktik nilai-nilai gotong royong, empati, dan toleransi yang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran PKn di sekolah. Dengan demikian, kecerdasan warga negara bukan hanya produk dari pengetahuan, tetapi juga dari pengalaman sosial dan pembiasaan moral. Kecerdasan warga negara memungkinkan masyarakat untuk menyaring informasi, memahami sistem kenegaraan, mengkritisi kebijakan publik, dan ikut serta dalam kehidupan demokrasi secara aktif. Dengan demikian, fungsi PKn sebagai pembentuk warga negara cerdas menjadi penting bukan hanya tahu, tetapi mampu berpikir, menganalisis, dan bertindak secara bertanggung jawab.<sup>30</sup>

#### ○ Fungsi PKn dalam Pembentukan Warga Negara yang Sehat

<sup>30</sup> Mahdiyah, Sudirman, and Widiyanti, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Di Era Modern."

<sup>10</sup> Natasya Febrianti and Dinie Anggraenie Dewi, "Pengembangan Nilai Moral," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): :2.





Kesehatan dalam perspektif kewarganegaraan tidak hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan beradaptasi, berempati, dan menjaga keseimbangan hidup. PKn dapat menjadi sarana edukasi untuk menanamkan nilai-nilai seperti disiplin diri, kontrol sosial, dan gaya hidup positif yang mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat. Sekolah yang mengintegrasikan PKn dengan program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) serta kegiatan sosial lingkungan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan publik.<sup>10</sup>

#### ○ Fungsi PKn dalam Pembentukan Warga Negara yang Bermoral



Moralitas adalah inti dari pendidikan kewarganegaraan karena nilai-nilai etika, norma sosial, kemanusiaan, dan kebangsaan sangat melekat dalam PKn. PKn berfungsi sebagai sarana pembentukan good citizen warga negara yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga memiliki sikap moral tinggi jujur, adil, peduli, bertanggung jawab. Moralitas merupakan inti dari keberhasilan pendidikan kewarganegaraan. Warga negara yang bermoral ditandai oleh perilaku yang menghargai norma hukum, etika sosial, serta menjunjung tinggi martabat manusia. PKn berperan menumbuhkan kesadaran moral melalui pembelajaran reflektif, diskusi etika, dan simulasi kehidupan demokratis. Dalam konteks masyarakat modern yang diwarnai kemajuan teknologi dan globalisasi, peran PKn dalam menjaga moralitas menjadi semakin penting untuk mencegah degradasi moral di kalangan generasi muda.<sup>31</sup>

Ketiga fungsi tersebut pembentukan kecerdasan, kesehatan, dan moralitas merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Warga negara yang cerdas tetapi tidak bermoral dapat menyalahgunakan kecerdasannya sementara warga yang bermoral tetapi tidak sehat atau tidak

<sup>31</sup> Dwi Wulandari, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Awal Pembentuk Moral Bangsa Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7125–29.

berpengetahuan akan sulit berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan bangsa. Oleh karena itu, PKn berperan strategis dalam membangun keseimbangan antara kecerdasan, kesehatan, dan moralitas.

### **3. Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Nasionalisme, Demokrasi, Tanggung Jawab, Toleransi**

#### **1. Nilai Nasionalisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan**

Nasionalisme merupakan nilai fundamental dalam PKn yang menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesetiaan terhadap bangsa, dan kebanggaan terhadap identitas nasional. Nilai ini mengandung semangat untuk mempertahankan kedaulatan, menghormati simbol negara, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana untuk menanamkan nilai nasionalisme yang inklusif, yaitu kecintaan terhadap tanah air yang tidak bersifat sempit atau menolak perbedaan, melainkan menghargai keberagaman dalam kerangka persatuan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa nilai nasionalisme harus dipahami sebagai semangat kebangsaan yang menghormati pluralitas dan memperkuat integrasi nasional.<sup>32</sup>

#### **2. Nilai Demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan**

Demokrasi merupakan nilai yang mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran besar dalam menanamkan prinsip-prinsip demokrasi yang substansial kepada peserta didik. Pendidikan demokrasi dalam PKn juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan kehidupan publik. Warga negara yang demokratis harus memiliki kesadaran politik, tanggung jawab moral, dan kemampuan berpartisipasi secara rasional dalam masyarakat. Pendidikan ini menanamkan prinsip bahwa kedaulatan rakyat hanya dapat berjalan jika disertai tanggung jawab moral dan hukum.<sup>33</sup>

#### **3. Nilai Tanggung Jawab dalam Pendidikan Kewarganegaraan**

---

<sup>32</sup> Titin Sunaryati et al., "Meningkatkan Rasa Nasionalisme Melalui Pembelajaran PPKN Di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 25 (2023): 1–23.

<sup>33</sup> Harry Sugara, "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara," *Jurnal Koulutus* 5, no. 1 (2022): 103–16.

Tanggung jawab merupakan nilai yang berhubungan dengan kesadaran akan kewajiban moral dan sosial warga negara terhadap bangsa dan negara. Dalam konteks PKn, nilai ini menjadi penghubung antara hak individu dengan kewajiban terhadap masyarakat. Nilai tanggung jawab diajarkan melalui pemahaman bahwa setiap hak yang diperoleh harus diimbangi dengan kewajiban terhadap sesama dan negara. Tanggung jawab dalam PKn mencakup aspek etika, sosial, dan lingkungan. Peserta didik diajak untuk bertindak berdasarkan nilai moral, menjaga ketertiban, menaati hukum, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Pendidikan tanggung jawab ini juga berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pembangunan bangsa tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga kewajiban setiap warga negara.<sup>34</sup>

#### 4. Nilai Toleransi dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Toleransi merupakan nilai yang sangat penting dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Dalam konteks PKn, toleransi berarti menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan pandangan hidup. PKn berperan penting dalam menanamkan sikap inklusif, menghormati keragaman, dan menolak segala bentuk diskriminasi. PKn berperan penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Toleransi yang ditanamkan sejak dini dapat mencegah konflik sosial dan memperkuat kohesi nasional di tengah keberagaman.<sup>35</sup>

Empat nilai utama dalam PKn nasionalisme, demokrasi, tanggung jawab, dan toleransi saling melengkapi dalam membentuk karakter warga negara. Keempatnya merupakan fondasi moral bagi terciptanya kehidupan berbangsa yang harmonis dan beradab. Pendidikan kewarganegaraan yang ideal harus mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam seluruh proses pembelajaran. Nasionalisme menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa. Demokrasi membentuk kemampuan berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Tanggung jawab melatih kesadaran moral dan sosial untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan toleransi menumbuhkan sikap saling menghormati dalam keberagaman.

---

<sup>34</sup> Iqlima Firdaus et al., "Esensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nilai-Nilai Toleransi Di Berbagai Perspektif Terhadap Ma'had Al-Zaytun," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2023): 2–9.

<sup>35</sup> Humam Alwi Ahmad and Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Sikap Toleransi Beragama Pada Mahasiswa," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2023): 56–65.

#### **4. Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pembentukan Masyarakat yang Berkarakter**

Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun masyarakat berkarakter dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi penting berikut:

1. Sebagai Sarana Pendidikan Nilai

PKn berfungsi sebagai media utama dalam menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan kepada peserta didik. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diajak untuk memahami makna kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan empati sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dikembangkan melalui pengalaman belajar yang kontekstual seperti diskusi, studi kasus, dan kegiatan sosial di masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam hal ini, PKn menjadi sarana efektif untuk membentuk kepribadian warga negara yang berkarakter kuat serta memiliki integritas moral dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai wadah pembentukan nilai-nilai moral bangsa yang menjadi fondasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang harmonis.

2. Sebagai Instrumen Penguatan Karakter Nasional

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, generasi muda dihadapkan pada berbagai tantangan moral dan sosial, seperti menurunnya rasa nasionalisme, meningkatnya individualisme, serta melemahnya nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Dalam kondisi ini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki relevansi yang besar untuk memperkuat karakter nasional agar peserta didik tidak tergerus oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>37</sup>

PKn mendorong tumbuhnya identitas nasional yang kuat melalui pemahaman terhadap nilai dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam

---

<sup>36</sup> Hendrikus Otniel Nasozaro, "Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Warta Edisi* : 62 5, no. 87 (2019): 24–33.

<sup>37</sup> KHANZA JASMINE, "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

kehidupan demokrasi. Dengan demikian, PKn berfungsi sebagai benteng moral yang menjaga keutuhan jati diri bangsa dan memperkuat semangat kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi.

### 3. Sebagai Penunjang Kesehatan Sosial dan Moral

Salah satu bentuk relevansi PKn yang penting adalah dalam membangun masyarakat yang sehat secara sosial dan moral. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diajarkan untuk memahami keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta pentingnya menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>38</sup>

PKn menanamkan nilai-nilai seperti solidaritas, toleransi, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama, yang semuanya merupakan fondasi dari masyarakat yang sehat dan beradab. Warga negara yang memiliki kesadaran moral dan sosial akan cenderung menjauhi perilaku yang merugikan orang lain, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang damai, saling menghormati, dan berkeadilan. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk moralitas publik dan etika sosial yang sehat melalui internalisasi nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.

### 4. Sebagai Dasar Pembangunan Bangsa

Pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas moral dan karakter sumber daya manusianya. Dalam konteks ini, PKn berperan sebagai dasar ideologis dan moral bagi pembangunan bangsa. Melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, serta tanggung jawab terhadap bangsa, PKn menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dilandasi oleh moralitas dan etika kebangsaan.<sup>39</sup>

Warga negara yang berkarakter kuat akan menjadi modal sosial yang mampu memperkuat stabilitas politik, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Pembentukan karakter melalui PKn merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan berdaya saing tinggi di kancah global.

### 5. Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Kewarganegaraan

---

<sup>38</sup> Desnita Fitriani and Dinie Anggraenie Dewi, "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pengimplementasian Pendidikan Karakter," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 489–99.

<sup>39</sup> Riska Putri Taupik and Yanti Fitriani, "Jurnal Basicedu. Jurnal Basicedu," *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (2021): 1525–31.

Relevansi lain dari PKn adalah perannya dalam menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan (civic awareness). Melalui pendidikan ini, individu diajarkan untuk menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, memiliki rasa tanggung jawab sosial, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.<sup>40</sup>

PKn juga mendorong lahirnya warga negara yang peka terhadap persoalan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Kesadaran ini membuat masyarakat tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, warga negara yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan kesehatan sosial akan lebih berperan dalam menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa.

Secara keseluruhan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki relevansi yang sangat besar dalam membentuk masyarakat yang berkarakter, bermoral, dan sehat sosial. Melalui pendidikan nilai, penguatan karakter nasional, dan peningkatan kesadaran kewarganegaraan, PKn berkontribusi langsung terhadap terwujudnya bangsa yang berdaya, berintegritas, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu, PKn tidak hanya menjadi instrumen pendidikan formal, tetapi juga strategi nasional dalam membangun peradaban bangsa yang berkeadaban dan beretika.

---

<sup>40</sup> Mela Anggriani Dewi Resika Wati, "Membangun Karakter Bangsa : Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Generasi Berkualitas Abstrak Pendahuluan Pendidikan Kewarganegaraan Memiliki Peran Krusial Dalam Membangun Karakter Bangsa , Di Tengah Perubahan Secara Berkelanjutan Dan Mampu," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 2 (2024): 86–95.

## BAB 3

### Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pembentukan Karakter



Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk suatu individu yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Melalui PKn, individu tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan memiliki peran yang strategis dalam membentuk generasi bangsa yang memiliki kesadaran dalam bernegara dan berbangsa. Pkn bukan hanya mempelajari tentang teori, tetapi juga melakukan penerapan dalam proses pembentukan karakter dan moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk, menumbuhkan, menanamkan, dan menerapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa, seperti demokrasi, toleransi, tanggung jawab, dan gotong royong.

#### A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, semuanya diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam

mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.<sup>41</sup> Menurut Winaputra (2001) menyatakan, bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran untuk membentuk warga negara yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab.<sup>42</sup> Menurut Depdiknas (2006) menjelaskan bahwa Pkn mencakup pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan warga negara agar berperan aktif dalam kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila UUD 1945.<sup>43</sup>

## **B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang strategis dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui PKn, tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai moral, etika, serta semangat nasionalisme yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Membentuk warga negara yang baik, cerdas, bekerja sama, dan bertanggung jawab. PKn bertujuan agar para masyarakat dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai dan pedoman yang ada, sehingga terwujud warga negara yang baik dan cerdas.<sup>44</sup>
2. Menumbuhkan jiwa karakter bangsa dan nilai moral setiap warga negara. PKn juga berupaya mewujudkan warga negara yang tegas, handal dalam menjaga negara kesatuan dan memajukan jiwa karakter bangsa pada setiap individu.<sup>45</sup> PKn memiliki peran sebagai alat dalam mengantisipasi krisis pada karakter dan membentuk jiwa karakter demokratis.<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup> Sri Suning Kusumawardani, dkk, Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, 2024), hlm. 15

<sup>42</sup> Winaputra, U. S, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2006)

<sup>43</sup> Depdiknas, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006)

<sup>44</sup> Erisa, Erisa, *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai*, (Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, 2022)

<sup>45</sup> Gustiani, E., dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai dan Pendidikan Hukum dalam Mewujudkan Warga Negara yang Cerdas dan Baik*, (Jurnal Anfa)

<sup>46</sup> Widiatamaka, P, *Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Warga Negara yang Baik dan Mengantisipasi Krisis Karakter Pemuda*, (Pontianak: IAIN Pontianak, 2023)



3. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mempersiapkan warga negara yang mampu menghadapi tantangan globalisasi serta berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*). Melalui PKn, generasi muda diarahkan untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan logis dalam menyikapi berbagai isu, baik nasional maupun internasional, dengan tetap mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi.
4. Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan dalam mengembangkan partisipasi demokratis warga negara. PKn menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekaligus menumbuhkan jati diri, sikap moral, serta kesadaran warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

### **C. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)**

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi sebagai sarana pembinaan moral dan karakter bangsa. PKn juga berperan dalam meningkatkan pemahaman para masyarakat khususnya peserta didik terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, memperkuat kesadaran hukum, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

1. Membina dan memperkuat karakter bangsa serta nilai moral setiap individu warga negara. PKn berfungsi sebagai sarana pendidikan pada nilai moral, etika, toleransi, tanggung jawab sosial, dan kesadaran berbangsa. Hal ini menegaskan bahwa PKn tidak hanya mengajar tentang teoritis, tetapi juga secara internalisasi nilai-nilai kebangsaan.<sup>47</sup>
2. Mendorong partisipasi aktif setiap warga negara dan pembentukan budaya demokrasi. PKn memiliki fungsi untuk memfasilitasi setiap warga negara menjadi pelaku yang aktif dalam kehidupan demokratis baik melalui pemahaman mekanisme partisipasi, pengambilan keputusan, dan sikap demokratis dalam berinteraksi sosial.<sup>48</sup>
3. Sebagai sarana pendidikan hukum dan penguatan ketaatan terhadap aturan negara. PKn berperan sebagai pendidikan hukum dan menanamkan kesadaran dalam hak dan

---

<sup>47</sup> Parawangsa, E., dkk, *Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*, (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021)

<sup>48</sup> Esti Mei Yahzinka, *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan politik*, (Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, 2019)

kewajiban, norma serta regulasi negara agar masyarakat memahami konsekuensi sosial dan hukum dalam kehidupan bernegara.<sup>49</sup>

4. Mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan untuk menumbuhkan rasa pemahaman pengetahuan tentang hak, kewajiban, mekanisme negara, demokrasi, dan partisipasi warga negara agar mampu berpikir secara kritis, rasional dan bertindak secara tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>50</sup>

#### **D. Pengertian Pembentukan karakter**

Karakter secara umum dapat dimaknai sebagai keseluruhan sifat, watak atau kepribadian seseorang yang membedakan dirinya dari orang lain. Perilaku dan berpikir dengan karakteristik individu yang terbentuk dari hasil internalisasi sebagai kebiasaan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap dan bertindak. Karakter dapat dikaitkan dengan moralitas, kejujuran, tanggung jawab, sikap, motivasi dan suatu tindakan yang menjadi identitas individu. Dengan demikian, karakter bukan hanya tentang satu aspek tunggal tetapi dari setiap gabungan perilaku, nilai, sikap, kebiasaan yang terinternalisasi dalam diri para individu.

- Karakter sebagai pendidikan nilai: adalah rangkaian nilai-nilai yang ditanamkan pada setiap individu agar memiliki kebiasaan baik, bukan sekedar memahami benar dan salah.<sup>51</sup>
- Karakter dalam perspektif perkembangan moral, kognitif, sosial: Karakter terbentuk melalui tahapan perkembangan moral, kognitif (pemahaman), dan

sosial (interaksi dengan lingkungan) yang berkontribusi pada watak dan perilaku individu.

- Karakter dalam konteks pendidikan: sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang bertujuan untuk

---

<sup>49</sup> Galand, P. B, dkk, Pendidikan Hukum dan Pendidikan Nilai dalam Mewujudkan Warga Negara yang Baik dan Cerdas Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, (Cibiru, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021)

<sup>50</sup> Abdul Karim Koirul Huda, Menjadikan Pancasila dan UUD Sebagai Landasan Filosofis Pengembangan Kurikulum di Indonesia, (Yogyakarta: PAI FITK UIN Sunan Kalijaga, 2021)

<sup>51</sup> Ni'matul Sholikhah, Revitalisasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Lokal, (Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, 2023)

mengembangkan kemampuan dalam membedakan baik dan buruk, memelihara yang baik dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>52</sup>

### **E. Nilai-nilai Moral dalam Pembentukan Karakter**

Nilai moral adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, toleransi, empati, rasa keadilan, kerja keras, dan peduli sosial.

Adapun nilai-nilai moral dalam pembentukan karakter sebagai berikut:

1. Pentingnya penanaman nilai-nilai karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi dan kerja sama sangat penting untuk membentuk individu yang tidak hanya unggul dalam akademik tetapi juga bermoral dan berintegritas.<sup>53</sup>
2. Pendidikan karakter mempunyai peran besar dalam pembentukan moral pada anak, dan nilai moral seperti tanggung jawab, kepedulian, kejujuran, dan sopan santun menjadi fondasi utama individu.<sup>54</sup>
3. Tujuan utama pendidikan karakter adalah menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa empati yang harus dimiliki setiap warga negara.<sup>55</sup>

Karakter dapat dilihat sebagai hasil internalisasi nilai moral ke dalam diri individu, sehingga muncul perilaku, sifat, watak, kebiasaan yang konsisten dalam tindakan sehari-hari. Pendidikan yang efektif harus menanamkan nilai-nilai moral secara sistematis agar karakter positif terbentuk, bukan hanya pengajaran dari sistem teoritis. Pada proses pembentukan karakter mencakup aspek pengetahuan (mengerti nilai), sikap (merasa bahwa nilai itu penting), dan perilaku (psikomotorik) dalam konteks sosial dan kognitif yang tepat.

### **F. Prinsip Dasar Pembentukan Karakter**

Berdasarkan kajian literatur, pembentukan karakter memiliki beberapa prinsip dasar yang sering disebut dalam penelitian terkini.

---

<sup>52</sup> Ukhti Aulia Izzati, dkk, Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pada Film, (Semarang: Dwijaloka Jurnal Pendidikan Dasar & Menengah, 2023)

<sup>53</sup> Tiana Rahmadani, dkk, Pentingnya Penanaman Nilai-nilai Karakter dalam Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia (Tangerang, Jurnal Arip, 2025)

<sup>54</sup> Kinanti Anisa Lestari, dkk, Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Moral Anak Sekolah Dasar, (Bandung, Jurnal Sinektik, 2024)

<sup>55</sup> Novi Adiva Zuhra, Dasar-dasar Pendidikan Karakter Membangun Siswa Berakhlak Mulia, (Padang: Jurnal Media Akademik, 2024)

1. Nilai Moral Universal sebagai Landasan

Karakter dibangun atas dasar nilai moral yang bersifat universal, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi. Penanaman nilai ini berlaku lintas lintas belakang agama, budaya, dan sosial.<sup>56</sup>

2. Integrasi Nilai Ke Dalam Kehidupan dan Lingkungan Sekolah

Karakter tidak cukup diajarkan secara teoritis, tetapi diintegritaskan ke dalam seluruh aspek kehidupan sekolah, lingkungan, dan keluarga.<sup>57</sup>

3. Pembiasaan dan Keteladanan

Karakter dapat terbentuk apabila individu terbiasa melakukan hal yang baik secara konsisten, dari segi keteladanan guru, pimpinan sekolah, dan keluarga. Nilai karakter belum tercapai karena faktor kebiasaan secara konsisten.

4. Perlibatan Emosi, Sosial, Kognitif, dan Spiritual

Karakter bukan hanya aspek kognitif (pemahaman nilai), tetapi juga afektif (sikap, emosi), psikomotorik (perilaku), dan spiritual.

5. Kesenambungan dan Sistematis

Proses pembentukan karakter tidak hanya diterapkan dalam satu kali, melainkan harus bersifat konsisten, sistematis, dan terencana.

## **G. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Karakter**

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dalam membentuk karakter, tidak hanya aspek kognitif tentang hak dan kewajiban warga negara, melainkan aspek afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku. Melalui PKn, para peserta didik diharapkan menjadi warga negara yang cerdas dalam pengetahuan kewarganegaraan, baik dalam perilaku sosial, etika, dan tanggung jawab.

1. PKn sebagai Sarana Internalisasi Nilai Kebangsaan

Pengubahan suatu nilai-nilai kebangsaan seperti nasionalisme, identitas kebangsaan, persatuan, demokrasi, keadilan, sikap, kebiasaan, dan perilaku. PKn menjadi penggabungan antara pengetahuan nilai kebangsaan dan implementasi nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>56</sup> Akhmad Aji Pradana, Strategi Pembentukan Karakter Siswa, (Tuban, Journal Of Islamic Elementary Education, 2021)

<sup>57</sup> Putu Indah Lestari, dkk, Problematika Pengintegrasian Pendidikan Penguatan Karakter Pada Pembelajaran Tematik Di Era Revolusi Industri, ( Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2021)

## 2. Pembelajaran PKn Berbasis Keteladanan dan Kegiatan Proyek Sosial

Pembelajaran berbasis proyek sosial dalam PKn dapat berpengaruh pada siswa untuk melakukan aktivitas nyata, bekerja dalam tim, menyelesaikan masalah masyarakat, sehingga nilai dan karakter kewarganegaraan terinternalisasi melalui pengalaman nyata.<sup>58</sup>

## H. Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Pembentukan

### Karakter

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang strategis dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai-nilai lokal, nasional, dan niversal menghadapi tekanan dari budaya global. PKn menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai moral, etika, dan kebangsaan yang membentuk sikap, kebiasaan, dan perilaku peserta didik, sehingga menjadi warga negara yang berkarakter, bertanggung jawab, dan berintegritas.

### 1. Inti Keterkaitan PKn dengan Pembentukan Karakter

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang negara, hak, dan kewajiban, melainkan juga menjadi sarana internalisasi nilai (pancasila, nasionalisme, toleransi, tanggung jawab) yang membentuk sikap, kebiasaan, dan perilaku peserta didik sehingga menjadi warga negara yang berkarakter.

### 2. PKn Sebagai Sarana Internalisasi Nilai Kebangsaan Pendekatan kontekstual mengaitkan pancasila dan kearifan lokal berpengaruh kepada individu untuk memahami nilai sebagai praktik dalam diri kehidupan sehari-hari berdasarkan kemampuan.<sup>59</sup>

### 3. Implikasi Praktis untuk Guru dan Pihak Sekolah

Integritaskan nilai-nilai Pancasila pada setiap kegiatan pembelajaran, mengembangkan program keteladanan, merancang proyek kearifan lokal, masalah lingkungan, dan sosial, evaluasi afektif dan perilaku.

---

<sup>58</sup> Sulistianingsih, Strategi Penguatan Karakter Demokratis Melalui Pembelajaran PPKn Berbasis Proyek, ( Jurnal STKIP Kusuma Negara, 2024)

<sup>59</sup> Thomy Sastra Atmaja, Internalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, (Journal Upgripnk, 2024)

#### 4. PKn sebagai sarana internalisasi Nilai

Melalui materi, metode, dan pengalaman pembelajaran PKn, individu tidak hanya memahami nilai tetapi menginternalisasi menjadi sikap dan perilaku.

PKn adalah sarana utama untuk mengubah pengetahuan menjadi perilaku berkarakter. Dalam keberhasilan pembentukan karakter dari sarana PKn akan bergantung pada pembiasaan, keteladanan, kontekstualisasi nilai, dan pengalaman nyata dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan akan menghasilkan karakter yang stabil.

### **I. Mekanisme Keterkaitan: Bagaimana PKn Dalam Membentuk Karakter**

#### 1. Pengajaran nilai → refleksi → Praktis (Pembiasaan)

Pembelajaran PKn mencakup Berbagai materi seperti nilai, diskusi untuk membantu internalisasi, pembiasaan (upacara, gotong royong) yang menjadikan nilai sebagai kebiasaan.<sup>60</sup>

#### 2. Pembelajaran berbasis proyek dan layanan masyarakat

Para individu dapat menghadapi berbagai masalah yang nyata, bekerja secara kolaboratif, dapat bertanggung jawab dalam berbagai aspek, sehingga nilai karakter (kepedulian, tanggung jawab, kerja sama) menjadi stabil.

### **J. Metode Pembelajaran Pkn Yang Efektif Untuk Pembentukan Karakter**

- Diskusi reflektif dan studi kasus, memfasilitasi untuk berfikir secara kritis dan penalaran moral, memberikan ruang bagi individu untuk menilai diri dan perilaku moralnya.
- Partisipatif dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan penerapan.
- Kontekstual mengaitkan materi sesuai dengan realitas sosial dan kehidupan sehari-hari.
- Pembiasaan nilai, membangun kebiasaan berperilaku sesuai dengan nilai kewarganegaraan, pembelajaran harus berorientasi pada penguatan nilai-nilai pancasila, kebangsaan, dan moral.

---

<sup>60</sup> Muhammad Arif Al Fikri, Pembentukan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, ( Jurnal Ilmiah Sosial Teknik, 2022)

- Keteladanan terencana, melakukan program penguatan keteladanan guru dan melibatkan para orang tua, guru dan orang tua menjadi model sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai karakter.

#### **K. Faktor Yang Memengaruhi Hubungan PKn Dengan Karakter**

- Keterlibatan keluarga dan para masyarakat, dukungan dari sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat memperkuat karakter individu. Ketika nilai-nilai yang diajarkan di sekolah harus seimbang dengan pembiasaan di lingkungan rumah, sehingga karakter individu akan lebih mudah diterapkan. Dukungan dari masyarakat melalui program kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya juga dapat berpengaruh dalam pembentukan karakter pada pembelajaran PKn.<sup>61</sup>
- Kurikulum dan materi PKn, mencakup dan memuat nilai karakter secara eksplisit akan lebih efektif. Kurikulum yang berorientasi nilai berbasis tinggi akan membantu individu dapat memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, tanggung jawab, dan toleransi. Namun, jika kurikulum tersebut bersifat teoritis dan kognitif, maka nilai tersebut tidak diterapkan dengan sempurna.<sup>62</sup>
- Metode pembelajaran, dalam metode aktif, reflektif, penerapan secara langsung .
- Lingkungan sekolah, berpengaruh dalam hasil pembentukan karakter individu.
- Dukungan kebijakan dan pemerintah, implementasi dalam program seperti Profil Pelajar Pancasila dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kebijakan yang mendukung integrasi nilai karakter dalam semua mata pelajaran. Dukungan tersebut dapat berupa modul karakter, dan supervisi pembelajaran dapat memperkuat kualitas pendidikan karakter.<sup>63</sup>

#### **L. Tabel Hubungan PKn dengan Nilai Karakter**

Aspek PKn	Nilai Karakter Yang Dibentuk	Bentuk Implementasi	Dampak Pada Peserta Didik
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------------

<sup>61</sup> Nasution et al, Peran Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Kewarganegaraan Anak, (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2024)

<sup>62</sup> Nasution et al, Tumbuh Bersama Warga Sekolah, ( Jurnal Pendidikan Tambusai, 2024)

<sup>63</sup> Kemdikbudristek, Kebijakan Profil Pelajar Pancasila dan Penguatan Pendidikan Karakter, (2021-2025)

Pemahaman Pancasila	Nilai religius, toleransi, dan cinta tanah air	Diskusi nilai Pancasila, studi kasus	Siswa lebih menghargai keberagaman & memiliki sikap kebangsaan
Hak dan Kewajiban Warga Negara	Tanggung jawab, disiplin	Tugas kelompok, aturan kelas	Siswa menjadi lebih bertanggung jawab dan disiplin
Norma dan Hukum	Kejujuran, kepatuhan, dan aturan	Roleplay	Siswa terbiasa taat aturan dan jujur
Delokasi dan Partisipasi	Kerja sama dan menghargai pendapat	Debat ataupun pemilihan ketua kelas	Siswa mampu berkomunikasi dengan baik dan bersikap demokratis
Identitas Nasional	Cinta tanah air dan solidaritas	Proyek budaya dan lagu kebangsaan	Siswa lebih peduli terhadap bangsa dan budaya
Wawasan Kebangsaan	Kepedulian, empati sosial	Proyek sosial dan kegiatan bakti	Siswa lebih peduli pada lingkungan sosial



## BAB IV

### PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KESADARAN HIDUP SEHAT

#### A. Konsep Hidup Sehat dalam Konteks Kewarganegaraan

Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan hak fundamental setiap warga negara. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai kondisi fisik yang bebas dari penyakit, tetapi juga sebagai keadaan sejahtera secara menyeluruh baik jasmani, rohani, sosial, maupun lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh *World Health Organization (WHO)* bahwa kesehatan adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.<sup>64</sup> Dalam kerangka kewarganegaraan, makna hidup sehat menjadi lebih luas karena menyangkut tanggung jawab setiap individu terhadap kesejahteraan bersama.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman warga negara mengenai hak dan kewajiban untuk menjaga kesehatan diri serta lingkungan sekitar. Melalui pembelajaran PKn, individu dibimbing untuk menyadari bahwa perilaku hidup sehat tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya. Kesehatan menjadi pondasi bagi partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional, sebab warga negara yang sehat akan lebih produktif, berpikir rasional, dan mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial maupun politik.

Konsep hidup sehat dalam kewarganegaraan berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan sosial. Menjaga kesehatan diri dan lingkungan berarti turut menjalankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menciptakan keadilan sosial melalui pemerataan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam hal ini, hidup sehat tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral dan sosial setiap warga negara.<sup>65</sup>

Dalam konteks kebangsaan, kesehatan juga dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Artinya, negara dan warga negara memiliki tanggung jawab yang sama penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Negara menyediakan

---

<sup>64</sup> Helen et al., "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pondasi Pembentukan Karakter Profesional Tenaga Kesehatan," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 10, no. 7 (2025).

<sup>65</sup> Moh Ali et al., "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Pelajar Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Volume 15 Nomor 01, Mei 2025" 15 (2025).

sistem dan fasilitas, sedangkan warga negara menjalankan perilaku hidup sehat sesuai nilai-nilai kebersihan dan kedisiplinan.<sup>66</sup>

Dalam dunia pendidikan, kesadaran hidup sehat perlu ditanamkan sejak dini. PKn dapat dijadikan media untuk menanamkan nilai-nilai kesehatan melalui pembelajaran yang menumbuhkan tanggung jawab, kepedulian, dan kedisiplinan diri. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pondasi penting dalam pembentukan karakter profesional tenaga kesehatan karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan etika hidup sehat serta kepedulian terhadap sesama.<sup>67</sup> Dengan demikian, konsep hidup sehat dalam konteks kewarganegaraan tidak hanya bersifat personal, melainkan juga kolektif. Kesadaran, sikap, dan perilaku warga negara terhadap diri, lingkungan, dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Lebih jauh, hidup sehat sebagai bagian dari kewarganegaraan juga dapat dipahami melalui prinsip tanggung jawab kewarganegaraan atau *civic responsibility*. Dalam prinsip ini, setiap individu diharapkan berperan aktif dalam menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan.

Kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai kontribusi sosial terhadap kesejahteraan bersama. Ketika seorang warga menjaga pola makan, berolahraga teratur, dan tidak membuang sampah sembarangan, ia sesungguhnya sedang menjalankan fungsi kewarganegaraannya yang berorientasi pada kepentingan umum. Kewarganegaraan yang sehat secara sosial berarti masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk hidup bersih, saling menjaga, dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Hal ini selaras dengan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Gotong royong mengajarkan pentingnya partisipasi aktif seluruh warga dalam menjaga kepentingan bersama.<sup>68</sup> Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hidup sehat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan medis, tetapi juga oleh pendidikan moral dan budaya yang kuat.

Selain itu, konsep hidup sehat dalam kewarganegaraan memiliki hubungan erat dengan kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila warga negara memiliki kondisi fisik dan mental yang baik. Warga negara yang sadar akan pentingnya kesehatan akan lebih aktif dalam proses sosial dan politik. Sebaliknya, warga yang abai terhadap kesehatannya cenderung pasif dan kurang peduli terhadap kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan yang diintegrasikan dalam PKn akan memperkuat partisipasi dan modal sosial dalam masyarakat.<sup>69</sup> Melalui cara ini, kesadaran hidup sehat tidak hanya menjaga kualitas individu, tetapi juga memperkuat kehidupan demokratis suatu bangsa.

---

<sup>66</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” (2009).

<sup>67</sup> Helen et al., “Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pondasi Pembentukan Karakter Profesional Tenaga Kesehatan.”

<sup>68</sup> Lili Halimah and Siti Fauziah Nurul, “Refleksi Terhadap Kewarganegaraan Ekologis Dan Tanggung Jawab Warga Negara Melalui Program Ecovillage,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 17, no. 2 (2020).

<sup>69</sup> Arief Priyo Nugroho, Sri Handayani, and Diyan Ermawan Effendi, “Health Citizenship and Healthcare Access in Indonesia, 1945-2020,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 3 (2021).

Secara keseluruhan, konsep hidup sehat dalam konteks kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai kesadaran bahwa kesejahteraan pribadi dan sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan. Warga negara yang sehat akan membentuk masyarakat yang kuat, sementara masyarakat yang peduli terhadap kesehatan anggotanya akan memperkuat ketahanan bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai ini karena berhubungan langsung dengan pembentukan karakter, moral, serta tanggung jawab sosial sebagai warga negara.

## **B. Nilai Tanggung Jawab terhadap Kesehatan Diri, Lingkungan, dan Masyarakat**

Tanggung jawab terhadap kesehatan merupakan salah satu nilai moral yang perlu ditanamkan kepada setiap warga negara. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, nilai tanggung jawab ini menjadi dasar bagi terbentuknya kesadaran bahwa menjaga kesehatan bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga kewajiban sosial. Seorang warga negara yang bertanggung jawab terhadap kesehatannya berarti ia memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ia berhak atas pelayanan kesehatan, tetapi juga berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain.

Tanggung jawab dalam menjaga kesehatan mencerminkan kesadaran etis warga negara terhadap dirinya sendiri dan masyarakat.<sup>70</sup> Ketika seseorang berdisiplin dalam menerapkan pola hidup sehat, ia sesungguhnya telah menanamkan nilai tanggung jawab terhadap kehidupan. Dalam pendidikan kewarganegaraan, nilai ini diajarkan agar peserta didik memahami bahwa kesehatan tidak dapat dijaga hanya dengan instruksi atau kebijakan pemerintah, tetapi melalui kesadaran individu yang tumbuh dari dalam diri. Nilai tanggung jawab terhadap kesehatan diri mencakup berbagai aspek, mulai dari menjaga kebersihan, mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, hingga menghindari perilaku yang berisiko bagi kesehatan. Dalam konteks kewarganegaraan, hal ini berkaitan dengan konsep *self-governance*, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengendalikan diri demi kepentingan bersama.<sup>71</sup> Warga negara yang memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatannya akan menjadi teladan dalam lingkungan sosialnya, serta berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang kuat dan produktif.

Tanggung jawab terhadap kesehatan diri juga berhubungan dengan aspek spiritual dan moral. Dalam berbagai nilai luhur bangsa, seperti yang tercermin dalam Pancasila dan budaya gotong royong, manusia tidak hanya dipandang sebagai individu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang saling bergantung. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan diri

---

<sup>70</sup> Helen et al., "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pondasi Pembentukan Karakter Profesional Tenaga Kesehatan."

<sup>71</sup> Ida Nurdinti and Salimah Salimah, "Penanaman Nilai Gotong Royong Sebagai Pengamalan Sila Pancasila Pada Peserta Didik Sekolah Dasar," *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)* 3, no. 1 (2022): 23–28.

dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap anugerah kehidupan dan sebagai langkah awal dalam menjaga kesejahteraan bersama.<sup>72</sup>

Selain terhadap diri sendiri, tanggung jawab juga harus diterapkan terhadap lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan prasyarat utama bagi kehidupan masyarakat yang sejahtera. Namun, lingkungan yang terabaikan akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit menular, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Dalam hal ini, setiap warga negara memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, dan menanam pohon merupakan wujud nyata tanggung jawab terhadap lingkungan. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran lingkungan sangat erat, karena keduanya menumbuhkan nilai-nilai yang saling melengkapi. Pendidikan kewarganegaraan menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban terhadap negara, sedangkan pendidikan lingkungan menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga bumi sebagai tempat hidup bersama. Ketika keduanya digabungkan, terbentuklah warga negara yang memiliki kesadaran ekologis dan mampu berperilaku sesuai prinsip keberlanjutan.

Salah satu penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mampu meningkatkan pengetahuan serta sikap siswa dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.<sup>73</sup> Temuan ini membuktikan bahwa tanggung jawab terhadap kesehatan dapat diajarkan dan dibiasakan melalui pendidikan, termasuk melalui mata pelajaran PKn. PKn tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban secara teoretis, tetapi juga dapat digunakan untuk menanamkan perilaku konkret seperti disiplin menjaga kebersihan sekolah, menjaga lingkungan belajar yang sehat, serta saling mengingatkan antar teman.

Selain tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan, terdapat pula tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Kesehatan masyarakat merupakan hasil dari kesadaran kolektif yang tumbuh di antara warga negara. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan kondisi sosial yang mendukung pola hidup sehat. Misalnya, ketika seseorang terlibat dalam kegiatan kerja bakti, ikut menyosialisasikan program kesehatan, atau berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, ia sedang menjalankan nilai tanggung jawab sosial. Nilai-nilai sosial seperti empati, solidaritas, dan kepedulian adalah aspek penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan berkarakter.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar dalam menumbuhkan nilai-nilai tanggung jawab sosial tersebut. Melalui pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan partisipatif, siswa dapat dilatih untuk memahami bagaimana tindakan kecil mereka berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Misalnya, dalam kegiatan PKn, siswa dapat diberi tugas membuat kampanye tentang kebersihan lingkungan atau mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Kegiatan semacam ini tidak hanya menumbuhkan pengetahuan,

---

<sup>72</sup> T.B. Sinta and Hanifah, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pelayanan Kesehatan Petugas Rekam Medis Di Puskesmas Kabupaten Karanganyar," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2023): 97–102.

<sup>73</sup> Helen et al., "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pondasi Pembentukan Karakter Profesional Tenaga Kesehatan."

tetapi juga membentuk sikap dan kebiasaan positif yang mencerminkan warga negara yang bertanggung jawab. Nilai tanggung jawab dalam konteks kesehatan juga terkait dengan prinsip keadilan sosial. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, akses terhadap layanan kesehatan sering kali tidak merata. Oleh karena itu, warga negara yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial akan berupaya mendukung kebijakan yang mendorong pemerataan layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yang mengajarkan pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya saling berhubungan dan membentuk suatu sistem nilai yang utuh.

Warga negara yang bertanggung jawab terhadap kesehatannya akan berperilaku positif terhadap lingkungan dan turut menjaga kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, masyarakat yang peduli terhadap lingkungan akan mendukung individu-individu untuk hidup sehat. Dengan demikian, nilai tanggung jawab dalam konteks kesehatan bukan sekadar sikap moral, tetapi juga bentuk nyata partisipasi kewarganegaraan yang aktif.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, nilai tanggung jawab tersebut dapat ditanamkan secara sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Tanggung jawab terhadap kesehatan menjadi refleksi dari warga negara yang beradab, peduli, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Halimah and Nurul, "Refleksi Terhadap Kewarganegaraan Ekologis Dan Tanggung Jawab Warga Negara Melalui Program *Ecovillage*."

### **C. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pendidikan Kesehatan Berbasis Nilai Kebangsaan**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki fungsi strategis dalam membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, PKn berperan sebagai sarana pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek politik dan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan sosial yang membangun karakter sehat dan berintegritas. Kesehatan dan kebangsaan merupakan dua hal yang saling berkaitan, sebab bangsa yang sehat secara jasmani dan rohani akan memiliki kekuatan moral untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatannya.

Pendidikan nasional harus menumbuhkan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, berilmu, dan berkepribadian, sehingga mampu mengelola kehidupan secara sehat dan bertanggung jawab.<sup>75</sup> Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan nilai dan pendidikan kesehatan, sebab ketiganya berkontribusi terhadap pembentukan warga negara yang cerdas sekaligus berkarakter. Dalam pelaksanaannya, PKn dapat dijadikan media untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang berkaitan dengan kesehatan, seperti disiplin, tanggung jawab sosial, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya hidup sehat. Misalnya, kegiatan belajar yang menekankan kerja kelompok untuk menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah dapat menjadi sarana menanamkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang berakar dari semangat kebangsaan.<sup>76</sup> Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membahas hubungan antara warga dan negara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etis terhadap sesama warga. Dalam konteks kesehatan, nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, solidaritas, dan semangat gotong royong menjadi landasan penting untuk mengatasi tantangan kesehatan bersama. Hal ini terlihat dalam berbagai peristiwa nasional, seperti saat pandemi COVID-19, di mana solidaritas dan kepedulian sosial menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Sebagai sarana pendidikan kesehatan berbasis nilai kebangsaan, PKn juga berperan dalam menginternalisasi nilai Pancasila ke dalam perilaku hidup sehat. Sila pertama mengajarkan pentingnya menghargai kehidupan sebagai anugerah Tuhan, yang berarti manusia wajib menjaga kesehatannya sebagai bentuk tanggung jawab spiritual. Sila kedua menuntun warga negara untuk memperlakukan sesama secara manusiawi, termasuk dalam aspek menjaga kebersihan lingkungan bersama. Sila ketiga mendorong persatuan dan kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Sila keempat dan kelima mengajarkan pentingnya musyawarah serta keadilan sosial dalam hal akses terhadap fasilitas kesehatan dan kebijakan publik. Nilai-nilai kebangsaan yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan dapat menguatkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari cinta tanah air. Bangsa

---

<sup>75</sup> Nugroho, Handayani, and Effendi, "Health Citizenship and Healthcare Access in Indonesia, 1945-2020."

<sup>76</sup> Halimah and Nurul, "Refleksi Terhadap Kewarganegaraan Ekologis Dan Tanggung Jawab Warga Negara Melalui Program Ecovillage."

yang sehat akan lebih produktif dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global. Oleh sebab itu, membangun kesadaran hidup sehat melalui PKn merupakan bentuk nyata dari kontribusi pendidikan terhadap pembangunan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PKn yang diintegrasikan dengan pendidikan kesehatan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar.<sup>77</sup> Pembelajaran tersebut dilakukan dengan metode proyek dan diskusi kelompok yang mengaitkan isu-isu kesehatan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, melainkan juga kewajiban bersama sebagai warga negara. Selain itu, PKn berpotensi memperkuat nilai kebangsaan dalam konteks pendidikan kesehatan melalui kegiatan partisipatif. Guru dapat mengembangkan pembelajaran yang berbasis pengalaman nyata, misalnya dengan mengajak siswa melakukan kegiatan bakti sosial di lingkungan sekitar, menanam pohon, atau melakukan kampanye kesehatan di masyarakat. Kegiatan semacam ini bukan hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman langsung yang memperdalam nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Dalam konteks kurikulum, integrasi antara PKn dan pendidikan kesehatan sebenarnya telah tersirat dalam tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Artinya, pembentukan karakter sehat sudah menjadi bagian dari tujuan utama pendidikan nasional, dan PKn menjadi wadah yang efektif untuk mewujudkannya.

Sebagai sarana pendidikan kesehatan berbasis nilai kebangsaan, PKn juga harus mampu mengembangkan wawasan kebangsaan dalam konteks globalisasi. Di era modern, tantangan terhadap kesehatan tidak hanya berasal dari faktor penyakit, tetapi juga dari gaya hidup tidak sehat akibat arus budaya global yang tidak terkendali. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan filter nilai agar peserta didik mampu bersikap selektif terhadap pengaruh luar yang dapat merusak moral dan fisik bangsa. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa hidup sehat adalah bagian dari tanggung jawab kebangsaan. Sehat bukan hanya urusan medis, tetapi juga urusan moral dan sosial. Warga negara yang sehat jasmani dan rohani akan lebih mampu berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan demikian, PKn bukan sekadar mata pelajaran yang mengajarkan teori kewarganegaraan, tetapi juga wahana pembentukan karakter bangsa yang sadar akan pentingnya hidup sehat. Melalui pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan dapat dijadikan fondasi untuk membangun masyarakat yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan individu dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.

---

<sup>77</sup> Nugroho, Handayani, and Effendi, "*Health Citizenship and Healthcare Access in Indonesia, 1945-2020.*"

#### **D. Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Integrasi pendidikan kesehatan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan langkah strategis untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sadar akan pentingnya hidup sehat. Integrasi di sini berarti bahwa nilai, konsep, dan praktik hidup sehat tidak diajarkan sebagai materi terpisah, melainkan disatukan secara kontekstual ke dalam pembelajaran PKn. Dengan demikian, siswa dapat memahami bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Dalam konteks pendidikan, integrasi semacam ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang konsep kesehatan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan yang berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat. Pendidikan kewarganegaraan yang diintegrasikan dengan kegiatan berbasis nilai sosial mampu memperkuat *civic knowledge* sekaligus kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.<sup>78</sup> Artinya, pembelajaran yang mengintegrasikan nilai kesehatan ke dalam PKn tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran sosial.

Pembelajaran PKn memiliki karakteristik yang sangat mendukung pengintegrasian pendidikan kesehatan, karena PKn tidak hanya mengajarkan teori kewarganegaraan, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip hidup sehat yang menuntut kedisiplinan pribadi dan kepedulian sosial. Misalnya, siswa dapat belajar tentang hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kesehatan, seperti hak memperoleh layanan kesehatan yang layak dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam praktiknya, integrasi pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan pembelajaran, antara lain pendekatan kontekstual, kolaboratif, dan berbasis proyek.<sup>79</sup> Guru PKn dapat mengaitkan topik tentang peran warga negara dalam kehidupan demokratis dengan isu-isu kesehatan publik seperti pandemi, gizi seimbang, atau kesetaraan akses layanan kesehatan. Melalui diskusi dan studi kasus, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan empatik terhadap persoalan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pengetahuan siswa tentang kewarganegaraan, tetapi juga membentuk kesadaran akan pentingnya berperilaku sehat demi kepentingan bersama. Selain itu, integrasi pendidikan kesehatan dalam PKn dapat memperkuat tujuan pendidikan karakter nasional. Karakter yang sehat tidak hanya ditandai oleh kondisi fisik yang kuat, tetapi juga oleh kemampuan berpikir rasional, pengendalian diri, serta kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, pembelajaran PKn yang berorientasi pada nilai-nilai kesehatan dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter yang berakar pada nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contoh penerapan integrasi ini dapat ditemukan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat diajak untuk membuat proyek

---

<sup>78</sup> Sania Zahriatul Ummah et al., "Optimalnya Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* Volume 8, no. 6 (2025): 1–12.

<sup>79</sup> Halimah and Nurul, "Refleksi Terhadap Kewarganegaraan Ekologis Dan Tanggung Jawab Warga Negara Melalui Program *Ecovillage*."



kampanye sosial tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau mencegah penyebaran penyakit menular. Dalam prosesnya, siswa akan belajar mengenai peran warga negara dalam menjaga kesejahteraan publik, serta memahami bagaimana tindakan individu berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Kegiatan semacam ini menumbuhkan kesadaran bahwa hidup sehat bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan nasional.

Integrasi pendidikan kesehatan juga dapat diwujudkan melalui pembelajaran berbasis nilai (*value-based learning*). Dalam pendekatan ini, guru menekankan pada penanaman nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan kepedulian. Misalnya, ketika membahas topik tentang hak asasi manusia, guru dapat mengaitkannya dengan hak atas kesehatan dan kewajiban warga untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Dengan cara ini, peserta didik akan memahami bahwa setiap hak selalu diikuti dengan tanggung jawab moral yang harus dijaga demi kesejahteraan bersama.

### **1. Penguatan Kesadaran Kritis terhadap Kebijakan Publik**

- Pendidikan Kewarganegaraan berperan strategis dalam membangun *critical awareness* peserta didik terkait formulasi dan implementasi kebijakan publik di sektor kesehatan.
- Melalui proses pembelajaran yang analitis, siswa diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan kesehatan pemerintah mengafirmasi prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, serta pemerataan layanan kesehatan.

### **2. Penanaman Nilai Keadilan dan Kepedulian Sosial**

- PKn berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai kewargaan yang berorientasi pada etos keadilan dan kepentingan publik.
- Pemahaman terhadap kebijakan kesehatan yang berkeadilan mengondisikan siswa menjadi warga negara yang tidak hanya patuh terhadap norma hukum, tetapi juga memiliki sensitivitas moral terhadap isu kesejahteraan sosial.

### **3. Peran Guru sebagai Fasilitator Nilai dan Agen Teladan**

- Integrasi pendidikan kesehatan dalam PKn mensyaratkan guru berperan sebagai fasilitator nilai, bukan sekadar penyampai informasi.
- Keberhasilan internalisasi nilai hidup sehat sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru menghadirkan keteladanan nyata, mengingat perilaku peserta didik cenderung terbentuk melalui proses imitasi terhadap figur otoritatif di lingkungan sekolah.

### **4. Konsistensi Praktik Pendidikan dalam Lingkungan Sekolah**

- Efektivitas integrasi pendidikan kesehatan bergantung pada konsistensi guru dan warga sekolah dalam mempraktikkan perilaku sehat dalam rutinitas harian.
- Ketidaksinambungan antara materi yang diajarkan dan praktik keseharian akan melemahkan intensi afektif dan psikomotorik peserta didik.

## 5. Dukungan Kebijakan dan Struktur Kurikulum

- Implementasi integrasi ini memerlukan dukungan sistemik dari kebijakan pendidikan dan desain kurikulum yang adaptif.
- Kurikulum Merdeka Belajar memberikan ruang bagi pengembangan pembelajaran yang kontekstual, fleksibel, dan berbasis pada kebutuhan peserta didik serta lingkungan sosialnya.

## 6. Keterkaitan dengan Profil Pelajar Pancasila

- Dimensi-dimensi dalam Profil Pelajar Pancasila seperti “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia”, “kemandirian”, serta “gotong royong” memiliki implikasi langsung terhadap nilai kesehatan, etika hidup, dan kepedulian sosial.
- Hal ini menegaskan bahwa integrasi pendidikan kesehatan dalam PKn selaras dengan mandat pendidikan nasional yang menekankan keseimbangan antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran kritis terhadap kebijakan publik di bidang kesehatan.<sup>80</sup> Integrasi pendidikan kesehatan juga memperkuat relevansi PKn dengan kehidupan nyata peserta didik. Ketika pembelajaran dikaitkan dengan isu-isu aktual seperti pandemi, kebersihan lingkungan, atau kesehatan mental, siswa akan merasa bahwa apa yang mereka pelajari memiliki makna langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan teori pendidikan kontekstual yang menekankan pentingnya keterkaitan antara pembelajaran dan pengalaman hidup peserta didik.

---

<sup>80</sup> Imelda Feylina Subagya, “Implementation of Citizenship Values Through Health Education to The Community in RT.25,” *Unmul Civic Education Journal*, 2022, 48–57.

## **BAB V**

### **KESEHATAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa (Kemeskes RI).<sup>81</sup> Dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa, su kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik secara keseluru. Kesehatan masyarakat yang baik menjadi fondasi bagi produktivitas nasional, kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan Pembangunan.<sup>82</sup> Bab ini akan membahas empat aspek penting terkait kesehatan dalam kehidupan berbangsa. Pertama, arti penting kesehatan sebagai modal dasar bagi kemajuan suatu negara.<sup>83</sup>

Kedua, gambaran mengenai kesehatan fisik, mental, dan sosial yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas hidup Masyarakat<sup>84</sup>. Ketiga, pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan<sup>85</sup>. Terakhir, peran pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem kesehatan yang kuat melalui regulasi, layanan kesehatan, pembiayaan, serta partisipasi aktif dalam program kesehatan berbasis komunitas.<sup>86</sup>

Pembahasan ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa kesehatan adalah aspek yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Jika ingin, bagian ini bisa dibuat lebih ringkas atau lebih akademik sesuai kebutuhan.<sup>87</sup>

#### **1. Arti Penting Kesehatan dalam Kehidupan Berbangsa**

Kesehatan memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan sebuah bangsa. Tanpa masyarakat yang sehat, mustahil suatu negara dapat berkembang secara optimal. Hal ini sejalan dengan isi Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa

---

<sup>81</sup> Kemenkes RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

<sup>82</sup> WHO. (2021). World Health Statistics 2021. Geneva: World Health Organization.

<sup>83</sup> UNDP. (2020). Human Development Report. New York: United Nations Development Programme.

<sup>84</sup> WHO. (2021). World Health Statistics 2021. Geneva: World Health Organization.

<sup>85</sup> Kemenkes RI. (2020). Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

<sup>86</sup> Bappenas. (2022). Evaluasi Sistem Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

<sup>87</sup> Kemenkes RI. (2023). Laporan Kinerja Bidang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

negara Indonesia bertujuan untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa.” (UUD 1945, Alinea IV) Kedua tujuan besar ini pada dasarnya memerlukan kondisi kesehatan masyarakat yang baik sebagai fondasinya. Orang yang sehat dapat belajar lebih efektif, bekerja lebih produktif, dan berkontribusi lebih besar terhadap kemajuan negara.

Definisi kesehatan menurut World Health Organization (WHO) juga memperkuat pandangan tersebut. WHO (1948) menyatakan bahwa kesehatan bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial<sup>88</sup>. Artinya, kesehatan mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, bukan sekadar tubuh yang tidak sakit. Ketika semua aspek ini terpenuhi, masyarakat dapat hidup dengan kualitas yang baik dan mampu berpartisipasi secara penuh dalam aktivitas sosial maupun ekonomi.

Di Indonesia, kondisi kesehatan masyarakat terbukti memiliki dampak langsung terhadap produktivitas nasional. Penelitian dari Kementerian Kesehatan (2023) menunjukkan bahwa penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes, hipertensi, dan kanker, mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 350–400 triliun per tahun<sup>89</sup>. Kerugian ini muncul dari hilangnya hari kerja produktif, meningkatnya biaya pengobatan, serta menurunnya kualitas hidup penduduk. Peristiwa pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran penting: ketika kesehatan masyarakat terganggu secara masif, pertumbuhan ekonomi negara ikut menurun. Data Bank Indonesia mencatat bahwa ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 2,7% pada tahun 2020 akibat pandemi (Bank Indonesia,<sup>90</sup>

Selain itu, kesehatan juga berkaitan erat dengan ketahanan nasional. Dalam doktrin pertahanan negara semesta, kesehatan masyarakat dikategorikan sebagai salah satu unsur pertahanan non-militer.<sup>91</sup> Jika derajat kesehatan masyarakat rendah, negara menjadi lebih rentan terhadap ancaman biologis seperti penyebaran penyakit menular baru, bioterorisme, atau wabah yang dapat melemahkan kekuatan nasional. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan semestinya dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekadar

---

<sup>88</sup> WHO. (1948). Preamble to the Constitution of the World Health Organization. Geneva: WHO.

<sup>89</sup> Kemenkes RI. (2023). Laporan Ekonomi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes.

<sup>90</sup> Bank Indonesia. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia 2021. Jakarta: BI.

<sup>91</sup> Kementerian Pertahanan RI. (2022). Doktrin Pertahanan Negara Semesta. Jakarta: Kemhan

pengeluaran pemerintah. Negara membutuhkan sumber daya manusia yang sehat untuk mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045”.

Secara keseluruhan, kesehatan merupakan pondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan keberlanjutan pembangunan bangsa. Tanpa penduduk yang sehat, cita-cita besar negara akan sulit tercapai.

## 2. Kesehatan Fisik,Mental,dan Sosial

### a. Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik merujuk pada kondisi ketika seluruh organ tubuh bekerja secara optimal sehingga seseorang dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan. Di Indonesia, tantangan kesehatan fisik cukup kompleks karena kita masih menghadapi double burden of disease atau beban ganda penyakit. Artinya, penyakit menular seperti TBC dan demam berdarah (DBD) masih tinggi, namun pada saat yang sama penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes juga terus meningkat.<sup>92</sup>

Data dari Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes melitus di Indonesia mencapai 10,9% pada penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka hipertensi bahkan lebih tinggi, yaitu 34,1%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki risiko besar terhadap penyakit kronis. Jika tidak ditangani sejak dini, penyakit tersebut dapat mengurangi kualitas hidup, membatasi produktivitas, dan menambah beban biaya kesehatan negara.<sup>93</sup>

Tabel 1. Prevalensi Penyakit Tidak Menular di Indonesia

Jenis Penyakit	Prevalensi (Riskesdas 2018)	Keterangan
Diabetes Melitus	10,9%	Usia kurang lebih 15 tahun
Hipertensi	34,1%	Faktor resiko utam PTM

<sup>92</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). Doktrin Pertahanan Negara Semesta. Jakarta: Kemhan RI.

<sup>93</sup> Kementerian Kesehatan RI. (2022). Strategi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Jakarta: Kemenkes RI.

Obesitas	21,8%	Meningkat setiap tahun
Penyakit Jantung	1,5%	Penyebab kematian tertinggi PTM

## b. Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan aspek yang tidak kalah penting dibanding kesehatan fisik, karena menyangkut kemampuan seseorang dalam mengelola emosi, berpikir jernih, dan menjalani kehidupan dengan keseimbangan psikologis. Survei nasional kesehatan mental remaja, yaitu I-NAMHS 2022, menemukan bahwa 34,9% remaja Indonesia atau sekitar 15,5 juta orang mengalami masalah kesehatan mental dalam satu tahun terakhir<sup>94</sup>. Bahkan, 2,5% di antaranya memiliki risiko bunuh diri, sebuah angka yang cukup mengkhawatirkan.

Masalah lainnya adalah tingginya stigma terhadap gangguan mental di masyarakat. Banyak remaja yang sebenarnya membutuhkan bantuan memilih diam karena takut dianggap “lemah” atau “aneh”. Akibatnya, hanya 9,9% yang benar-benar mencari bantuan profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi dan layanan kesehatan mental masih perlu ditingkatkan agar masyarakat merasa aman dan nyaman untuk mendapatkan pertolongan.

Tabel 2. Kondisi Kesehatan Mental Remaja Indonesia

Indikator	Angka	Keterangan
Remaja mengalami gangguan mental	34,9%	Lebih kurang 15,5 juta remaja
Risiko bunuh diri	2,5%	Angka cukup mengkhawatirkan
Remaja yang mencari bantuan	9,9%	Masih sangat rendah

<sup>94</sup> I-NAMHS. (2022). Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022. Jakarta: Ministry of Health, UNICEF & University of Queensland

### **c. Kesehatan Sosial**

Kesehatan sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang menjalin hubungan yang sehat, berkomunikasi dengan baik, serta berpartisipasi secara harmonis dalam lingkungan sosialnya. Kesehatan sosial bukan hanya tentang relasi pribadi, tetapi juga mencakup rasa saling percaya, solidaritas, dan kohesi sosial dalam masyarakat.<sup>95</sup>

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar terhadap aspek ini. Pembatasan aktivitas dan isolasi berkepanjangan membuat banyak orang mengalami kesepian dan tekanan sosial. Laporan Komnas Perempuan (2022) menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meningkat hingga 40% pada tahun 2020–2021. Hal ini menjadi bukti bahwa gangguan kesehatan sosial dapat muncul ketika tekanan sosial dan ekonomi meningkat.

Konsep social well-being dalam konteks Indonesia juga berkaitan dengan kerukunan antarsuku, agama, dan golongan. Interaksi sosial yang sehat berperan penting menjaga persatuan bangsa, terutama di negara dengan keberagaman seperti Indonesia.

### **3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai Tanggung Jawab Warga**

#### **Negara**

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia<sup>96</sup>. PHBS adalah serangkaian perilaku yang dilakukan secara sadar, kemauan sendiri, dan mampu menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengatur pelaksanaan PHBS melalui berbagai regulasi, salah satunya PermenkesRINo. 2269/MENKES/PER/XI/2011. Regulasi ini kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yang menegaskan kembali bahwa upaya hidup sehat adalah gerakan nasional yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan Masyarakat.<sup>97</sup>

PHBS sendiri meliputi 10 tatanan yang diterapkan di berbagai lingkungan seperti rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, sarana kesehatan, tempat umum, bahkan di tempat ibadah. Masing-masing tatanan memiliki indikator perilaku yang berbeda, seperti kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, penggunaan air bersih, pengelolaan makanan yang

---

<sup>95</sup> Keyes, C. L. M. (1998). Social Well-Being. *Social Psychology Quarterly*, 61(2), 121–140.

<sup>96</sup> Notoatmodjo, S. (2012). *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>97</sup> Kemenkes RI. (2021). *Germas: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*.

higienis, tidak merokok di lingkungan keluarga, hingga menjaga kebersihan sanitasi. Dengan kata lain, PHBS bukan sekadar kampanye kesehatan, tetapi sebuah sistem perilaku komprehensif yang harus menjadi gaya hidup masyarakat.

Pentingnya PHBS dapat dilihat melalui berbagai penelitian. Salah satunya adalah penelitian di Jawa Tengah (2022) yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang menerapkan PHBS dengan capaian minimal 80% memiliki risiko terkena diare 68% lebih rendah dibandingkan rumah tangga dengan capaian PHBS di bawah 50%.<sup>98</sup> Data ini memperlihatkan bahwa perubahan perilaku sederhana, seperti mencuci tangan, menjaga sanitasi, atau mengelola sampah dengan benar, mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan penyakit berbasis lingkungan.<sup>99</sup> PHBS juga tidak dapat dipandang sebagai pilihan pribadi semata, melainkan bentuk tanggung jawab warga negara. Hal ini ditegaskan secara konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...”. Hak atas lingkungan yang sehat membawa konsekuensi adanya kewajiban moral dan sosial dari setiap individu untuk menjaga lingkungan tersebut tetap bersih, aman, dan bebas dari ancaman penyakit. Dengan demikian, PHBS bukan hanya menyangkut kesehatan individu, tetapi juga merupakan kontribusi nyata warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks pembangunan nasional, penerapan PHBS juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang. Masyarakat yang memiliki perilaku hidup sehat cenderung lebih produktif, lebih jarang mengalami sakit, dan memiliki biaya pengobatan yang lebih rendah. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, PHBS mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan beban pembiayaan kesehatan, mengingat banyak penyakit dapat dicegah hanya dengan mengubah kebiasaan sehari-hari (Kemeskes RI, 2018; WHO, 2020)<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Santosa, R., et al. (2022). “Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Risiko Diare.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(2), 210–220.

<sup>99</sup> Putri, D. A. (2021). Hubungan PHBS Rumah Tangga dengan Kejadian Diare. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(3), 145–152.

<sup>100</sup> Kemenkes RI. (2020). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2020. Jakarta: Badan Litbangkes.

<sup>21</sup> Kemenkes RI. (2011). Permenkes No. 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman PHBS.



Lebih jauh lagi, PHBS menjadi bagian dari ketahanan kesehatan nasional. Jika masyarakat terbiasa hidup bersih dan sehat, maka risiko penyebaran penyakit menular maupun penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan secara signifikan. Kondisi ini penting terutama dalam menghadapi ancaman wabah, pandemi, atau bencana kesehatan di masa depan. Oleh sebab itu, PHBS bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari kewajiban kolektif sebagai warga negara dalam menjaga stabilitas kesehatan bangsa<sup>21</sup>.

Secara keseluruhan, PHBS adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang kuat, sehat, dan produktif. Ketika setiap warga negara mengambil peran aktif dalam menjalankan PHBS, maka upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional dan memperkuat ketahanan bangsa akan semakin mudah tercapai.

Tabel 3. Hubungan PHBS dan Risiko Penyakit

Kelompok Rumah Tangga	Capaian PHBS	Risiko Terkena Diare
PHBS tinggi	$\geq 80\%$	68% lebih rendah
PHBS rendah	$\leq 50\%$	Risiko jauh lebih tinggi

#### 4. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjaga Kesehatan

Upaya menjaga kesehatan nasional tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan kebijakan yang efektif serta layanan kesehatan yang merata, sementara masyarakat berperan dalam menjalankan perilaku hidup sehat dan terlibat aktif dalam program-program kesehatan lokal<sup>101</sup>. Peran Pemerintah: Regulasi, Pembiayaan, dan Penyediaan Layanan Secara garis besar, pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam sektor kesehatan: regulasi, pembiayaan, dan penyediaan layanan.

<sup>101</sup> Notoatmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

### 1. Fungsi Regulasi

Pemerintah menetapkan berbagai aturan dan kebijakan untuk memastikan seluruh layanan kesehatan berjalan sesuai standar, aman, dan berkualitas. Regulasi ini mencakup pengawasan fasilitas kesehatan, perizinan tenaga kesehatan, standar pelayanan minimal, hingga kebijakan nasional seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi juga bentuk intervensi negara agar masyarakat mendapatkan haknya atas kesehatan sesuai UUD 1945.

### 2. Fungsi Pembiayaan

Sistem pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Per Desember 2024, cakupan JKN telah mencapai 96,8% penduduk Indonesia.<sup>102</sup> menjadikannya salah satu skema jaminan kesehatan terbesar di dunia. Meskipun begitu, tantangan finansial masih besar. BPJS Kesehatan masih mengalami defisit sekitar Rp 30–40 triliun per tahun. Defisit ini disebabkan antara lain oleh tingginya beban pembiayaan penyakit kronis, ketidakseimbangan iuran dengan biaya pelayanan, serta sistem rujukan yang belum optimal. Masalah ini menuntut pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat pencegahan penyakit, dan menata ulang kebijakan iuran agar sistem tetap berkelanjutan.

### 3. Fungsi Penyediaan Layanan

Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan dasar melalui puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan jaringan fasilitas layanan primer. Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan merata, terutama di daerah terpencil. Selain itu, program seperti imunisasi nasional, penanganan gizi buruk, layanan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada Masyarakat<sup>24</sup>. Peran Masyarakat: Partisipasi, Kolaborasi, dan Pemberdayaan Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting sebagai pelaku utama dalam menjaga kesehatan. Tanpa keterlibatan

---

<sup>102</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Profil Kesehatan Indonesia 2021. Jakarta: Kemenkes RI.

<sup>24</sup> Kemenkes RI. (2020). Profil Kesehatan Indonesia 2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

masyarakat, program kesehatan pemerintah sulit berjalan efektif. Bentuk keterlibatan ini dapat dilihat dari berbagai program berbasis komunitas seperti:

1. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) fokus pada ibu hamil, balita, dan lansia
2. Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) untuk deteksi dini hipertensi, diabetes, obesitas, dan PTM lainnya.
3. Desa Siaga Aktif sistem kesiapsiagaan desa dalam bidang kesehatan, termasuk penanganan gizi dan wabah.

Penelitian di Nusa Tenggara Timur (2023) menunjukkan bahwa desa dengan tingkat partisipasi masyarakat lebih dari 75% memiliki angka stunting 12% lebih rendah dibanding desa dengan tingkat partisipasi rendah<sup>103</sup>. Temuan ini membuktikan bahwa dukungan masyarakat bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan faktor penentu keberhasilan program kesehatan.

Partisipasi masyarakat meliputi berbagai bentuk, seperti datang ke Posyandu, mengikuti edukasi kesehatan, memberikan dukungan sosial, hingga menyebarkan informasi kesehatan yang benar. Selain itu, masyarakat juga berperan mencegah penyebaran penyakit dengan menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menjaga lingkungan, serta menghindari perilaku berisiko seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat sebagai Kunci Keberhasilan Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kesehatan nasional sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyediakan kebijakan, anggaran, dan layanan; sementara masyarakat menjalankan peran preventif dan promotif melalui perilaku sehat dan partisipasi aktif. Ketika kedua pihak bekerja bersama, maka tujuan besar seperti menurunkan angka stunting, mengendalikan penyakit menular, memperbaiki gizi masyarakat, dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional dapat dicapai lebih cepat dan efektif. Upaya ini juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045, di mana kesehatan menjadi komponen utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

---

<sup>103</sup> Lake, I., Manafe, D. O., & Benu, F. L. (2023). Community Participation and Stunting Reduction in East Nusa Tenggara. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

## BAB VI

### STRATEGI INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DAN KARAKTER DALAM PKN



**A. Model pembelajaran integratif (kognitif, afektif, dan psikomotorik)** Model pembelajaran integratif menekankan penggabungan tiga ranah pembelajaran kognitif (pengetahuan), afektif (sikap/nilai), dan psikomotorik (keterampilan) dalam perencanaan pembelajaran sehingga tujuan pendidikan tercapai secara utuh dan berkelanjutan (Nur'aeni & Mupid, 2021a)<sup>104</sup>. Dalam konteks PKN, integrasi ini memungkinkan siswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan dan kesehatan secara teoretis, tetapi juga membentuk sikap moral dan keterampilan perilaku hidup sehat melalui praktik langsung (Taufiqurrahman et al., 2024)<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> Nur'aeni, I., & Mupid, H. (2021a). The journal of social and economic education Pentingnya Menanamkan Pendidikan Nilai Di Indonesia Dalam Membentuk Karakter. In *Jurnal Edueksos: Vol. X* (Issue 2).

<sup>105</sup> Taufiqurrahman, M., Raden, S., & Mojokerto, W. (2024). *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction Transformasi Nilai Karakter Di Era Digital: Pendekatan Integratif Untuk Pendidikan Berbasis Teknologi*. <https://doi.org/10.32616/pgr.v8.2.521.141-148>

Penelitian-penelitian empiris menunjukkan bahwa desain pembelajaran yang menggabungkan tugas reflektif (ranah afektif), tugas analitis (ranah kognitif), dan kegiatan praktek/role-play atau demonstrasi (ranah psikomotorik) meningkatkan internalisasi nilai dan kemampuan aplikasi siswa dibanding pendekatan yang tersegmentasi (Iskandar et al., 2024)<sup>3</sup>. Implementasi model integratif pada mata PKn dilaporkan meningkatkan penguasaan konsep kewarganegaraan sekaligus membentuk kebiasaan sehat karena siswa dilibatkan dalam kegiatan yang menuntut penerapan nilai dalam tindakan nyata (Negeri et al., 2019a)<sup>4</sup>.



## **B. Pendekatan kurikulum yang menanamkan nilai kesehatan dan moralitas**

Pendekatan kurikulum yang efektif menempatkan penanaman nilai kesehatan dan moralitas sebagai tujuan lintas mata pelajaran (cross-curricular) dan bukan sekadar konten tambahan. Kurikulum berbasis nilai merancang kompetensi yang eksplisit

---

<sup>3</sup> Iskandar, J., Ulfitriyah, H., & Narendrany Hidayati, H. (2024). Kerjasama Guru dan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Smp Negeri 15 Kota Bekasi. In *Syntax Admiration* (Vol. 5, Issue 12).

<sup>4</sup> Negeri, S. S., Kecamatan Enok, P., & Hilir, I. (2019a). *Penerapan Model Pembelajaran Integratif Untuk*

*Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Murid Kelas V SD Negeri 007 Pusaran Tahun.*

misalnya kompetensi kesejahteraan diri, tanggung jawab sosial, dan etika sehat serta indikator perilaku yang dapat diobservasi(Munawaroh, 2025)<sup>106</sup>. Strategi kurikulum yang sering direkomendasikan meliputi integrasi tema kesehatan ke dalam standar kompetensi PKn, penggunaan skenario kasus nyata yang mengaitkan moralitas dengan keputusan kesehatan, dan pemanfaatan penilaian autentik untuk mengukur perubahan sikap serta perilaku(Tambusai et al., 2021)<sup>107</sup>. Studi kajian kurikulum menunjukkan bahwa pendekatan tematik dan berbasis masalah memudahkan guru mengaitkan pengetahuan kewarganegaraan dengan nilai-nilai moral serta praktik hidup sehat sehingga pembelajaran menjadi relevan bagi kehidupan siswa sehari-hari (Wimbawati et al., 2025)<sup>108</sup>

### **C. Contoh kegiatan PKn yang menumbuhkan karakter dan kesadaran hidup sehat**

Kegiatan PKn yang efektif mengombinasikan penguatan kognitif, simulasi nilai, dan latihan keterampilan(Pendidikan et al., 2023)<sup>109</sup>. Contoh kegiatan yang telah diuji di lapangan antara lain: (1) diskusi kasus etika kesehatan di komunitas, di mana siswa menganalisis dilema dan merumuskan keputusan berdasarkan nilai Pancasila dan prinsip kesehatan; (2) proyek layanan masyarakat (community service) kecil berupa kampanye hidup bersih-sehat di sekolah atau lingkungan sekitar yang melatih keterampilan organisasi sekaligus menanamkan tanggung jawab sosial; (3) role-play simulasi pengambilan keputusan darurat kesehatan yang melatih respons

---

<sup>106</sup> Munawaroh, L. (2025). *Kolaborasi Guru, Orang Tua Dan Masyarakat Sekolah Dalam Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam*. 01, 2025. <https://doi.org/10.52431/jurnalilmu>

<sup>107</sup> Tambusai, J. P., Putri, F. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). *Implementasi Pembelajaran PKn Sebagai Pembentukan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar*.

<sup>108</sup> Wimbawati, P. K. A., Sanjaya, D. B., & Swastika, I. N. (2025). Pembelajaran PKn Membangun Karakter Menyulut Kesadaran Politik Sejak Usia Pendidikan Dasar. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 5(7), 1. <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i7.2025.1>

<sup>109</sup> Pendidikan, P., Dalam, K., Karakter, M., Kesadaran, D., Negara, B., Muda, G., Leilani, P. B., Hapsari, A., Kusumasari, S., Weka, D., Purna, A., & Brata, Y. (2023). *Indigenous Knowledge*. 2.

psikomotorik dan kerjasama; (4) portofolio reflektif yang meminta siswa menulis pengalaman perubahan perilaku sehat dan refleksi nilai moral yang mendasari tindakan tersebut (Yusu & Sulaiman, 2024)<sup>9</sup>. Evaluasi program menunjukkan kegiatan yang melibatkan aksi nyata (proyek dan pelayanan) lebih efektif menumbuhkan kebiasaan sehat dan karakter daripada kegiatan berbasis ceramah saja (Nur'aeni & Mupid, 2021b)<sup>10</sup>.

#### **D. Kolaborasi guru, orang tua, dan masyarakat dalam pembentukan karakter siswa**

Pembentukan karakter berkelanjutan memerlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat karena lingkungan sosial memperkuat atau meniadakan pesan nilai yang diajarkan di sekolah. Model kolaborasi yang berhasil biasanya meliputi komunikasi reguler antara guru dan orang tua (mis. catatan perilaku, pertemuan parenting), program sekolah-komunitas (mis. bazar kesehatan, gotong royong), dan keterlibatan stakeholder lokal (puskesmas, tokoh masyarakat) sebagai mitra pembelajaran (Sudiningtiyas et al., 2025)<sup>110</sup>. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah yang berkaitan dengan kesehatan seperti pendampingan proyek hidup sehat atau sosialisasi gizi memperbesar kemungkinan transfer praktik sehat ke rumah (Putranti et al., 2021)<sup>111</sup>. Selain itu, kolaborasi berbasis komunitas meningkatkan legitimasi nilai moral yang diajarkan karena siswa melihat pola perilaku yang konsisten di berbagai lingkungan sosial. The journal of social and economic education Pentingnya Menanamkan Pendidikan Nilai Di Indonesia Dalam Membentuk Karakter. In *Jurnal Eduksos: Vol. X* (Issue 2).

---

<sup>110</sup> Sudiningtiyas, A., Novani, D., Tri Rahayu, M., & Trisnawati, E. (2025). Kajian Literatur tentang Peran Kolaborasi Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i5.8575>

<sup>111</sup> Putranti, D., Supriyanto, A., & Kurniawan, S. J. (2021). Strategi Kolaborasi Guru Bimbingan Dan Konseling dengan Orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa SMP. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 37–41. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v5i1.949>

(Hidayat & Subando, 2024)<sup>112</sup>. Penting pula bagi guru untuk diberi pelatihan tentang keterampilan komunikasi keluarga serta metode melibatkan komunitas agar kolaborasi berjalan terencana dan terukur (Mu'awanah & Nurmala, 2024)<sup>113</sup>. Sinergi antara model pembelajaran integratif, desain kurikulum berbasis nilai, kegiatan PKn yang berorientasi aksi, dan kolaborasi lintas-ekosistem pendidikan membentuk kerangka kerja terpadu untuk menanamkan kesehatan dan karakter pada peserta didik (Negeri et al., 2019b)<sup>114</sup>. Untuk praktik, disarankan sekolah merancang silabus PKn yang memuat indikator afektif dan psikomotorik terkait kesehatan, menerapkan proyek layanan masyarakat sebagai penilaian autentik, serta membangun mekanisme kolaborasi formal dengan orang tua dan Lembaga Kesehatan setempat (Ummah et al., 2024)<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> Hidayat, M., & Subando, J. (2024). *Strategi Penanaman Nilai-Nilai Karakter Dalam Mencegah Degradasi Moral Siswa Pada Era Digital*. <https://jurnaldidaktika.org>

<sup>113</sup> Mu'awanah, E., & Nurmala, I. (2024). *Analisis Integrasi Ranah Afektif, Kognitif, dan Psikomotorik dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah: Perspektif Kurikulum Merdeka*.

<sup>114</sup> Negeri, S. S., Kecamatan Enok, P., & Hilir, I. (2019b). *Penerapan Model Pembelajaran Integratif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Murid Kelas V SD Negeri 007 Pusaran Tahun*



## **BAB VII**

### **Peran Guru Dan Sekolah Sebagai Agen Pembentukan Karakter Dan Kesehatan**

Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam sebuah lembaga pendidikan menjadi sebuah tolak ukur akan keberhasilan dari Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu pendidik yang profesional karena mereka berperan penting di dalam membina sikap dan perilaku siswa, maka dari itu kompetensi supaya guru Pendidikan Pancasila mampu untuk meningkatkan mutu dari Pendidikan.<sup>115</sup>

#### **1. Guru PKN Sebagai Teladan Dan Motivator**

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi kunci utama keberhasilan proses pembelajaran di sekolah (Rohmawati, 2015). Menurut Yunas & Rachmawati (2018), peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti adanya cita-cita atau harapan yang ingin dicapai siswa yang sejalan dengan perkembangan dirinya (Molo, Parwata & Semarayasa, 2021). Pertumbuhan kepribadian individu juga turut mendorong terbentuknya motivasi kuat untuk meraih tujuan tersebut. Selain itu, kemampuan serta kecakapan yang dimiliki masing-masing siswa turut memperkokoh motivasi belajar yang diberikan guru. Lingkungan belajar yang kondusif dan sehat pun akan membuat siswa semakin termotivasi sehingga prestasi mereka cenderung meningkat.

Dalam mata pelajaran PKN, guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan motivasi siswa sebagai generasi penerus bangsa. Guru PKN diharapkan mampu membangun karakter positif pada siswa, seperti kedisiplinan, sopan santun, dan sikap saling membantu. Sebagai pemberi motivasi sekaligus teladan, guru harus menunjukkan perkataan, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan nilai moral yang baik. Keteladanan menjadi metode pendidikan yang sangat efektif untuk membimbing, mempersiapkan, dan mengembangkan potensi siswa.

Sebagai seorang motivator, guru dituntut mampu menumbuhkan kemampuan belajar siswa serta kreatif dalam memupuk semangat belajar mereka agar kualitas pembelajaran

---

<sup>115</sup> Endang Komara, Rodin Komarudin, and Dewi Andiani Rahlan Santika, 'Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan

Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Karakter Siswa Melalui Profil Pelajar Pancasila', *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*42.

meningkat secara optimal. Dalam proses belajar mengajar, guru PKN tentu menghadapi beragam karakter siswa. Misalnya, seorang siswa mungkin merasa kecewa ketika mendapatkan hukuman karena terlambat atau tidak mengerjakan tugas.<sup>116</sup>

Guru PKN juga harus mampu menerapkan nilai-nilai moral Pancasila dalam kesehariannya. Misalnya, ketika guru mengajarkan siswa untuk berlaku adil, hidup dalam semangat gotong royong, atau bersikap disiplin, hal tersebut merupakan ajaran yang benar. pembelajaran berikutnya karena siswa tidak lagi mempercayai perkataan guru tersebut. Guru Pendidikan Pancasila memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa di sekolah. Tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pelajaran, mereka juga menjadi figur panutan yang perilaku dan sikapnya dapat dicontoh oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui keteladanan yang ditunjukkan di kelas, guru membantu siswa memahami nilai moral dan etika serta mendorong mereka untuk mempraktikkannya dengan cara yang bertanggung jawab.

Motivasi yang diberikan guru sangat mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Banyak siswa sebenarnya mampu memperoleh hasil yang baik, namun kurangnya motivasi membuat mereka tidak dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Kehadiran guru yang aktif memberi bimbingan, perhatian terhadap kebutuhan siswa, serta memanfaatkan media belajar yang kreatif menjadi kunci terciptanya disiplin dan suasana belajar yang positif.<sup>117</sup>

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran dan keteladanan nyata dalam bersikap, guru PKn menjadi penggerak yang membentuk budaya disiplin di sekolah. Upaya ini membantu siswa tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam diri mereka sebagai bekal menuju masa depan. Guru PKn berperan menjadi contoh nyata bagi peserta didik dalam menjalankan aturan sekolah. Keteladanan tersebut terlihat dari sikap disiplin guru seperti hadir tepat waktu, berpakaian rapi, menjaga ketertiban lingkungan sekolah, menjunjung nama baik sekolah, serta menaati tata

---

<sup>116</sup> Wika Tri Hamidah and Agus Satmoko Adi, 'Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Nasionalisme Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pucuk Lamongan', *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*.

<sup>117</sup> Diana Eka Cahya, Erwin Susanto, and Aris Riswandi Sanusi, 'Peran Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Siswa SMPN 3 Karawang Barat', *Journal of Education Research*, 5.4 (2024), 4410–17 (p. 3).

tertib tanpa pengecualian. Perilaku positif yang ditampilkan guru PKn ini memberikan pengaruh kuat kepada siswa untuk meniru sikap yang sama dalam kehidupan sehari-hari sekolah. Guru PKn berperan menjadi contoh nyata bagi peserta didik dalam menjalankan aturan sekolah. Keteladanan tersebut terlihat dari sikap disiplin guru seperti hadir tepat waktu, berpakaian rapi, menjaga ketertiban lingkungan sekolah, menjunjung nama baik sekolah, serta menaati tata tertib tanpa pengecualian. Perilaku positif yang ditampilkan guru PKn ini memberikan pengaruh kuat kepada siswa untuk meniru sikap yang sama dalam kehidupan sehari-hari sekolah.

Peran ganda guru PKn sebagai teladan dan motivator menjadi bagian penting dalam menciptakan budaya sekolah yang aman, tertib, serta mendukung perkembangan karakter siswa secara optimal. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan kedisiplinan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi yang berakhlak dan mampu menjaga nama baik sekolah serta bangsanya.<sup>118</sup>

## 2. Sekolah Sebagai Lingkungan Sosial Yang Membentuk Budaya Sehat dan Berkarakter



Sekolah berperan penting sebagai ruang sosial yang mendidik siswa bukan hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membangun karakter dan budaya positif yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Lingkungan sekolah harus mampu membentuk nilai-nilai moral, sikap, dan kebiasaan positif melalui pembiasaan, keteladanan, dan interaksi sosial yang sehat.

Sekolah yang memiliki budaya positif seperti suasana belajar yang nyaman, penghargaan terhadap keberagaman, dan pembiasaan perilaku baik akan lebih efektif dalam

---

<sup>118</sup> Marta Da Rince, Gisela Nuwa, and Petrus Kpalet, 'Peran Guru Pkn Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik', *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*, 8.1 (2021), 49–56 (p. 4).

membentuk generasi yang bermoral kuat dan mampu hidup sehat secara sosial maupun emosional. Pendidikan karakter yang dilaksanakan melalui integrasi kurikulum, kegiatan sosial, program ekstrakurikuler, dan kerja sama dengan keluarga menjadi kunci dalam membangun budaya sehat dan berkarakter di lingkungan sekolah.<sup>119</sup> Dalam dunia pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik sekaligus membentuk karakter peserta didik. Salah satu aspek yang kerap kurang diperhatikan adalah terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif bagi proses pembelajaran. Lingkungan sekolah yang sehat tidak hanya berdampak pada kondisi fisik siswa, tetapi juga berpengaruh terhadap minat dan motivasi mereka dalam belajar. Lingkungan sekolah yang sehat tidak hanya meningkatkan minat belajar siswa, tetapi juga memperkuat hubungan positif antara siswa dengan guru, staf sekolah, maupun teman sebaya. Relasi yang baik ini merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses pembelajaran.<sup>120</sup>

Pendidikan karakter perlu diwujudkan melalui berbagai budaya sekolah yang dilakukan secara konsisten setiap hari, sehingga pembiasaan tersebut tertanam dan menjadi bagian dari kepribadian siswa dalam hidup bermasyarakat. Implementasi budaya sekolah tidak hanya menguatkan aspek akademik, tetapi juga memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam bertindak sesuai nilai moral. Dengan melibatkan seluruh warga sekolah kepala sekolah, guru, staf, serta siswa sekolah menciptakan lingkungan yang sehat, kondusif, dan sarat nilai etika. Budaya seperti kegiatan religius rutin, pembiasaan hidup bersih, kerja sama dalam kelompok, dan menjaga ketertiban sekolah adalah bentuk nyata peran sekolah sebagai ruang sosial yang mempengaruhi perkembangan karakter siswa secara menyeluruh.<sup>121</sup> Program-program sekolah yang dirancang secara terstruktur, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler seperti shalat berjamaah, kegiatan kepemimpinan, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial dan olahraga, memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk menerapkan nilai karakter seperti tanggung jawab, kreativitas, percaya diri, kemandirian, dan

---

<sup>119</sup> Elfrianto, 'Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Lingkungan Sekolah Sebagai Upaya Membentuk Pondasi Moral Generasi Penerus Bangsa', *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4.1 (2021), 113–25 (p. 5).

<sup>120</sup> Andreas Yoga Sabatyasno and Henry Aditia Rigianti, 'Upaya Menjaga Kondisi Sekolah Yang Sehat Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas Iii: Tinjauan Terhadap Kesiapan Sekolah Dalam Menciptakan Budaya Sekolah Sehat', *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9.04 (2023), 1220–32 (p. 6).

<sup>121</sup> Nathalia Yohana Johannes, Samuel Patra Ritiauw, and Hartini Abidin, 'Implementasi Budaya Sekolah Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter Di Sd Negeri 19 Ambon', *PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogika Dan Dinamika Pendidikan*, 8.1 (2020), 11–23 (p. 7).

kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keterlibatan seluruh warga sekolah, budaya positif tersebut menjadi ciri khas yang menguatkan identitas sekolah sebagai lingkungan yang sehat dan berkarakter. Melalui penerapan budaya sekolah yang konsisten, karakter siswa terbentuk bukan hanya dari teori, tetapi dari praktik nyata yang mereka jalani setiap hari. Sekolah menjadi ruang utama bagi siswa untuk membangun moralitas, etika, dan kebiasaan baik sehingga terbiasa bersikap adil, amanah, serta mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya secara positif. Hal ini menjadikan sekolah sebagai agen penting dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan siap berkontribusi dalam masyarakat.<sup>122</sup>

### 3. Program Sekolah: UKS, Kegiatan Sosial Dan Pendidikan Karakter Terintegrasi



Program sekolah yang mengintegrasikan UKS, kegiatan sosial, dan pendidikan karakter terbukti memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan karakter peserta didik, khususnya dalam membentuk kebiasaan hidup sehat, kepedulian sosial, dan sikap bertanggung jawab. Melalui perencanaan yang sistematis, pelaksanaan program yang berbasis pembiasaan, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya masyarakat berkarakter.

Pendidikan karakter hidup sehat bisa diberikan melalui program-program khusus dibuat oleh sekolah. Misalnya melalui program Usaha kesehatan Sekolah sebagai unit kesehatan disekolah yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan hidup

---

<sup>122</sup> Wulan Wardani and Faridah Faridah, 'Abstrak : Gambaran Dan Cara Penerapan Budaya Siswa Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Biruni Makassar Berdasarkan Uraian Lanjut Mengenai Budaya Sekolah Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah Al-Biruni Menurut Koentjaraningrat Terdapat Tiga Wujud Kebudayaan', 2021, 118–26 (p. 8).

sehat di sekolah dan juga kemampuan hidup sehat bagi setiap warga sekolah.<sup>123</sup> Program sekolah yang menggabungkan UKS, kegiatan sosial, dan pendidikan karakter memiliki kontribusi penting dalam membentuk lingkungan pendidikan yang sehat dan berkarakter. Pelaksanaan UKS melalui konsep Trias UKS pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, tetapi juga mempengaruhi pembentukan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kepedulian, dan kerja sama antar warga sekolah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif karena mampu meningkatkan kesadaran dan keterampilan siswa dalam menjaga kesehatan serta menolong sesama saat terjadi kondisi darurat.

Dengan demikian, pelaksanaan Program UKS, kegiatan sosial, dan pendidikan karakter yang terintegrasi dapat menjadi dasar pembentukan budaya sekolah yang sehat secara fisik sekaligus bermoral sosial, sehingga berkontribusi nyata pada terciptanya masyarakat berkarakter.<sup>10</sup>

Program UKS, kegiatan sosial, dan pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah berfungsi sebagai upaya terpadu untuk membentuk peserta didik yang sehat, peduli, dan berkarakter kuat. Melalui pelaksanaan UKS, sekolah tidak hanya menyediakan layanan kesehatan dasar, tetapi juga menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta membangun kepedulian siswa terhadap kesehatan diri dan lingkungannya. 1 Integrasi antara UKS, kegiatan sosial, dan pendidikan karakter ini memungkinkan siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai yang dipelajari secara langsung. Misalnya, melalui pendampingan UKS ke sekolah tingkat SLTP, siswa tidak hanya mengimplementasikan pengetahuan kesehatan, tetapi juga mengembangkan kepemimpinan, jiwa sosial, kemampuan komunikasi, serta rasa tanggung jawab sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, program UKS yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial dan pendidikan karakter memberikan kontribusi nyata dalam membentuk peserta didik yang sehat secara fisik, emosional, dan sosial, sekaligus memiliki kepribadian kuat serta mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Mila Suharmita and Rudi Hariawan, 'Manajemen Layanan Khusus Dalam Membentuk Karakter Hidup Sehat Siswa Melalui Pendekatan Program Usaha Kesehatan Sekolah', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan*, 12.April (2024), 270–80 (p. 9) <<https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary>>. <sup>10</sup>

<sup>124</sup> Santy Dwi Kristina and others, 'INDRA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pembekalan Duta Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) SMK Kesehatan Binatama Yogyakarta', 5.1 (2024), p. 11.

Dalam konteks pengembangan program sekolah, UKS dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sosial dan pendidikan karakter. Misalnya, pembentukan “dokter cilik” bukan hanya mengenalkan siswa pada dasar-dasar kesehatan, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap sesama. Pelatihan P3K juga menjadi sarana pembelajaran sosial yang melatih keberanian, empati, serta kemampuan mengambil keputusan dalam situasi darurat.<sup>2</sup> Kegiatan lain seperti pembuatan apotek hidup dapat mengintegrasikan pembelajaran lingkungan, gotong royong, dan kemandirian. Melalui penanaman tanaman obat, siswa belajar mengenai kesehatan berbasis alam, merawat lingkungan, sekaligus menginternalisasi karakter peduli dan cinta lingkungan.

Pelaksanaan program UKS yang dikombinasikan dengan kegiatan sosial dan pendidikan karakter dapat dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa program berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata pada perilaku siswa. Edukasi dan praktik yang diberikan mulai dari kebersihan diri, pengenalan obat, pertolongan pertama, hingga pembiasaan hidup sehat akan memperkuat perilaku positif yang mendukung tumbuh kembang anak secara utuh.<sup>125</sup> Program UKS berperan memperkuat budaya hidup bersih dan sehat melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pembiasaan menjaga kebersihan, serta layanan pendukung yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. UKS juga menjadi instrumen penting dalam mendidik siswa tentang kesehatan diri, pencegahan penyakit, dan gaya hidup sehat, sejalan dengan misi menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan asri. Kegiatan sosial, seperti pembiasaan filantropi, gotong royong, serta aksi kemasyarakatan, menjadi bagian dari strategi sekolah dalam menumbuhkan kepedulian sosial siswa. Pengalaman pandemi yang menumbuhkan budaya solidaritas dan tolong-menolong dijadikan pijakan untuk membangun program kegiatan sosial yang konsisten dan terencana. Kegiatan ini menanamkan nilai bermanfaat bagi sesama sebagai jati diri warga sekolah. Pendidikan karakter terintegrasi diwujudkan melalui kurikulum yang menyatukan nilai agama, moral, dan ilmu pengetahuan. Penguatan akhlak, pembiasaan ibadah, dan karakter Profil Pelajar Pancasila menjadi bagian integral dari pembelajaran, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Program seperti pembiasaan pagi, kegiatan tahfidz, karakter building, dan pembelajaran aplikatif menunjukkan bahwa sekolah menempatkan pembentukan karakter sebagai prioritas

---

<sup>125</sup> Ahmad Yasar Ramdan and others, ‘Revitalisasi UKS Melalui Edukasi Pelaksanaan Program Layanan Trias UKS Pada Siswa Di SDN 1 Gelora’, *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4.1 (2025), 28–36 (p. 12).

utama.<sup>13 126</sup>Selain itu, perhatian terhadap isu lingkungan termasuk perubahan iklim mendorong sekolah mengembangkan program peduli lingkungan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Kegiatan sosial yang dilakukan sekolah, seperti gotong royong membersihkan lingkungan, pemilahan sampah, dan penanaman pohon, terbukti efektif dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial pada siswa. Aktivitas nyata tersebut memperkuat pembiasaan karakter positif, sekaligus mengembangkan kemampuan bekerja sama dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam program lingkungan dan kesehatan memungkinkan siswa untuk tidak hanya mengetahui konsep etika lingkungan, tetapi juga membiasakan diri dengan perilaku yang mencerminkan nilai moral, seperti disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan sikap positif dan komitmen siswa terhadap perilaku ramah lingkungan dan hidup sehat. <sup>13</sup>

#### **4.Evaluasi Peran Institusi Pendidikan Dalam Menciptakan Masyarakat Berkarakter**

Institusi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi berkarakter yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui proses pembelajaran yang terstruktur, lembaga pendidikan tidak hanya berkewajiban mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga membangun nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial pada peserta didik. Namun, efektivitas peran tersebut masih perlu dievaluasi secara menyeluruh.<sup>1</sup> Salah satu instrumen utama dalam pembentukan karakter adalah pendidikan kewarganegaraan, yang berfungsi menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kedisiplinan, toleransi, gotongroyong, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Meskipun demikian, praktik implementasinya menunjukkan bahwa lembaga pendidikan belum sepenuhnya berhasil menginternalisasikan nilai tersebut ke dalam perilaku mahasiswa. Masih banyak mahasiswa yang melihat mata kuliah tersebut hanya sebagai tuntutan akademik, bukan sebagai bagian penting dari pembentukan kepribadian.

Selain itu, ketergantungan peran pembentukan karakter pada dosen atau guru menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan profesional dan dukungan kelembagaan agar

---

<sup>126</sup> Hana Catur Wahyuni, 'Strategic Planning Model for Islamic-Based Elementary School Development : Model Perencanaan Strategis Pengembangan Sekolah Dasar Berbasis Islam', 20.1 (2025), 1–11 (p. 13).



pendidik dapat berfungsi secara optimal sebagai model perilaku dan pembimbing moral. Evaluasi juga menunjukkan bahwa kerja sama antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat belum berjalan maksimal untuk menciptakan budaya sekolah yang mendukung pembentukan karakter.<sup>127</sup> Di lapangan, proses pembentukan karakter belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidikan karakter sering kali hanya dilihat sebagai formalitas kurikulum, bukan sebagai budaya yang hidup dalam keseharian peserta didik. Banyak lembaga pendidikan yang belum mampu mengimplementasikan strategi penanaman karakter secara konsisten atau menyeluruh, baik melalui keteladanan guru, lingkungan sekolah, maupun kegiatan nonakademik.

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan inovasi metode pembelajaran, rendahnya pembiasaan nilai melalui praktik langsung, serta kurangnya sinergi antara pendidik, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, fasilitas, kurikulum yang padat, dan fokus berlebihan pada capaian akademik juga menghambat pembangunan karakter secara menyeluruh. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan inovasi metode pembelajaran, rendahnya pembiasaan nilai melalui praktik langsung, serta kurangnya sinergi antara pendidik, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, fasilitas, kurikulum yang padat, dan fokus berlebihan pada capaian akademik juga menghambat pembangunan karakter secara menyeluruh.<sup>128</sup> Evaluasi terhadap pengembangan kurikulum berbasis karakter menunjukkan bahwa institusi pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk masyarakat yang berkarakter kuat. Lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai agen pembentukan nilai moral, etika, dan kebiasaan positif yang menjadi dasar karakter peserta didik.

Melalui kurikulum berbasis karakter yang dirancang, diterapkan, dipantau, dan dievaluasi secara berkelanjutan, institusi mampu menanamkan nilai-nilai yang esensial bagi kehidupan sosial, seperti tanggung jawab, integritas, kedisiplinan, dan empati. Evaluasi kurikulum memperlihatkan bahwa sekolah dan lembaga pendidikan perlu melakukan penyempurnaan berkelanjutan agar proses pembelajaran tidak hanya mengajarkan pengetahuan kognitif, tetapi juga membentuk perilaku dan sikap yang konsisten dengan nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Peran institusi pendidikan semakin penting karena berbagai tantangan sosial seperti degradasi moral, penyalahgunaan teknologi, hingga perilaku menyimpang di kalangan remaja menunjukkan lemahnya penerapan nilai karakter di lingkungan masyarakat. Dengan

---

<sup>127</sup> 12 Elfrianto, p. 15.

<sup>128</sup> Anisa Amalia Maisaroh and Sri Untari, 'Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045', *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7.47 (2024), 18–30 (p. 16).

demikian, evaluasi program pendidikan karakter menegaskan bahwa sekolah harus lebih fokus mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam seluruh aktivitas belajar, baik melalui keteladanan guru, pembiasaan perilaku, aturan disiplin, maupun penciptaan lingkungan belajar yang positif.<sup>129</sup> Evaluasi program pendidikan karakter menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang berkarakter kuat.

Melalui peninjauan konteks, terlihat bahwa institusi pendidikan mampu menjadi ruang yang menanamkan nilai moral, etika, dan keterampilan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kepadatan kurikulum dan kurangnya alokasi waktu khusus untuk pembinaan karakter mahasiswa.<sup>2</sup> Pada aspek masukan (input), peran institusi tampak melalui penyediaan sumber daya, pelatihan tenaga pendidik, serta pengembangan perangkat pembelajaran yang mendukung internalisasi nilai karakter. Kualitas dan kesiapan pendidik menjadi faktor penting karena merekalah yang memastikan integrasi nilai karakter dalam proses belajar.<sup>2</sup> Melalui evaluasi proses, terlihat bahwa institusi pendidikan sudah berupaya mengimplementasikan kegiatan pembinaan karakter melalui aktivitas terstruktur. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pengintegrasian nilai karakter ke dalam pembelajaran akademik, serta mekanisme pencatatan dan penilaian sikap yang lebih konsisten.<sup>130</sup>

Evaluasi terhadap dinamika pendidikan karakter menunjukkan bahwa institusi pendidikan memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama dalam membentuk masyarakat yang berkarakter kuat. Lembaga pendidikan tidak hanya menjadi pusat pengajaran ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai wadah internalisasi nilai moral, etika, dan akhlak yang menjadi dasar keharmonisan sosial. Berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun, pendidikan karakter dipandang sebagai fondasi bagi terbentuknya peradaban yang sehat. Melalui analisis ini, tampak bahwa institusi pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran moral, membangun akhlak mulia, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan integritas kepada peserta didik. Namun, evaluasi praktik di lapangan menunjukkan bahwa peran ini belum sepenuhnya optimal, terutama karena tantangan modern seperti pengaruh media sosial, perubahan nilai budaya, dan orientasi pendidikan yang masih menitikberatkan aspek kognitif. Peran institusi pendidikan juga dievaluasi dari kemampuannya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan moral siswa. Dukungan keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan menjadi bagian penting yang harus bersinergi, karena pendidikan karakter tidak

---

<sup>129</sup> M. Imam Thonthowi, 'Jurnal Pendidikan Indonesia Pengembangan Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5.01 (2024), 18–26 (p. 17).

<sup>130</sup> Agus Salim and others, 'Evaluasi Program Pendidikan Karakter Pada Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran ( PIP ) Makassar Dengan Model CIPP', 1, 13.1 (2024), 115–28 (p. 18).

dapat berjalan secara terpisah. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pembentukan karakter membutuhkan keterpaduan antara institusi pendidikan dan lingkungan sosial.<sup>131</sup>

Evaluasi terhadap peran institusi pendidikan, khususnya madrasah, menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan masyarakat berkarakter sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan budaya organisasi yang dikembangkan di lingkungan lembaga pendidikan. Kepala madrasah sebagai pemimpin visioner memiliki peran sentral dalam mengarahkan lembaga agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter yang kuat dan berintegritas. Dalam praktiknya, institusi pendidikan berperan membentuk karakter masyarakat melalui integrasi nilai spiritual, pembiasaan perilaku bermoral, dan internalisasi budaya yang berorientasi pada integritas. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas peran ini sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam menghadirkan budaya belajar yang inklusif, iklim organisasi yang kolaboratif, serta keteladanan pemimpin. Madrasah yang berhasil menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan etika melalui program terstruktur terbukti lebih mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter kuat.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Zayin Nafsaka and others, 'Dinamika Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Ibnu Khaldun: Menjawab Tantangan Pendidikan Islam Modern', *Jurnal Impresi Indonesia*, 2.9 (2023), 903–14 (p. 19).

<sup>132</sup> Muwafiqus Shobri, 'Peran Kepala Madrasah Sebagai Leader Visioner: Strategi Penguatan Mutu Dan Integritas Lembaga Pendidikan Islam', *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3.3 SE-Articles (2025), 191–210 (p. 20)

## **BAB VIII**

### **TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT DAN BERKARAKTER**

Kesehatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama dan tidak boleh diabaikan. Jika masyarakat sehat, bukan hanya orang per individu yang merasakan manfaatnya, tapi juga bisa mendorong kemajuan ekonomi dan sosial di suatu negara. Meski begitu, masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar semua orang bisa hidup dengan kondisi kesehatan yang baik. Menurut Sukarno (2009), keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada seberapa aktif masyarakat ikut menjaga kesehatannya sendiri. Kesehatan masyarakat juga terkait akan sosial dan perkembangan masyarakat.<sup>133</sup>

#### **1. Globalisasi dan Degradasi Moral di Kalangan Generasi Muda**

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, pendidikan sering kali fokus pada pencapaian akademis saja. Kebutuhan akan pemahaman moral, etika, dan nilai-nilai sosial juga harus ditekankan dalam kurikulum pendidikan. Keluarga, lingkungan tempat tinggal, tempat belajar, dan teman bergaul adalah sumber yang memengaruhi krisis moral anak muda. Pembentukan karakter yang komprehensif dapat dilakukan dengan menekankan pada nilai-nilai etika, tanggung jawab, empati, dan saling menghormati dapat membantu membangun warga negara yang memiliki integritas moral dan etika yang baik.

Globalisasi yang terlihat miris adalah perubahan moral dan akhlak, tentu saja ini akan berpengaruh pada diri mereka baik dalam tingkah laku gaya bicara dan sikap toleransi, sehingga menimbulkan sejumlah permasalahan karena remaja langsung menyikapi tanpa memikirkan apa yang mereka ikuti<sup>2</sup>. Untuk membangun masyarakat yang berkarakter unggul ada beberapa tantangan yang harus di hadapi antara lain:

---

<sup>133</sup> Ambia Nurdin et al., “Membangun Masyarakat Sehat: Tantangan Dan Solusi,” 2023, 1. <sup>2</sup> Arya Chandra Wiguna and Dinie Anggraeni Dewi, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Moralitas Bangsa,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 24–29.

1. Pendidikan karakter: dalam pendidikan karakter, perlu di perhatikan proses pembentukan karakter yang holistik dan konsisten.
2. Pengaruh lingkungan: tantangan yang di hadapi adalah membangun lingkungan yang mendukung karakter unggul, serta menghadapi pengaruh negatif yang dapat merusak karakter individu.
3. Perubahan nilai-nilai: Penting untuk terus mengkaji nilai-nilai yang di perlukan untuk membangun karakter unggul dalam masyarakat. Karena, masyarakat mudah berubah dan terpengaruh oleh perkembangan teknologi.<sup>134</sup>

Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan karakter harus meliputi, olah pikir di mana seorang pelajar harus mampu berpikir cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, dan berorientasi kepada IPTEK. Olah hati di mana seseorang harus mampu menumbuhkan kepribadian yang beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriot. Olah rasa, menciptakan kepekaan terhadap perasaan seseorang untuk bersikap ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong. Dan yang terakhir olah raga, yaitu menumbuhkan sikap seseorang harus bersih dan sehat, disiplin, andal, bersahabat, koperatif, kompetitif, ceria serta gigih.

Globalisasi juga memengaruhi nilai moral masyarakat yang mengakibatkan nilai-nilai moral merosot, terutama pada perilaku yang menunjukkan ketidakpedulian, tidak menghargai dan menghormati orang lain. Generasi muda belum bisa menyaring kebudayaan-kebudayaan luar yang terus memengaruhi generasi muda.<sup>135</sup> Globalisasi telah mengubah segalanya, mulai dari aktivitas bahkan karakter dan moral manusia termasuk jiwa nasionalisme generasi muda. Era globalisasi membawa beberapa dampak negatif diantaranya:

1. Perilaku Konsumtif

---

<sup>134</sup> Paul Tan Istandar, "Menyelaraskan Pendidikan Akademis Dan Moral Dalam Membangun Masyarakat Berkarakter Unggul," *Jurnal Suara Pengabdian* 45 1, no. 1 (2022): 3.

<sup>135</sup> Saepul Iskandar, "Pentingnya Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila Bagi Generasi Muda Dalam Mengatasi Degradasi Moral," *Jurnal Pembedaan Pancasila* 2, no. 2 (2022): 4.

Banyaknya barang yang di hasilkan oleh pesatnya perkembangan industri, menjadi masyarakat semakin konsumtif karena membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan melainkan hanya rasa ingin memilikinya saja sehingga menimbulkan pemborosan.

## 2. Gaya hidup kebarat-baratan

Banyak masyarakat Indonesia yang menyukai budaya barat karena menganggap budaya barat lebih modern dibanding budaya sendiri. Hal ini membuat lunturnya rasa cinta dan bangga terhadap budaya Indonesia.

## 3. Kesenjangan sosial

Munculnya kesenjangan sosial dimasyarakat akibat adanya perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengikuti arus globalisasi, sehingga terdapat jurang pemisah antara masyarakat.<sup>136</sup>

Berdasarkan dampak negatif yang telah di jelaskan dapat dilihat bahwa nilai-nilai moral generasi muda merosot, terutama perilaku ketidakpedulian dan menghargai orang lain. Krisis moralitas ini terlihat pada kurangnya kesadaran tentang apa arti moral itu sendiri, kasus tersebut disebabkan karena pendidikan Indonesia belum mampu membangun karakter bangsa<sup>137</sup>.

## 2. Kurangnya Keteladanan dan Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter

Keluarga merupakan pilar utama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang di lakukan oleh orang lain. Keluarga yang harmonis, rukun, dan damai akan memengaruhi psikologi dan karakter anak. Namun, di era perkembangan zaman yang semakin maju banyak faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perkembangan karakter anak.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Fatma Ulfatun Najicha Elisa uspita Ratri, "Urgensi Pancasila Dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda di Era Globalisasi," *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 5.

<sup>137</sup> Nasya'a Nadyah Aisyah and Nur Fitriatin, "Krisis Moral Dan Etika Di Kalangan Generasi Muda Indonesia Dalam Perspektif Profesi Guru," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 329–337.

<sup>138</sup> Resky Amalia, Fiptar Abdi Alam, and Stkip Muhammadiyah Barru, "Peran Keluarga Dalam Membentuk Perilaku Anak. Volume 10," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 10, no. 1 (2023): 1–13.

Ada beberapa faktor yang menghambat dalam pembentukan karakter anak antara lain:

1. Orang tua

Kesibukan orang tua dapat menghambat proses pembentukan karakter anak, sehingga anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang.

2. Keterbatasan waktu belajar di sekolah

Kurangnya waktu belajar di sekolah dengan muatan kurikulum yang begitu padat, sehingga para pendidik lebih fokus kepada psikomotorik anak dan lebih mengesampingkan aspek efektif anak.

3. Lingkungan

Lingkungan pergaulan anak zaman sekarang jauh dari nilai-nilai keislaman yang tentunya akan berpengaruh pada anak dan melunturkan nilai-nilai yang sudah di tanamkan dari keluarga ataupun sekolah.

4. Media sosial

Kemajuan teknologi dan media sosial banyak memberikan dampak negatif pada perkembangan anak.<sup>139</sup>

Pengajaran nilai-nilai moral, pembiasaan perilaku baik, keteladanan orang tua, serta komunikasi efektif antara orang tua dan anak merupakan faktor yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Untuk menciptakan suatu pola pengasuhan yang mendukung pengembangan karakter anak dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Pengajaran nilai-nilai moral yang kuat di rumah

Mengajarkan perilaku yang baik dan buruk. Orang tua yang secara aktif melakukan pengajaran nilai moral akan membantu membentuk karakter mereka.

2. Pembiasaan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari

Kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua akan membentuk pola perilaku pada mereka seperti berbicara dengan sopan, dan menghormati orang lain. Akan tertanam dalam kehidupan mereka dan perilaku itu akan terbawa hingga mereka dewasa.

---

<sup>139</sup> Anna Karma Yuhana, "Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Era Society 5.0," *Damhil Education Journal* 2, no. 2 (2022): 65.

3. Keteladanan orang tua sebagai model perilaku

Karena anak-anak akan cenderung meniru perilaku orang tuanya, baik dalam berbicara, dan berperilaku. Oleh karena itu, orang tua menjadi teladan pertama untuk menunjukkan perilaku baik yang akan membentuk karakter pada anak.

4. Komunikasi yang efektif dalam keluarga

Karena komunikasi yang terbuka, dan penuh kasih sayang dapat membantu anak merasa dihargai.

5. Kerja sama antara keluarga dan lembaga pendidikan

Pendidikan karakter anak tidak hanya di rumah tetapi juga di sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan sekolah untuk bekerja sama untuk membentuk karakter anak.<sup>140</sup>

Pengawasan dan bimbingan ketika di rumah itu sangat penting karena anak lebih banyak di rumah di bandingkan sekolah. Terutama ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam mendidik karakter anak, memperbaiki jiwa, dan meluruskan perilaku yang menyimpang pada anak. Untuk itu pengawasan dari orang tua penting, apabila lalai sedikit dapat berakibat fatal pada perkembangan karakter anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan nilai-nilai merupakan faktor yang kondusif dalam mempersiapkan pribadi anak.<sup>141</sup>

Pembiasaan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) juga efektif mendukung pendidikan karakter, pembiasaan sederhana yang biasa dilakukan secara konsisten di rumah mampu menciptakan anak lebih empati dan memiliki kontrol sosial yang baik dalam interaksi dengan orang lain. Dengan menerapkan 5S, anak-anak dapat belajar untuk menjadi lebih ramah, sopan, dan menghargai orang lain, sehingga mereka dapat memiliki hubungan yang lebih baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Selain itu, pembiasaan 5S juga dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial yang penting, seperti komunikasi efektif, kerja sama, dan

---

<sup>140</sup> Zulfah, "Peran Keluarga Dalam Membangun Pendidikan Karakter Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian 2* (2024): 61–68.

<sup>141</sup> Wiwi Noviati and Hasil Belajar, "Peran Keluarga Dalam Implementasi Pendidikan Karakter Rejeki Anak," *Jurnal Kependidikan 7*, no. 2 (2022): 19–27,.



penyelesaian konflik. Dengan demikian, orang tua dapat membantu anak-anak mereka menjadi pribadi yang lebih seimbang dan berkarakter baik.<sup>142</sup>

### 3. Tantangan Teknologi dan Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Sehat

Teknologi digital telah memberikan akses tidak terbatas pada informasi dan hiburan, namun juga membawa dampak pada perilaku dan gaya hidup. Kesadaran dan pengetahuan mengenai gaya hidup sehat merupakan aspek penting dalam memastikan kesehatan fisik dan mental anak-anak. Namun, banyak anak-anak yang cenderung kurang memperhatikan kesehatan fisik dan mental akibat pengaruh dari teknologi digital, akses informasi yang tidak terbatas melalui internet memengaruhi bagaimana mereka memahami dan mempraktikkan gaya hidup sehat.<sup>143</sup>

Dengan perkembangan media sosial yang cepat, banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain media sosial. Sehingga mengakibatkan kurang tidur yang berlangsung lama bisa mengganggu kesehatan. Penggunaan media sosial pada anakanak dan remaja mengakibatkan tingkat stres psikologis serta resiko gangguan kecemasan dan depresi. Pengaruh penggunaan media sosial yang terlalu banyak menyebabkan perasaan kesepian dan terisolasi.<sup>144</sup>

Remaja menghadapi sejumlah tantangan kesehatan yang kompleks, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Salah satu tantangannya adalah obesitas, kebiasaan makan makanan yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan cepat saji dan minuman bersoda, serta gaya hidup yang kurang aktif menjadi faktor utama peningkatan obesitas di kalangan remaja. Selain itu, obesitas juga membawa resiko serius

---

<sup>142</sup> Anisa et al., "Membangun Generasi Berkarakter : Kekuatan Pendidikan Dalam Keluarga," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 4 (2025): 175–82.

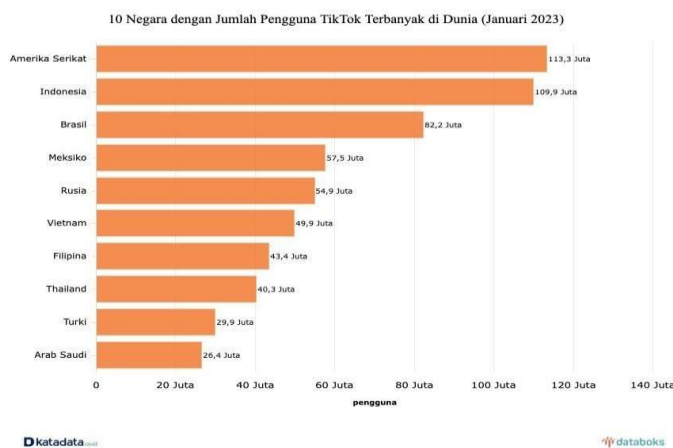
<sup>143</sup> Nur Irmayanti, "Analisis Kesadaran Dan Pengetahuan Anak-Anak Terhadap Gaya Hidup Sehat Di Era Teknologi Digital," *SEMANGGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 02 (2023): 48–54.

<sup>144</sup> Palma Juanta et al., "Pengaruh Konten Media Sosial Edukasi Kesehatan Terhadap Perubahan Perilaku Hidup Sehat Pada Generasi Z," *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi* 4, no. 1 (2025): 1–14.

bagi kesehatan remaja, termasuk peningkatan resiko diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung.<sup>145</sup>

Pesatnya berkembang teknologi mendorong berbagai jenis platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan lain-lain dengan mudah berkembang dan memengaruhi gaya hidup seseorang. Banyak pelajar lebih memperhatikan penampilan karena mengikuti tren di media sosial yang mengakibatkan mereka lebih fokus pada gaya hidup dibandingkan menghadapi masa depan.<sup>146</sup>

Salah satu platform yang sangat berpengaruh terutama pada remaja perempuan adalah Tiktok, dari konten-konten yang dilihat mereka seperti kali terpengaruh dengan konten kreator dan influencer yang mempromosikan suatu barang kemudian muncul



keinginan untuk membelinya. Pada Januari 2023, Indonesia menempati peringkat kedua mencapai angka 109,9 juta setelah Amerika Serikat dari jumlah pengguna Tiktok di berbagai dunia.<sup>147</sup>

<sup>145</sup> Rabindra Aldyan Bintang Mustofa and Mutiara Sari, “Efektivitas Promosi Kesehatan Mental Melalui Media Sosial Dalam Mendorong Perilaku Hidup Sehat Pada Remaja,” *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 212–23.

<sup>146</sup> Khoirina Indah Sari et al., “Analisis Dampak Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,” *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 2, no. 04 (2023): 275–88.

<sup>147</sup> Risky Azizah, Revina Sinta Ananda, and Andhita Risko Faristiana, “Dampak Tiktok Terhadap Gaya Hidup Remaja Perempuan,” *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 4 (2023): 399–414.

#### **4. Kesenjangan Antara Nilai Ideal Pkn dan Realitas Masyarakat**

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pilar penting, meskipun bukan satusatunya dalam membentuk individu menjadi warga negara yang ideal baik di ranah domestik maupun internasional. Suksesnya proses ini bergantung pada berbagai faktor yang saling terkait, termasuk pendekatan pedagogis yang efektif, kolaborasi antara berbagai sektor masyarakat (pendidikan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat sipil), serta kemampuan untuk mengatasi tantangan struktural dan kontekstual.

Pendidikan sudah melakukan perannya dengan menanamkan nilai-nilai moral sebagai pondasi bagi interaksi sosial yang harmonis, mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sosial, berpikir kritis dan analisis, partisipasi aktif dan kolaborasi, komunikasi yang efektif dan respektif, serta pemahaman isu-isu yang kontemporer

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas, tantangan signifikan masih menghalangi pencapaian tujuan utama Pkn. Untuk membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan demokrasi. Terdapat pula kesenjangan antara teori yang diajarkan di kelas dengan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, mengakibatkan relevansi dan dampak pembelajaran yang signifikan. Konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi warga negara yang tidak tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup>

Cita-cita ideal dalam pendidikan karakter mencerminkan harapan agar munculnya generasi yang memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Memahami pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan, bertanggung jawab, empati dan solidaritas, dan menghargai keberagaman. Berikut beberapa pembahasan realitas yang kompleks dalam pendidikan karakter:

##### **1. Pengaruh lingkungan sosial**

---

<sup>17</sup> Khanaya Tabitha Silitonga et al., "Membangun Warga Negara Ideal : Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Indonesia," 2025, 85–93.

Realitas yang kompleks sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitar. Budaya yang korup, kurangnya norma moral yang konsisten, serta tekanan sosial.

2. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan

Ekonomi yang tidak merata, yang mengakibatkan sebagian masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

3. Tantangan teknologi dan media sosial

Konten negatif yang tersebar luas di media sosial dapat memengaruhi nilai-nilai dan perilaku, sehingga menghambat pembentukan karakter yang positif.

4. Pergaulan sebaya dan budaya pop

Pergaulan sebaya dan budaya pop sering tidak sejalan dengan nilai-nilai moral yang diharapkan dalam pendidikan karakter.

5. Tantangan dalam implementasi kurikulum

Keterbatasan waktu dan sumber daya, hingga kurangnya penekanan yang cukup pada pembentukan karakter dalam evaluasi akademik.

6. Kesenjangan antara rumusan kebijakan dan praktik lapangan

Implementasi lapangan sering terhambat seperti kurangnya pemahaman guru atau prioritas lebih tinggi pada prestasi akademik.<sup>148</sup>

Untuk menjembatani kesenjangan antara realitas dan ideal multikulturalisme, langkah awal adalah memahami bahwa realitas sosial dari masyarakat multikultural bersifat dinamis dan terus berkembang. Multikulturalisme tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas keberagaman, tetapi juga isu-isu keadilan, pengakuan identitas, dan etika kehidupan bersama.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Fiki Adelia Stefani and Nadila Meylina, "Pendidikan Karakter Bangsa Antara Cita - Cita Dan Realita," *JIMI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2024): 57–61, 103.

<sup>149</sup> Tirta Alim et al., "Multikulturalisme Sebagai Wacana Kritis." 25, no. 2 (2025): 324–336.

Aksi radikalisme berdampak dan mengancam ketahanan nasional khususnya pada pasca gatra yaitu.

1. Ancaman terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945  
Merebut kekuasaan dan mengganti ideologi negara Pancasila dan UUD 1945 dengan dasar negara yang bersumber dari ideologi dan ajaran keagamaan.
2. Ancaman terhadap keutuhan politik  
Aksi radikalisme mengancam keutuhan nasional, menurunkan kepercayaan negara luar terkait jaminan keamanan investasi dan rasa aman di dalam negeri.
3. Stabilitas perekonomian terganggu  
Akibat nilai tukar rupiah, harga rupiah semakin anjok dan dolar naik. Sehingga harga kebutuhan semakin naik, daya tarik rakyat melemah, PHK di mana-mana.
4. Sosial Budaya  
Masyarakat mudah curiga, sehingga tidak ada toleransi dan perdamaian.
5. Pertahanan dan keamanan  
Aksi radikalisme mengakibatkan korban luka dan kematian bagi mereka yang tidak bersalah, sehingga menciptakan gangguan keamanan, dan menimbulkan rasa cemas.<sup>150</sup>

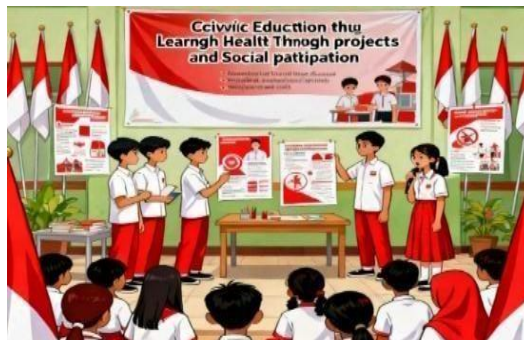
---

<sup>150</sup> Nini Adelina Tanamal and Sapta Baralaska Utama Siagian, Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi di Indonesia Pancasila Value Implementation In Handling Intolerance In Indonesia,” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 3 (2016): 172–189.

## BAB IX

### INOVASI DAN UPAYA PENGUATAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

#### 1. Pembelajaran PKN Berbasis Proyek dan Partisipasi Sosial



Pendidikan diperoleh manusia sejak usia dini, dan melalui pendidikan seseorang diharapkan memiliki bekal untuk kehidupannya kelak. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), salah satu tujuan utamanya adalah mengembangkan keterampilan siswa agar mampu menjadi warga negara yang berpartisipasi secara efektif, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab diungkapkan Suseno et al. (2022). PKN merupakan sebuah program pendidikan yang berfungsi mengajarkan prinsip-prinsip pragmatis serta prosedural, untuk mengembangkan nilai kemanusiaan dan budaya, serta memberikan kemampuan kepada setiap individu, khususnya siswa, agar dapat menjadi warga negara yang baik sesuai tuntutan moral dan konstitusi negara.<sup>151</sup> PKN memiliki peran penting dalam membentuk nilai kebangsaan dan karakter siswa sejak usia sekolah. Mata pelajaran ini dirancang agar peserta didik memahami dasar negara, konstitusi, serta nilai demokrasi dan tanggung jawab sebagai warga negara (wati dan sahronih, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya pembelajaran PKN masih sering berpusat pada teori dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Hal tersebut menjadi tantangan

---

<sup>151</sup> Minar Tobing and others, 'Sosialisasi Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan', *Journal of Community Service (JCOS)*, 3.3 (2025), 121–126.

bagi pendidik dalam menyajikan materi PKN yang lebih menarik, relevan, dan bermakna.<sup>152</sup>

Model Project Based Learning dikembangkan sejalan dengan tahap perkembangan berpikir peserta didik, yang menitikberatkan aktivitas pada proses belajar siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan kemampuan, kenyamanan, serta minat mereka. Siswa diberikan kesempatan untuk menentukan proyek yang ingin mereka kerjakan, mulai dari merumuskan masalah atau pertanyaan, memilih topik penelitian, hingga merancang langkah-langkah penyelidikan. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sumber belajar, memberikan dukungan diskusi dan pemecahan masalah, serta menjaga motivasi siswa selama kegiatan proyek berlangsung.

Project Based Learning merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan prinsip inti dalam suatu bidang ilmu, melibatkan siswa dalam pemecahan masalah serta aktivitas bermakna lainnya, sekaligus memberi kebebasan bagi mereka untuk membangun pengetahuan secara mandiri hingga menghasilkan produk nyata yang bernilai serta relevan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung berfokus pada kegiatan belajar singkat, terpisah-pisah, dan berpusat pada guru, model ini menonjolkan pembelajaran berdurasi lebih panjang, bersifat holistik–interdisipliner, berpusat pada siswa, serta terhubung dengan persoalan dan konteks dunia nyata.<sup>153</sup>

Di perguruan tinggi, kecakapan kewarganegaraan (civic skill) mahasiswa berkembang secara alami. Mahasiswa yang awalnya hanya berfokus pada materi yang disampaikan dosen, kemudian dituntut terlibat langsung dalam penyelesaian

---

<sup>152</sup> Alfina Al Zayyan and Irsya Laura, 'Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dalam Pembelajaran PKn SD', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2025, 9650–9656.

<sup>153</sup> Sulistianingsih Sulistianingsih and others, 'Strategi Penguatan Karakter Demokratis Melalui Pembelajaran PPKn Berbasis Proyek', *Jurnal Citizenship Virtues*, 4.2 (2024), 821–834.

berbagai proyek. Setiap tahap menuntut kesungguhan serta rasa tanggung jawab. Melalui proses tersebut, berbagai nilai positif dan kemampuan sebagai warga negara mulai terbentuk. Dengan pembiasaan yang berkelanjutan, mahasiswa akan memiliki civic skill yang mendukung mereka menjadi warga negara yang baik.<sup>154</sup>

Upaya meningkatkan partisipasi mengacu pada proses mendorong keikutsertaan individu maupun kelompok dalam berbagai aktivitas, termasuk bidang pendidikan, serta kebijakan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini penting karena tingkat partisipasi yang lebih tinggi dapat menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan mewakili kepentingan banyak pihak, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih adil. Salah satu bentuknya adalah partisipasi sosial, yang menggambarkan keterlibatan seseorang dalam kegiatan komunitas maupun organisasi sosial, seperti acara masyarakat, kegiatan sukarela, atau organisasi non-pemerintah (NGO).<sup>155</sup>

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi sosial. Dukungan pemerintah bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab warga terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga mereka terdorong membantu sesama. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memberikan kontribusi pada berbagai aspek penting. Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam kegiatan sosial maupun politik. Kedua, pendidikan ini mengembangkan keterampilan seperti kemampuan

---

<sup>154</sup> Sundari Utami and Dedek Helida Pitra, 'Pembentukan Civic Skill Mahasiswa Melalui Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Mata Kuliah Kewarganegaraan', *Jurnal Muara Pendidikan*, 8.1 (2023), 186–193.

<sup>155</sup> Meli Apriliani, Sheila Aulia Putri, and Untszaa Unzzila, 'Peningkatan Partisipasi Aktif Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Model Pembelajaran Kolaboratif Di Sekolah Dasar', *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1.3 (2024), 2-9.



berpikir kritis, analisis, serta komunikasi, yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat.<sup>156</sup>

## 2. Inovasi digital untu menanamkan nilai karakter dan kesadaran hidup sehat



Dalam arus perkembangan teknologi yang begitu cepat, dunia digital kini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama bagi generasi muda. Kemudahan memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi melalui media sosial telah membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat modern. Meski memberikan banyak manfaat, perkembangan digital juga menimbulkan tantangan dalam membangun karakter yang kuat dan beretika dinkalangan generasi mu. Nilai-nilai karakter seperti kedisiplinan, kerja sama, serta rasa saling menghormati kerap tergerus oleh budaya instan dan sifat individualistis yang muncul akibat pengaruh teknologi. Oleh karena itu, pendidikan karakter di era digital perlu dilakukan secara kreatif dan adaptif dengan strategi yang sesuai perkembangan teknologi agar tetap relevan.<sup>157</sup>

Selain itu, media digital memiliki peluang besar dalam menyebarkan informasi terkait kesehatan secara cepat dan lebih luas. Melalui berbagai platform seperti aplikasi kesehatan, portal informasi, konten edukasi berbentuk video, maupun media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan yang

---

<sup>156</sup> Fatiani Lase and Berkat Persada Lase, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8.8 (2025), 113-118.

<sup>157</sup> Muhtar Hidayat and Joko Subando, 'Strategi Penanaman Nilai-Nilai Karakter Dalam Mencegah Degradasi Moral Siswa Pada Era Digital', *Kependidikan*, 13.001 (2024), 523-534.

mereka perlukanserta mengarahkan mereka untuk menerapkan perilaku hidup sehat berdasarkan data dan prinsip ilmiah yang dapat dipercaya.<sup>158</sup>

Gaya hidup sehat tidak hanya terbatas pada konsumsi makanan bergizi dan seimbang, tetapi juga mencakup kebiasaan melakukan aktivitas fisik secara teratur, menjaga kualitas tidur, serta kemampuan dalam mengelola stres sejak dini. Namun pada kenyataannya, banyak anak pada masa sekarang kurang memberikan perhatian terhadap aspek tersebut karena tingginya ketergantungan dan paparan terhadap teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran yang besar karena dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Kurangnya kesadaran serta informasi yang tepat mengenai pentingnya gaya hidup sehat dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai permasalahan kesehatan seperti obesitas akibat minimnya aktivitas fisik, gangguan pada postur tubuh akibat terlalu lama menatap layar, serta meningkatnya potensi masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan.

Selain berdampak pada kondisi kesehatan fisik, pola hidup yang tidak sehat juga dapat menghambat perkembangan kognitif anak. Anak yang kurang bergerak atau tidak memperhatikan konsumsi makanannya cenderung mengalami penurunan konsentrasi, kesulitan dalam berpikir kritis, serta berkurangnya kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan akademik.<sup>159</sup>

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko tersebut, sangat penting juga bagi siswa untuk mendapatkan edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Edukasi ini perlu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi oleh para ahli yang kompeten dan didampingi oleh guru agar informasi yang diberikan sesuai dengan

---

<sup>158</sup> Rahmadani and others, 'Peran Pendidikan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pola Hidup Sehat Di Era Digital', *Jurnal Kependidikan*, 13.1 (2024), 305–318.

<sup>159</sup> Nur Irmayanti, 'Analisis Kesadaran Dan Pengetahuan Anak-Anak Terhadap Gaya Hidup Sehat Di Era Teknologi Digital', *SEMANGGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.02 (2023), 48–54.

kebutuhan perkembangan anak. Pemanfaatan media teknologi, seperti aplikasi digital yang dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang menarik, dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya hidup.<sup>160</sup>

Literasi digital memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan masyarakat mampu memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai keterhubungan antara proses digitalisasi dan literasi kesehatan sangat diperlukan dalam menyusun kebijakan serta program kesehatan yang efektif, termasuk yang dijalankan pemerintah di Indonesia. Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan yang mudah diakses. Dengan meningkatnya literasi digital di bidang kesehatan, masyarakat akan mampu mengambil keputusan medis yang lebih tepat, memahami informasi kesehatan dengan benar, serta memanfaatkan layanan kesehatan digital secara aman dan efisien untuk menjaga kondisi tubuh mereka.<sup>161</sup>

Tantangan dalam pendidikan nilai karakter khususnya pada aspek keagamaan juga semakin kompleks karena kehadiran media sosial dan platform digital yang mengubah cara peserta didik berinteraksi dan memperoleh informasi. Perubahan tersebut sering kali memengaruhi sikap, perilaku, bahkan moralitas peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan harus mampu memberikan bimbingan moral yang kuat agar peserta didik dapat memanfaatkan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama. Tantangan seperti penyalahgunaan teknologi, paparan konten negatif, risiko kecanduan, hingga gangguan keamanan digital menjadi persoalan besar yang perlu diatasi dalam

---

<sup>160</sup> Sindhu Rakasiwi and others, 'Pendampingan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Siswa MI Miftahul Hidayah Dengan Sosialisasi Aplikasi Digital', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.1 (2024), 8–14.

<sup>161</sup> Rachman Marbun, Destiani, '81-92', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, OLUME 1, N.Meningkatkan Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi Dengan Literasi Digital Pada SDGs 2030 (2024), 81–92 .

proses mengintegrasikan teknologi dengan pendidikan keagamaan di lingkungan sekolah.<sup>162</sup>

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kewarganegaraan Aktif



Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kemajemukan dalam berbagai aspek, seperti suku, agama, ras, dan budaya, yang mencerminkan kekayaan keberagaman bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan upaya konkret untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kewarganegaraan menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter warga negara yang kuat serta bertanggung jawab. Winarno (2020) menjelaskan bahwa menjadi bagian dari suatu negara bukan hanya sekadar status sebagai anggota resmi dari entitas tersebut, melainkan juga mencakup proses pembentukan karakter, sikap, dan perilaku yang mencerminkan identitas khas dari masyarakat tempat individu itu berada.<sup>163</sup>

Program Kewarganegaraan berperan sebagai landasan demokrasi, dengan tujuan membentuk masyarakat yang mampu berpartisipasi secara efektif dalam proses politik dan sosial. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis tentang sistem pemerintahan dan hak-hak dasar, tetapi juga menanamkan nilai-nilai

---

<sup>162</sup> Siti Khopipatu Salisah, Astuti Darmiyanti, and Yadi Fahmi Arifudin, 'Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Di Era Digital: Tinjauan Literatur', *Jurnal Pendidikan Islam*, 10.1 (2024), 36–42.

<sup>163</sup> Aqna Khoiru Aqilla and Aulia Prita Rahmasari, 'Tinjauan Terhadap Peran Aktif Warga Dalam Menerapkan Nilai Kewarganegaraan Di Masyarakat: Studi Kasus Di Lingkungan RT 027/RW 009 Kelurahan Mojo Kota Kediri', *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1.3 (2024), 2–13.

demokratis yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui partisipasi aktif, seperti pemilihan umum dan kegiatan advokasi, warga negara didorong untuk terlibat secara konstruktif dalam masyarakat dan menjadi agen perubahan yang positif.<sup>164</sup>

Untuk menumbuhkan kewarganegaraan aktif pada remaja sendiri dalam pemberdayaan masyarakat, ada beberapa contoh konkret yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari:

#### 1) Partisipasi dalam Proses Demokrasi

Mereka dapat menjadi pemilih yang sadar dan memilih berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari pendidikan kewarganegaraan

#### 2) Menjadi Relawan di Komunitas

Mereka dapat menjadi relawan dalam kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, mengajar anak-anak kecil, atau membantu organisasi kemanusiaan.

#### 3) Mengikuti Diskusi Publik

Remaja dapat terlibat dalam diskusi atau forum publik tentang isu-isu sosial atau politik yang relevan. Ini membantu mereka memahami berbagai perspektif dan belajar berargumentasi secara beradab.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Diana Rista and others, 'Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi Yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Warga Negara Menuju Masyarakat Yang Demokratis', *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 7 (2024), 1216–1227.

<sup>165</sup> Dina cahya novita Anjelita amanda, Shakyla luthfiyah sani, Ilham hudi, Diah wahyudi, 'Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Kewarganegaraan Aktif di Kalangan Remaja', *Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 1.3 (2024), 226–232.

Keterlibatan dalam program kewarganegaraan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan fisik seperti kerja bakti, tetapi juga melalui kontribusi dalam proses pembuatan keputusan, melakukan fungsi pengawasan, serta menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Program kewarganegaraan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dapat menjadi landasan kokoh dalam membangun komunitas yang mandiri, berdaya, dan menjunjung prinsip demokrasi.<sup>166</sup>

#### 4. Sinergi Antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat



Pendidikan merupakan fondasi utama dalam kemajuan sebuah negara. Upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan lembaga pendidikan sebagai tempat pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi kekuatan penting untuk mendorong perubahan dalam sistem pendidikan nasional. Sepanjang perkembangan zaman, kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengetahuan sesuai tuntutan era semakin mendesak. Karena itu,

---

<sup>166</sup> Berkat Persada Lase Fatiani Lase, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8.8 (2025), 9852–9857.

peran pemerintah dan lembaga pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.<sup>167</sup>

Dalam bidang pendidikan sendiri, Mengelola lembaga pendidikan merupakan proses pengaturan terhadap organisasi pendidikan yang melibatkan berbagai sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, untuk digerakkan secara optimal dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan ini juga memastikan keberlanjutan lembaga sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan yang diberikan. Fenomena penting yang selalu menjadi tantangan setiap tahun adalah tingkat minat masyarakat, karena mereka berperan sebagai subjek sekaligus objek pendidikan yang menentukan keberlangsungan institusi pendidikan tersebut.<sup>168</sup>

Pada era sekarang, perkembangan suatu lembaga pendidikan justru bergantung pada peran masyarakat. Hal ini karena kualitas lembaga terlihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam memberikan amanah kepada mereka. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan atau para pemimpinnya perlu menyusun strategi yang dapat menciptakan suasana lembaga yang adaptif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan terus dikaji, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk mampu menjalin sinergi serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaganya. Konsep ini dikenal sebagai pendidikan berbasis masyarakat, di mana lembaga berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap program yang dijalankan pemerintah.<sup>169</sup>

Namun, dalam kenyataannya saat ini sering terjadi ketidakharmonisan hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, maupun sebaliknya.

---

<sup>167</sup> Nasiruddin Al Arifi, 'Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan (Studi Analisis Historis Madrasah Nizamiyyah)', *Azkiya*, 7.1 (2024), 23–33 .

<sup>168</sup> Mohammad Hanif, 'Strategi Membangun Sinergi Sekolah Dengan Masyarakat Dalam Pengimplementasian Kurikulum Merdeka Belajar Dan Mewujudkan Sekolah Penggerak', *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1.6 (2023), 305–320.

<sup>169</sup> Hudan Ngisa Anshori, 'Hubungan Lembaga Pendidikan Dengan Masyarakat', *ElWasathiya: Jurnal Studi Agama*, 10.02 (2022), 141–150.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, padahal idealnya interaksi antara lembaga pendidikan dan masyarakat harus berjalan dengan baik. Jika suatu lembaga tidak membangun komunikasi yang positif dengan masyarakat, maka masyarakat akan enggan menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini menimbulkan jarak antara sekolah dan masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan, sehingga komunikasi internal lembaga pun menjadi terhambat.

Beberapa faktor yang membuat tingkat keterlibatan masyarakat Indonesia dalam pendidikan masih tergolong rendah, di antaranya:

- 1) Kondisi sosial, budaya, dan geografis masyarakat yang beragam.
- 2) Keterbatasan ekonomi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan.
- 3) Kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup> Ahmad Toni Wuri Annisafitri, 'Peran dan Posisi Hubungan Masyarakat Sebagai Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan'. 6.2 (2025), 1271-1278.



## **BAB X**

### **Implementasi dan Dampak Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kesehatan dan Karakter bangsa**

Dalam zaman globalisasi yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi dan akses informasi, individu dapat dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif jika belum mengembangkan karakter atau moral yang kokoh. Lickona (Lickona, 1996) telah lama mencatat adanya penurunan karakter di kalangan anak muda. Penurunan karakter ini sering kali terlihat dalam bentuk perilaku yang lebih negatif, termasuk tindakan anarki, kecurangan, pelanggaran terhadap peraturan yang ada, kematangan seksual yang terlalu awal, berkurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara, dan berbagai masalah lainnya.<sup>171</sup>

#### **1. Dampak jangka panjang pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter**

Melihat kondisi yang begitu memprihatinkan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program revitalisasi pendidikan karakter dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk periode 2005 hingga 2015, di mana Pemerintah menetapkan pembangunan karakter sebagai salah satu program utama dalam agenda pembangunan nasional (Tim Pendidikan Karakter, 2010)<sup>172</sup>

Kurangnya pemahaman dalam mempraktikkan prinsip-prinsip kewarganegaraan membuat Pendidikan Kewarganegaraan di dunia kampus menjadi solusi untuk mencapai perbaikan karakter serta moral mahasiswa. Proses pembentukan karakter dan moral mahasiswa sangat bergantung pada seberapa baik mereka memahami prinsip-prinsip moral yang selaras dengan kaidah lima sila Pancasila. Kemajuan lingkungan modern yang semakin tergantung pada teknologi berakibat pada berkurangnya sosialisasi di antara mahasiswa atau masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi interaksi sosial. Ini mencakup penerapan kebiasaan karakter dan moral yang sesuai dengan tradisi serta Pancasila.<sup>173</sup>

Dalam melanjutkan diskusi tentang kontribusi PPKn terhadap perilaku individu, penting untuk diingat bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam PPKn tidak hanya bersifat akademis, tetapi

---

<sup>171</sup> Panjaitan and others, 'Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kebijakan Pelayanan Kesehatan', *Ejournal.Pustakakaryamandiri.Com*, 2021, 75–81 .

<sup>172</sup> A Debik Kumala Dewi and others, 'Pengaruh Pembelajaran Pkn Dan Proses Penyesuaian Pembangunan Karakter Siswa', *Maruki Journal*, 1.1 (2024), 61–73.

<sup>173</sup> Azmi Nazil Muhsinin and others, 'Pembentukan Karakter Dan Moral Mahasiswa', *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1.4 (2023), 88–97.

juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membutuhkan metode pembelajaran yang menyeluruh dan menyatu, yang tidak hanya berfokus pada penguasaan informasi, tetapi juga pada pengembangan sikap dan perilaku yang diharapkan. Signifikansi PPKn dalam membentuk perilaku positif tercermin dalam dedikasi pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan yang mengutamakan pengembangan karakter dan kewarganegaraan. Dengan kurikulum yang dirancang dengan teliti, PPKn diharapkan mampu menyediakan dasar yang kuat untuk mengembangkan kepribadian yang berkualitas bagi setiap individu. Dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam kurikulum PPKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat.<sup>174</sup>

Namun, nilai-nilai tersebut harus disertai dengan keahlian teknis dan kemampuan strategis. Di sinilah ilmu manajemen memiliki peranan yang sangat signifikan. Manajemen merupakan kombinasi antara seni dan pengetahuan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal kepemimpinan, kemampuan manajerial sangat penting agar seorang pemimpin dapat merancang visi, menetapkan strategi, membuat keputusan yang tepat, serta mengelola tim dan organisasi dengan cara yang optimal.<sup>175</sup>

Padaranahsosial, dampak dari sistem ekonomi neoliberal ini telah mengikis nilai-nilai karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila dengan lima prinsip di dalamnya, yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan-Permusyawaratan, dan Keadilan sosial. Tanda-tanda penurunan nilai-nilai karakter Pancasila tersebut dapat dengan gampang ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh sikap individualisme, penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, keruntuhan rumah tangga karena kurangnya nilai-nilai teladan, dan hal-hal lainnya.<sup>6</sup>

Namun, pemenuhan hak tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan tanggung jawab. Dalam sebuah sistem hukum, setiap individu memiliki kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi untuk memastikan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat (Budiwono, 2025). Kewajiban ini mencakup kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, pembayaran pajak sebagai bentuk dukungan finansial untuk pembangunan negara, serta kesiapan untuk mempertahankan negara jika terjadi ancaman terhadap kedaulatan nasional. Kepatuhan terhadap hukum adalah dasar dari ketertiban sosial, sementara pajak langsung mendukung berbagai program pembangunan, layanan publik, dan penguatan lembaga negara. Kewajiban untuk bela negara juga mencerminkan rasa tanggung jawab bersama terhadap integritas dan kedaulatan bangsa saat menghadapi ancaman.

---

<sup>174</sup> Muhsinin and others.

<sup>175</sup> Ande Aksar, Kasim Karo, and Muh Said, 'PENDIDIKAN SEBAGAI INTEGRASI NASIONAL STUDI', 3.1 (2025), 61–68. <sup>6</sup> Dewi and others.

Oleh karena itu, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi unsur penting dalam menciptakan negara yang kuat, berdaulat, serta berkeadilan (Siregar et al., 2022).<sup>176</sup>

## **2. Peningkatan kesadaran hidup sehat dan tanggung jawab sosial warga negara**

Pola hidup yang sehat adalah salah satu elemen penting dalam memperbaiki kualitas hidup serta kesehatan masyarakat. Akan tetapi, di era modern dan kemajuan teknologi yang cepat, menghadapi tantangan dalam mempertahankan gaya hidup sehat menjadi semakin rumit. Salah satu masalah yang muncul adalah kemudahan akses informasi kesehatan yang semakin meningkat berkat adanya teknologi digital. Melalui internet, media sosial, aplikasi kesehatan, dan berbagai platform online lainnya, masyarakat dapat dengan cepat dan mudah mengakses informasi tentang gaya hidup sehat. Namun, tidak semua informasi yang ada di dunia maya memiliki akurasi dan kredibilitas yang tinggi, yang dapat membingungkan masyarakat. Di samping itu, kekurangan kemampuan dalam menyaring informasi yang valid juga dapat memperburuk situasi ini. Di sisi lain, meskipun akses terhadap informasi kesehatan semakin meluas, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat, termasuk pola makan seimbang, latihan fisik rutin, pengelolaan stres, dan tidur yang cukup, tetap cenderung rendah.<sup>8</sup>

Isu tentang pola hidup dan kebiasaan sehat, konflik seputar warisan, kekerasan dalam keluarga (KDRT), perceraian, serta kebutuhan untuk membina ekonomi masyarakat dan mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Komunitas memerlukan pengetahuan mengenai gizi yang baik, hukum perkawinan, hukum warisan, dampak negatif dari pernikahan dini, pemahaman tentang parenting, serta pengembangan usaha, akuntansi, dan perpajakan. Semua masalah yang disebutkan di atas adalah tantangan umum yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk juga mereka yang tinggal di Kelurahan Duri Kepa.<sup>7</sup>

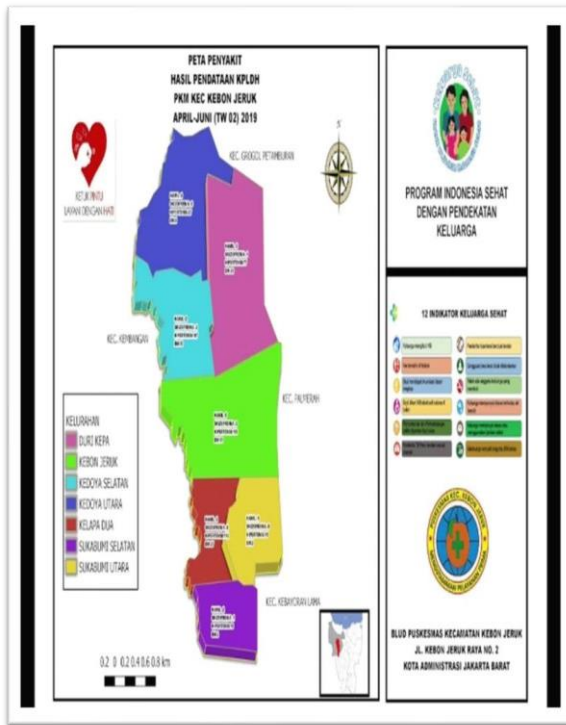
Kelurahan Duri Kepa terletak berbatasan dengan Palmerah di arah utara, di baratnya berbatasan dengan Kelapa Dua dan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sedangkan di timur berbatasan dengan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, serta Kebayoran Lama, dan di selatan berbatasan dengan Sukabumi Selatan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk di

---

<sup>176</sup> Si Karomah, 'Dampak Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan', *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*,. <sup>8</sup> Rahmadani and others, 'Peran Pendidikan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pola Hidup Sehat Di Era Digital', *Jurnal Kependidikan*, 13.1 (2024),.

<sup>7</sup> Rilla Ganno and others, 'Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha , Perilaku Hidup Sehat Dan Sadar Hukum', 2024, 80–87.

Kelurahan Duri Kepa tercatat mencapai 73.972 orang, terdiri dari 37.154 wanita dan 36.818 pria (BPS, 2023). Selain itu, wilayah kelurahan ini memiliki luas 3.87 km<sup>2</sup>, dengan 135 RT dan 14 RW, serta terdapat 23.958 kepala keluarga.



Permasalahan yang dialami oleh Kelurahan Duri Kepa, yang berlokasi di Jakarta Barat, pada umumnya mirip dengan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di area perkotaan dan sering kali disebut sebagai "masalah perkotaan." Jhon (2014) menyebutkan bahwa beberapa tantangan yang ada di perkotaan meliputi angka pengangguran yang tinggi, gaya hidup berlebihan dalam konsumsi, serta rendahnya kesadaran tanggung jawab sosial. Di sisi lain, Olivia (2021) menambahkan bahwa permasalahan di perkotaan juga mencakup ketimpangan dalam penyebaran penduduk, masalah di sektor pendidikan, serta tantangan terkait kesehatan.

Pemikiran dan perspektif manusia terhadap lingkungan sering kali berfokus pada pemanfaatan yang berlebihan, menyebabkan eksploitasi yang merugikan namun tidak diimbangi dengan usaha pelestarian. Dampak negatif terhadap lingkungan muncul dari tindakan manusia yang gagal memahami keterkaitan antara diri mereka dan alam sekitar. Alam telah menyediakan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan berkembangnya kebutuhan manusia yang terus-menerus, kita harus menjaga dan melestarikan baik sumber daya hayati maupun nonhayati demi keberlangsungan hidup di masa depan. Untuk menjaga alam dari ancaman dan memastikan kelangsungan hidup kita, diperlukan kecerdasan dan Pemikiran kritis dari setiap individu. Diharapkan dengan adanya pendidikan lingkungan yang tepat, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dapat ditanamkan pada generasi muda, sebab mereka adalah penerus yang akan mewarisi kekayaan alam di planet ini.<sup>177</sup>

Kebersihan pribadi dan lingkungan adalah tindakan krusial untuk melindungi tubuh dari mikroorganisme, patogen, dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Sebagai contoh, secara

<sup>177</sup> Nugroho Moh Alfian, 'KONSEP PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP: Upaya Penanaman Kesadaran Lingkungan', *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1.2 (2022), 93–108. <sup>11</sup> Robi Al Amin and others, 'Peran Penng Kebersihan Lingkungan Dalam Mewujudkan Hidup Sehat'.

teratur mencuci tangan dengan sabun dapat menurunkan kemungkinan terjadinya infeksi. Demikian juga, merawat kebersihan rumah, dapur, dan toilet sangat penting untuk menghindari munculnya faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit serta memastikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

### **3. Indikator keberhasilan masyarakat sehat dan berkarakter**

Kesehatan adalah simbol keberhasilan dalam pembangunan suatu negara, sehingga fokus pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, menjalani pola hidup bersih dan sehat, memiliki akses ke layanan kesehatan, serta mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terdiri dari serangkaian tindakan yang diambil berdasarkan kesadaran yang diperoleh melalui pendidikan, yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, atau komunitas untuk mandiri dalam aspek kesehatan dan berkontribusi secara aktif dalam upaya kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2011). Kehadiran PHBS di lingkungan rumah tangga yang sehat dapat terwujud melalui perilaku yang sehat dan lingkungan yang bersih (Depkes, 2008).<sup>178</sup>

Menurut tenaga medis di Puskesmas, perbedaan data ini juga dipicu oleh evaluasi PHBS Rumah Tangga yang dilakukan oleh kader, di mana terdapat ketidaksesuaian pada skor penilaian. Misalnya, pada indikator “Apakah ada anggota keluarga yang merokok?” yang seharusnya mendapatkan skor 1 ketika diisi, tetapi berdasarkan beberapa laporan, skor tersebut tidak tercantum sehingga mendapatkan nilai 0. Sebagai akibatnya, hasil laporan PHBS Rumah Tangga di area Puskesmas menunjukkan lebih banyak KK atau rumah tangga yang masuk dalam kategori tidak sehat dibandingkan dengan yang berada dalam kategori sehat.

Keberhasilan dalam pembangunan kesehatan sangat bergantung pada keterhubungan antara program dan sektor, serta kontinuitas dengan langkah-langkah yang telah dijalankan sebelumnya. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga memerlukan kolaborasi antar sektor dengan kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan penilaian pembinaan PHBS. Dengan

---

<sup>178</sup> Imelda Fitri, Rifa Rahmi, and Hotmauli Hotmauli, ‘Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat’, *Faletehan Health Journal*, 8.03 (2021).

menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari, diharapkan dapat menjadi faktor kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.<sup>179</sup>

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah elemen penting dari inisiatif pembangunan kesehatan masyarakat yang menyoroti signifikansi kontribusi individu dan kelompok dalam merawat serta meningkatkan taraf hidup. Di Indonesia, inisiatif PHBS telah dijadikan sebagai pendekatan nasional dalam kegiatan promosi dan pencegahan kesehatan (Mamahit et al., 2022). Salah satu tempat yang menjadi fokus utama penerapan PHBS adalah sekolah dasar, karena anak-anak di usia ini berada dalam fase penting dalam pembentukan perilaku dan kebiasaan hidup. Sekolah bukan sekadar lokasi untuk belajar hal-hal akademis, tetapi juga menjadi tempat awal untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini (Maknun, 2013).<sup>180</sup>

Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perubahan dalam sistem pendidikan karakter melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter, yang mengurangi jumlah karakter dari 18 menjadi 5, yang terdiri dari: (1) religius; (2) nasionalisme; (3) integritas; (4) kemandirian; dan (5) kegotongroyongan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Dalam studi ini, penguatan karakter siswa mengacu pada 18 jenis karakter yang telah ditetapkan. Memperkuat karakter siswa adalah elemen penting dalam strategi untuk memperkuat budaya bangsa. Penekanan pada karakter siswa harus menjadi perhatian menyeluruh bagi pengelola pendidikan, karena mereka adalah generasi penerus yang akan memimpin masa depan negara. Siswa yang memiliki karakter kuat adalah aset berharga dalam menciptakan peradaban yang tangguh.

Dan usaha ini akan berhasil jika proses pembelajaran dilakukan berdasarkan karakter-karakter tersebut. Pembelajaran yang berbasis karakter adalah metode pengajaran yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip normatif dan holistik, sehingga mampu membentuk siswa menjadi individu yang berkarakter kukuh, lembut hatinya, bersemangat tinggi, dan meraih prestasi yang cemerlang. Proses pembelajaran berbasis karakter perlu direncanakan dengan baik oleh para pendidik, dilengkapi dengan dukungan dari kepala sekolah, agar pembelajarannya benar-benar bebas dari aktivitas administratif yang seharusnya tidak mendominasi, dan pembelajaran berbasis karakter dapat dilaksanakan dengan fokus pada

---

<sup>179</sup> Winda Soba Diatul Ula Ika Harni Lestyoningsih, 'Parsipasi Masyarakat Dalam Pengabdian Masyarakat Untuk Menerapkan Perilaku Hidup' *Jurnal Pengabdian Teknik, Ekonomi Dan Sosial Volume 1, Nomor 1, Juli 2024*: 27-43 *Kesehatan Lingkungan*, 1 (2024), 27–43.

<sup>180</sup> Heni Anggraini, 'Determinasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Lingkungan Sekolah Dasar', *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 4.4 (2025), 28–36.

penguatan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku siswa. Inilah yang menjadi esensi dari tujuan pendidikan, yaitu menjangkau aspek ini harus dimiliki setiap siswa secaraimbang.<sup>181</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter mendapatkan dampak positif dari berbagai sumber, seperti pendidikan di lembaga sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan luar kelas serta sekolah. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam merancang pengembangan kurikulum agar siswa dapat memahami serta menghargai nilai-nilai dari pendidikan karakter bangsa. Dalam kurikulum pendidikan ini, guru biasanya lebih menekankan pada penyampaian prinsip-prinsip moral umum secara satu arah tanpa mengajarkan moral atau karakter secara terpisah, serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengalami pengalaman terstruktur yang dapat mengaitkan penilaian moral dengan situasi moral yang dihadapi ). Pengenalan karakter religius juga sebaiknya sering dilakukan dalam kelas, tanpa memberikan ruang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman terstruktur yang bisa mengaitkan penilaian moral dengan situasi moral. Karakter religius ini perlu diperkenalkan secara terusmenerus dalam kelas tanpa mengabaikan kesempatan bagi siswa untuk mengalami pengalaman terstruktur yang menautkan penilaian moral.<sup>182</sup>

#### **4. Arah Pembangunan bangsa melalui penguatan PKn sebagai pendidikan nilai**

Pancasila secara esensial adalah sebuah sistema nilai yang merupakan paduan dari nilai-nilai mulia dan budaya bangsa Indonesia, yang berasal dari elemen-elemen kebudayaan secara keseluruhan, menyatu menjadi budaya bangsa Indonesia. Ada beberapa pandangan mengenai asal-usul Pancasila. Meski pandangan mengenai asal-usul Pancasila berbeda-beda, semuanya memiliki posisi yang setara. Asal-usul Pancasila dibagi menjadi dua kategori, yaitu asal-usul langsung dan asal-usul tidak langsung. Asal-usul langsung berkaitan dengan diskusi-diskusi sebelum dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang menunjukkan dimensi langsung Pancasila sebagai dasar negara. Di sisi lain, asal-usul tidak langsung lebih mencerminkan aspek sejarah sebelum kemerdekaan. Kajian mengenai filsafat Pancasila menyatakan bahwa elemen-elemen Pancasila sesungguhnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Meskipun secara resmi Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus, bangsa Indonesia telah memiliki elemen-elemen Pancasila jauh sebelum tanggal tersebut dan telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>183</sup>

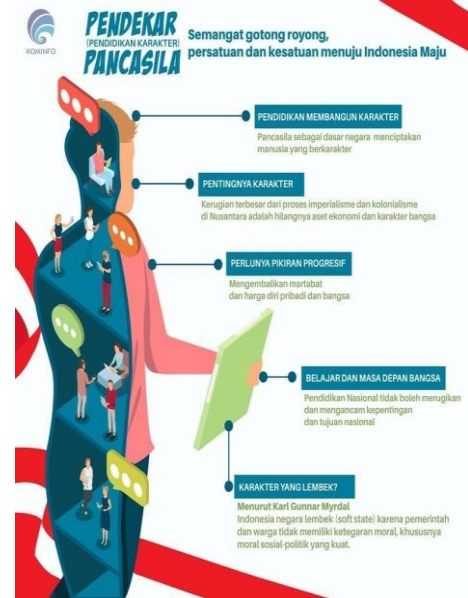
---

<sup>181</sup> Imam Gunawan, Hasan Argadinata, and Universitas Negeri Malang, ‘Dampak Pembelajaran Berkarakter Terhadap Penguatan Karakter Siswa Generasi Milenial’, *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3.2019 (2020), 160–70.

<sup>182</sup> Nining Indah Lestari Lubis, ‘Implementasi Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kreafitas Peserta Didik’, 03.08 (2019), 698–708.

<sup>183</sup> Luh Putu Swandewi Antari and Luh De Liska, ‘916-Arcle Text-2345-1-10-20201004’, *Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa*,.

Sebagai salah satu pendekatan dalam meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan pendidikan karakter, konsep Penguatan Pendidikan Karakter diimplementasikan, didalam, diperluas, serta diarahkan untuk menyinkronkan berbagai program dan agenda pendidikan karakter yang telah dijalankan (Kemendikbud 2016). Selaras dengan pendapat Trisiana, Sugiarto, dan Rispantyo yang menyatakan bahwa untuk mengatasi isu-isu terkait nilai kemanusiaan perlu adanya penguatan pendidikan karakter (Trisiana et.al 2019). Hal ini diperkuat oleh kebijakan pemerintah Indonesia saat ini yang tercermin dalam salah satu butir Nawacita melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang diteruskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang telah dimulai sejak tahun 2016.<sup>184</sup>



Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pedoman untuk masyarakat Indonesia, terutama dalam aktivitas sehari-hari. Selain diakui sebagai ideologi, Pancasila juga dipandang sebagai falsafah kehidupan bangsa saat ini, di mana pengaruh globalisasi secara perlahan mulai mengubah cara hidup masyarakat. Peranan Pancasila sangat krusial untuk menata kehidupan di Indonesia, yang memerlukan penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, khususnya kepada generasi penerus bangsa, yakni mahasiswa yang merupakan calon pemimpin masa depan. Mereka diharapkan mampu memperkuat komitmen untuk mencapai cita-cita menjadi bangsa yang maju, sejahtera, adil, makmur, merdeka, serta Bersatu. Penanaman nilai moral Pancasila kepada semua lapisan masyarakat sangat diperlukan, termasuk mahasiswa yang akan meneruskan semangat kemajuan bangsa dengan penekanan pada beberapa aspek, yaitu (): 1) pentingnya kesadaran akan semangat persatuan; 2) kesadaran akan penerapan norma dalam interaksi sosial; 3) kesadaran mengenai kesehatan mental bangsa; 4) pentingnya penegakan hukum; serta 5) kesadaran akan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks masyarakat, kebangsaan, maupun kenegaraan<sup>185</sup>

Hasil observasi awal dari tim pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa yang menjadi anggota organisasi internal di kampus sangat membutuhkan pendorong

<sup>184</sup> Antari and Liska.

<sup>185</sup> Rachmat Agung and others, 'Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dan Nasionalisme Pada Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Musamus', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4.5 (2024), 6277–86.



untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di sekitar mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Musamus, dengan tujuan untuk mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme di seluruh mahasiswa yang terlibat dalam organisasi mahasiswa di tingkat jurusan. Oleh karena itu, judul dari kegiatan ini adalah Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Nasionalisme pada Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Musamus.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan krusial dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus. Melalui pengalaman belajar di PKn, para siswa dilatih untuk memahami pentingnya toleransi, rasa cinta tanah air, serta kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. PKn menjadi garda terdepan dalam membangun karakter bangsa melalui metode pembelajaran aktif seperti Discovery Learning, yang membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan menghargai keberagaman. Di sisi lain, PKn berkontribusi untuk mempersiapkan generasi milenial agar menjadi agen perubahan yang memiliki semangat nasionalisme, inklusivitas, serta siap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dengan menanamkan prinsip-prinsip kebhinekaan, toleransi, dan demokrasi. Oleh karena itu, penguatan PKn secara konsisten sangat esensial untuk menjaga kesatuan bangsa serta menciptakan karakter warga negara yang mampu bersaing dengan landasan Pancasila ().<sup>186</sup>

Saat ini, kemunculan globalisasi tidak dapat dihindari oleh kita. Dari sudut pandang tertentu, globalisasi dapat berpengaruh pada struktur masyarakat yang bersifat global dan tidak mengenal batas geografi. Selain itu, kemajuan dalam teknologi dan informasi yang semakin pesat saat ini, memiliki kemampuan untuk mendukung proses distribusi pengaruh globalisasi ke berbagai belahan dunia.<sup>187</sup>

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat selama lima dekade terakhir dibandingkan dengan kondisi saat ini jelas mengalami transformasi, sejalan dengan kemajuan masyarakat serta inovasi di bidang teknologi dan informasi. Transformasi ini, baik secara langsung maupun tidak, akan memengaruhi cara bersikap individu, bahkan yang berkaitan dengan interaksi dengan kelompok masyarakat tertentu, yang pada akhirnya dapat membawa perubahan terhadap budaya atau mendorong terjadinya perubahan sosial.<sup>188</sup>

---

<sup>186</sup> Sri Yunita and others, 'Analisis Kris Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Indonesia', *Indonesian Journal of Learning Studies (IJLS)*, 3.1 (2025), 69–78.

<sup>187</sup> Ahmad Hadi Ramdhani, 'Transformasi Etno-Musik Tradisional Sasak: Evolusi Budaya Dan Pertentangan Kelas', *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2.1 (2021), 1–18 <<https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2484>>.

<sup>188</sup> Nurjannah, 'Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34 (2018), 5–22.

Berdasarkan Hendrik (2012), platform pembelajaran Powtoon memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulan dari media Powtoon ini mencakup sifat interaktif, melibatkan semua aspek indra, penggunaan yang praktis dan kolaboratif, lebih bervariasi, serta mampu memberikan umpan balik dan motivasi. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Bakhtiar Ismail Akbar (2016) dengan judul “Pengembangan Media Video Animasi Powtoon Pada Kelas II Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Disd Labscool UNNES” menunjukkan bahwa media video animasi berbasis Powtoon sukses dikembangkan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran di kelas.<sup>189</sup>

Pola hidup yang didasarkan pada Pancasila tampak memudar, yang berdampak pada hilangnya identitas bangsa Indonesia. Hal ini sudah terlihat dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia agar menjadi individu yang lebih bermartabat. Jika dilihat lebih dalam, masing-masing sila Pancasila mengajarkan rakyat Indonesia untuk menjadi orang yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri, masyarakat, lingkungan, agama, maupun negara (). Pancasila mengandung nilai-nilai mulia yang mendorong kesadaran masyarakat untuk memiliki jiwa nasionalis dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Munculnya sikap mementingkan diri sendiri dan ketidakpedulian, serta generasi muda yang terjebak dalam budaya asing akibat dari globalisasi, jelas menunjukkan sebuah krisis besar bagi Bangsa Indonesia yang perlu segera dicari solusinya.<sup>190</sup>

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, pertanyaan utama dalam studi ini adalah bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dapat mendukung terciptanya demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Dengan demikian, sasaran dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fungsi hak dan kewajiban warga negara sebagai komponen dasar dalam pembangunan demokrasi, serta untuk menemukan tantangan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara keduanya dalam konteks pemerintahan di Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>189</sup> Evi Andriani, Ade Nuraini, and Ria Rosalina, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Interaktif Berbasis Powtoon Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Partisipasi Aktif Siswa Pada Materi Budaya Demokrasi’, 5.2 (2025), 132–41.

<sup>190</sup> Qinwan Nishrina and others, ‘Sebagai Upaya Membangun Nasionalisme Di Tengah’, 1.1 (2023), 111–17. <sup>25</sup> N B P Widiyanti and I H Wiranata, ‘Hak Dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Kunci Demokrasi Berkualitas Di Indonesia’, *Journal of Global Humanistic Studies*, 3.4 (2025), 20–29.

## **BIODATA PENULIS**



**Keysa Aura Syahna Pisano**

**0801251014**

**Medan, 02 Februari 2008**



**Shira Rizkyani**

**0801251060**

**Medan, 22 Maret 2007**



**Shautiya Khairiyah**

**0801251041**

**Binjai, 18 Januari 2008**



**Khairin Dinda Zanu**

**0801251022**

**Marbau, 17 Januari 2007**



**Sri Rafida Hayani**

**0801251008**

**Lubuk Besar, 11 Juli 2007**



**Ranisah Mukerzi**

**0801251034**

**Mahato, 1 November 2006**



**Alya Azura Haris**

**0801251047**

**Kisaran, 11 September 2007**



**Ferry Hermawan**

**0801251025**

**Medan, 28 Agustus 2007**



**Nindita Khairin Nazwa**

**0801251002**

**Air Joman, 10 November 2007**



**Wanna Aysha**

**0801251026**

**Medan, 01 Desember 2007**





E-book Membangun Masyarakat Sehat dan Berkarakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan menyoroti peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk masyarakat Indonesia yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual serta berkarakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Buku ini menegaskan keterkaitan erat antara kesehatan dan karakter sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Melalui penguatan nilai nasionalisme, demokrasi, tanggung jawab, dan toleransi, PKn diposisikan sebagai pendidikan nilai yang membangun kesadaran hidup sehat, etika, dan kepedulian sosial. E-book ini menegaskan bahwa penguatan PKn merupakan kunci mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadaban dan berdaya saing di era modern.